

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



PETA INDONESIA 34 PROVINSI





H. SAHBIRIN NOOR
GUBENUR KALIMANTAN SELATAN



H. MUHIDIN
WAGUB KALIMANTAN SELATAN

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI



Ir. ROY RIZALI ANWAR, ST, MT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



Kata Pengantar

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir nanti.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan media pertanggungjawaban dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diketahui

adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah provinsi serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.

Dengan tersusunnya laporan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh instansi perangkat daerah yang telah turut membantu dalam mempresentasikan capaian sasaran dan indikator kerjanya melalui penyusunan laporan ini, diharapkan pula LAKIP ini dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun terakhir RPJMD-P 2016-2021.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun mudahan dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. dan menjadi umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.

Panjamasin, Maret 2022

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR



LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok	1
C. Struktur Organisasi	3
D. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan	8
E. Sistematika Penyajian	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	12
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	26
C. Akuntabilitas Keuangan	152
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	163
B. Strategi Peningkatan Kinerja	165



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Telp. 0511 – 6749235 Fax. 0511 – 6749237
Email : it.prov.kalsel@gmail.com atau itprovkalsel@yahoo.co.id
BANJARBARU 70733

PERNYATAAN TELAH DIREVIU APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dikeluarkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 09 Maret 2022.

INSPEKTUR,

A. FYDAYEEN, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197002-02 199603 1 002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 merupakan laporan kinerja akhir periode dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 ini disusun menindaklanjuti Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan/atau kekurangan yang terjadi serta menyajikan pencapaian dan perbandingan Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja antara tahun 2021, 2020, tahun 2019, tahun 2018 tahun 2017 dan tahun 2016.

Kinerja utama yang diukur melalui 7 indikator bersifat makro yang merepresentasi tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Peningkatan IPM, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Indeks GINI, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk. Menurut angka absolut, pada tahun 2021 ini secara umum **meningkat** dari tahun 2020.

Capaian Kinerja Makro 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan IPM	Indeks	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,0-71,8	71,28	100%
2	Angka Pengangguran	%	5,45	4,77	4,5	4,31	4,74	3,6 - 4	4,95	80,80%
3	Pertumbuhan ekonomi	%	4,38	5,29	5,13	4,08	-1,82	4,50-5,03	3,48	77,33%
4	Angka Kemiskinan	%	4,52	4,70	4,65	4,47	4,83	3,96 – 4,01	4,56	87,93%
5	Indeks GINI	Indeks	0,351	0,347	0,340	0,334	0,351	0,286	0,325	88,00%
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,07	69,38	68,78	68,38	68,43	64,00	71,03*	110,98%
7	Tingkat pertumbuhan penduduk	%	1,81	1,77	1,74	1,71	1,13	1,59	0,9	176,66%
Rata-rata Capaian									103,10%	

Keterangan :

*Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup



Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG's (Data BPS dan Data diolah dari IKLH Tahun 2020, Pusdatin KLHK)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Peningkatan IPM	71,28	71,25	67,90	76,88	71,19	-	72,29	-
2	Angka Pengangguran	4,95	4,53	5,82	6,83	4,58	-	6,49	-
3	Pertumbuhan ekonomi	3,48	3,40	4,78	2,48	3,98	-	3,69	-
4	Angka Kemiskinan	4,56	5,16	6,84	6,27	6,83	-	9,71	-
5	Indeks GINI	0,325	0,320	0,315	0,331	0,285	-	0,381	-
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,43*	75,04*	72,59*	75,06*	80,85*	-	-	-
7	Tingkat pertumbuhan penduduk	0,9	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan: * Data Tahun 2020

Indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 telah melebihi target yang ditetapkan sebesar 71,0-71,8 dan mengalami peningkatan sebesar 0,37 dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 sebesar 71,19 menjadi 71,28 ditahun 2021. Nilai tersebut menyatakan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Selatan telah berstatus “tinggi”, karena nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan sudah diatas 70.

Pada bulan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja mencapai 2.219.395 juta orang. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 32,428 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2020 sebesar 2.186.967 juta orang. Pada periode Agustus 2021 jumlah pengangguran sebesar 109.968 ribu orang terdapat penambahan jumlah pengangguran sebanyak 6.320 ribu orang yang sebelumnya sebesar 103.648 ditahun 2020. Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2021 adalah 4,95 persen. Indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen dibandingkan keadaan Agustus 2020 sebesar 4,74 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 3,48% ditahun 2021 dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,82%.

Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan sebesar 197,76 ribu orang yang setara dengan 4,56% dari total penduduk Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 9,16 ribu orang dari kondisi September 2020 sebesar 206,92 ribu



orang yang setara dengan 4,83%. Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 merupakan Provinsi dengan angka Kemiskinan terendah dipulau Kalimantan bahkan yang terendah di Indonesia.

Indeks GINI/*GINI Ratio* merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0–1, dengan arti semakin mendekati 1 ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada kondisi bulan September 2021 mencapai 0,325. Angka ini menurun sebesar 0,026 dibandingkan kondisi bulan September tahun 2020 sebesar 0,351.

Dari perhitungan sementara yang dilakukan, IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 mencapai 71,03, dan jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,60 Point dimana pada tahun 2020 IKLH Kalimantan Selatan mencapai 68,43.

Pencapaian indikator **Tingkat Pertumbuhan Penduduk** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 0,9 dari target 1,59 sehingga persentase capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 176,66%.

Hasil pengukuran secara mandiri (*self assessment*) menginformasikan secara ringkas tingkat capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) sasaran strategis dan 32 indikator kinerja utama yaitu 131,45% dengan kategori **Sangat Memuaskan**, dengan rincian 22 (dua puluh dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Memuaskan**, 4 (empat) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Memuaskan**, 4 (empat) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Sangat Baik**, 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Baik**, dan 1 (satu) indikator dengan tingkat capaian kinerja **Cukup**.

Rata-rata capaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya kekurang berhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.





BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menetapkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja diwujudkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus sistem tersebut adalah menyusun laporan hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban kinerja organisasi kepada instansi yang lebih tinggi.

Terbitnya Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjadi acuan disusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021, sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian kinerja sebagaimana disepakati dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021. Penetapan kinerja dimaksud telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan dana baik dari APBD maupun sumber dana lainnya serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, juncto Undang-

Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain



BAB I PENDAHULUAN

mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106). Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin oleh Gubernur Sahbirin Noor dengan Wakil Gubernur Rudy Resnawan.

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjalankan otonominya, didukung dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008,

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic service*) bagi masyarakat sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*Core Competence*) yang menjadi kekhasan daerah.

Urusan wajib yang dimiliki meliputi :

- a. Pendidikan ;
- b. Kesehatan ;
- c. Lingkungan Hidup ;
- d. Pekerjaan umum ;
- e. Penataan ruang ;
- f. Perencanaan Pembangunan ;
- g. Perumahan ;
- h. Kepemudaan dan Olah raga ;
- i. Penanaman modal ;
- j. Koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- k. Kependudukan dan catatan sipil ;
- l. Ketenagakerjaan ;
- m. Ketahanan pangan ;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- p. Perhubungan ;
- q. Komunikasi dan informatika ;
- r. Pertanahan ;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa ;
- v. Sosial ;
- w. Kebudayaan ;
- x. Statistik ;
- y. Kearsipan ; dan
- z. Perpustakaan.



Selain menjalankan urusan wajib, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian ;
- c. Energi dan sumber daya mineral ;
- d. Pariwisata ;
- e. Industri ;
- f. Perdagangan ; dan
- g. Ketransmigrasian.

C. Struktur Organisasi

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

Satuan Kerja Perangkat Daerah	
A	Sekretariat Daerah , yang membawahi :
1	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mengoordinasikan
a	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
b	Biro Hukum
c	Biro Kesejahteraan Rakyat
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan
a	Biro Perekonomian
b	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
c	Biro Administrasi Pembangunan
3	Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan
a	Biro Umum
b	Biro Organisasi
c	Biro Administrasi Pimpinan
B	Sekretariat DPRD
C	Dinas Daerah terdiri atas :
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
2	Dinas Kesehatan ;
3	Dinas Perhubungan;
4	Dinas Komunikasi dan Informatika ;
5	Dinas Sosial ;



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
7	Dinas Perindustrian;
8	DinasPerdagangan ;
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;
11	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
12	Dinas Pemuda dan Olahraga;
13	Dinas Pariwisata
14	Dinas Kehutanan ;
15	Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
16	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
17	Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura ;
18	Dinas Perikanan dan Kelautan ;
19	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ;
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
22	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24	Dinas Ketahanan Pangan ;
25	Dinas Lingkungan Hidup;
D	Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2	Inspektorat ;
3	Badan Keuangan Daerah;
4	Badan Kepegawaian Daerah ;
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
8	Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;
9	Rumah Sakit dr.H. Moch. Ansari Saleh ;
10	Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;
11	Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
12	Badan Pemghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
E	Lembaga lainnya
1	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;
F	Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri atas :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1	Taman Budaya;
2	Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ;
3	Museum Lambung Mangkurat; dan
4	Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi.
Dinas Kesehatan	
5	Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kallimantan Selatan ;
6	Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat ;
7	Instalasi Farmasi ; dan
8	Laboratorium Kesehatan.
Dinas Perindustrian	
9	Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Dinas Perdagangan	
10	Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang .
Dinas Sosial	
11	Panti Sosial Bina Netra " Fajar Harapan " ;
12	Panti Sosial Asuhan Anak "Budi Mulia" ;
13	Panti Sosial Bina Remaja "Budi Satria" ;
14	Panti Sosial Bina Wanita "Panti Melati" ; dan
15	Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Sejahtera" .
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
16	Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
17	Balai Latihan Kerja ;
18	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I (Banjarmasin dan Batola);
19	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II (Banjarbaru, Banjar, Tapin, dan Tanah Laut);



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
20	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I II (Balangan, Tabalong, HSU, HSS,dan HST); dan
21	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV (Tanah Bumbu dan Kotabaru)
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	
22	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
23	Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ; dan
24	Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
25	Balai Pelatihan dan Penerapan Teknologi Pertanian
Dinas Perkebunan dan Peternakan	
24	Balai Inseminasi Buatan ; dan
25	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
Dinas Perikanan dan Kelautan	
26	Pelabuhan Perikanan Kotabaru;
27	Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ;
28	Pelabuhan Perikanan Muara Kintap ;
29	Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru;
30	Pelabuhan Perikanan Batulicin;
31	Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan; dan
32	Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
Dinas Kehutanan	
33	Taman Hutan Raya Sultan Adam ;
34	Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
35	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi;
36	Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung;
37	Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku;
38	Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong;
39	Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan;
40	Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut;
41	Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan
42	Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai
43	Kesatuan Pengelolaan Hutan Sengayam



Satuan Kerja Perangkat Daerah	
Dinas Perhubungan	
44	Terminal Type B.
Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah	
45	Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil .
Dinas Energi Sumber Daya Mineral	
46	Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
47	Laboratorium Bahan Kontruksi; dan
48	Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula.
Dinas Pendapatan Daerah	
49	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I ;
50	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II ;
51	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru ;
52	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura ;
53	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau ;
54	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan ;
55	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai ;
56	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin ;
57	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai ;
58	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung ;
59	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari ;
60	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin ;
61	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru ; dan
62	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan ;
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
63	Kebun Raya Banua.
Dinas Lingkungan Hidup	
64	Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Regional Banjarbakula.



D. ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan dengan memperhatikan beberapa Isu strategis internasional, nasional dan regional, maka isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat memberikan manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdiri atas:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Kalimantan Selatan diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat / penduduk).

Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 71,28, meningkat 0,37 poin (0,52 persen) dibandingkan capaian tahun sebelumnya (70,91).

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan,

sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan.

Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 0,92 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 12,81 tahun atau setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau Diploma 1. Angka ini meningkat 0,13 tahun dibandingkan 2020 yang mencapai 12,68 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,05 tahun, dari 8,29 tahun pada 2020 menjadi 8,34 tahun pada 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 68,83 tahun, lebih lama 0,17 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.



2. Daya Saing Perekonomian Daerah

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,48 persen (c-to-c). Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,89 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,22 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 6,23 persen. Adapun lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Jasa Lainnya sebesar 1,16 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,16 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,19 persen. Sedangkan jika dilihat dari komponen pengeluaran, hampir semua komponen pengeluaran tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 19,02 persen diikuti oleh Komponen PK-P sebesar 3,56 persen, Komponen PK-LNPRT sebesar 1,10 persen; Komponen PMTB sebesar 0,83 persen; dan Komponen PKRT sebesar 0,79 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 21,01 persen.

3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan

Berdasarkan perhitungan sementara indeks Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka 71,35 dengan kategori baik. Angka ini didapat dari 4 komponen perhitungan IKLH yaitu *pertama*, Indeks Kualitas Air sebesar 55,00, *kedua* Indeks Kualitas Udara sebesar 89,54, *ketiga* Indeks Kualitas Lahan sebesar 49,97 dan yang *ke empat* Indeks Kualitas Air laut sebesar 77,57.

Berdasarkan nilai indeks sementara diatas nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 2,92 poin dibanding tahun 2020 yaitu 68,43 menjadi 71,35 ditahun 2021. Nilai IKLH ini masih nilai sementara karena masih dalam proses pengumpulan data-data dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan refresentatif.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Pusdatin KLHK, IKLH Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 masih menjadi Provinsi dengan nilai IKLH terendah di antara Provinsi di pulau Kalimantan. Dengan nilai 68,43 Kalimantan Selatan berada di urutan terbawah, dan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan nilai



BAB I PENDAHULUAN

IKLH paling tinggi, disusul dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Dasar

Perkembangan perekonomian dan sosial masyarakat yang telah berkembang pesat, belum sejalan dengan tingkat percepatan pelayanan infrastruktur perekonomian dan dasar yang tersedia. Untuk itu perlu segera peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan infrastruktur perekonomian seperti ketersediaan energi listrik dan tingkat pelayanan perhubungan, ketersediaan dan kemantapan jalan dan jembatan sebagai penghubung antar wilayah dan juga ketersediaan dan perbaikan infrastruktur pengairan untuk perkuatan sektor pertanian.

Ketersediaan energi listrik jauh berada di bawah dari tingkat kebutuhan untuk kegiatan sosial dan ekonomi yang ada, apalagi jika dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi kedepannya, sedangkan perhubungan udara (kondisi kepadatan dan pelayanan bandara), perhubungan darat (tingkat kepadatan lalu lintas yang sudah menurunkan waktu tempuh) dan perhubungan laut (belum mempunyai pelabuhan laut yang representative, yang dapat menghubungkan provinsi

ini dengan kapal-kapal besar). Untuk memenuhi kebutuhan energy yang masih kurang diperlukan pengembangan energy baru dan terbarukan.

Dalam pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan diperlukan peningkatan kualitas pada jalan – jalan yang telah masuk dalam SK Jalan Provinsi. Selain itu perlunya jalan – jalan alternatif dalam upaya memperpendek dan mempermudah alur transportasi seperti jalan bebas hambatan. Difokuskan juga jalan dan jembatan sebagai akses utama ke Kawasan – Kawasan strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pada infrastruktur irigasi yang saat ini masih perlu perbaikan dan rehabilitasi mengingat Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai salah satu lumbung pangan Nasional. Infrastruktur pengairan terkait pengurangan bencana banjir sebagai proteksi terhadap sarana prasarana yang telah dibangun juga merupakan suatu hal harus diperhatikan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan.

Untuk pelayanan Infrastruktur dasar seperti air bersih, jalan, listrik perdesaan yang memerlukan perhatian serius agar pemerataan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Selain



BAB I PENDAHULUAN

itu pelayanan infrastruktur ini belum merata antar daerah, sehingga isu pemerataan pelayanan infrastruktur juga penting, selain peningkatan pelayanan terhadap daerah yang sudah terlayani.

5. Kinerja Pemerintahan Daerah

Kondisi kinerja pemerintahan daerah provinsi Kalimantan Selatan, secara umum sudah relatif baik, sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa indikator, seperti: Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah telah mencapai WTP dalam beberapa tahun terakhir ini, Indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2020 berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi

yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapatkan nilai 78,49 atau dengan predikat BB. Indikator Kinerja Ketepatan Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran (APBD), selalu Tepat Waktu,

Secara umum Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kedepannya perlu lebih meningkatkan kinerjanya lagi, agar Pemerintah Provinsi ini lebih akuntabel, transparan dan profesional, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap peningkatan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
- Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016–2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2021, dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.
- Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2021..
- Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 adalah merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan P-RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019.

P-RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi diuraikan sebagai berikut.

VISI :

“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN, BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”

Dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus dilaksanakan yaitu :

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Penyusunan visi dan misi P-RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu:





BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, yang ditempuh dengan 7 misi, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Selatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Nomor 188.44/0659/KUM/2019 tanggal 2 Agustus 2019, sebagai berikut :





BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No	Kinerja Utama	No.	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	13,7
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,64
3	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6 - 4
4	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	100
5	Meningkatnya Kesenjangan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,00
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,78
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,63
7	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah	7
8	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01
		2	Opini BPK	WTP
		3	Nilai SaKIP	81,01
		4	Indeks Profesionalisme Pegawai	95
9	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	1	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasar	45
10	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	1	Angka Konflik	0
		2	Angka Kriminalitas	4344
11	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	1	Indeks Pembangunan Pemuda	53
		2	Persentase Pemuda Mandiri	1,50
12	Meningkatnya prestasi olahraga provinsi kalsel	1	Indeks Pembangunan Pemuda	50
13	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	45





BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

No	Kinerja Utama	No.	Indikator Kinerja Utama	Target
14	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan	1	Persentase Infrastruktur Ke-PU an yang berkualitas	70,89
		2	Persentase Kesuainan Tata Ruang	82
		3	Persentase luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan dalam Kondisi Baik	77,17
		4	Rasio Elektrifikasi	95,5
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Budang Transportasi	81,25
15	Meningkatnya Perekonomian Daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel	4,50-5,03
16	Terwujudnya Mandiri Pangan	1	Skor pola pangan harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	84,50
17	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	1	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	14,40
18	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,00
19	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	1	Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	2.473.434
		2	Jumlah Hari lama tinggal wisatawan	5





BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	PenanggungJawab
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah	Dinas Pendidikan dan K kebudayaan
		2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	meningkatkan kesetaraan gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Biro Organisasi
7	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	Persentase PAD terhadap Penerimaan Daerah	Badan Keuangan Daerah
8	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi
		2	Opini BPK	Badan Keuangan Daerah
		3	Nilai SAKIP	Biro Organisasi
		4	Indeks Profesionalisme Pegawai	Badan Kepegawaian Daerah
9	meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS	1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	Dinas Sosial
10	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat	1	Angka Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2	Angka Kriminalitas	
11	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1	Indeks Pembangunan Pemuda	Dinas Pemuda Olahraga
		2	Persentase Pemuda Mandiri	



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	PenanggungJawab
12	Meningkatnya prestasi olahraga provinsi kalsel	1	Jumlah Medali pada event olahraga tingkat nasional	Dinas Pemuda Olahraga
13	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kbeudayaan
14	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk pemerataan Pembangunan	1	Persentase Infrastruktur ke- PU an yang berkualitas	Dinas Pekerjaan UMum dan Penataan Ruang
		2	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	
		3	Persentase luasan kawasan permukiman dan perumahan dalam kondisi baik	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman
		4	Rasio Elektrifikasi	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	Dinas Perhubungan
15	Meningkatnya perekonomian daerah	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Biro Perekonomian
		2	Pengeluaran Perkapita	
16	Terwujudnya Mandiri Pangan	1	Skor pola pangan harapan (PPH)	DInas Ketahanan Pangan
17	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	1	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
19	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	Dinas Pariwisata
		2	Jumlah Hari lama tinggal wisatawan	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 merupakan Laporan Kinerja Tahun terakhir dari RPJMD-P 2016-2021. Laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran terhadap target yang ditetapkan pada

setiap misi dalam RPJMD-P, disertai penjelasan atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran dan perbandingan dengan realisasi tahun sebelumnya, realisasi regional, target nasional dan target SDGs. Untuk keutuhan informasi, pada laporan ini juga terlampir Penetapan Kinerja Tahun 2021 dan Pengukuran Kinerja 2021.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori sebagai berikut :



Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 90 %	Sangat Memuaskan
II	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
III	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
IV	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
V	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
VI	Kurang dari 50 %	Kurang

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:





Tabel 1 : Capaian Kinerja Makro Akhir Periode Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021			Sumber Data
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Peningkatan IPM	Indeks	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,0-71,8	71,28	100%	BPS
2	Angka Pengangguran	%	5,45	4,77	4,35	4,18	4,74	3.6 - 4	4,95	80,80%	BPS
3	Pertumbuhan ekonomi	%	4,40	5,28	5,08	4,09	-1,82	4,50-5,03	3,48	77,33%	BPS
4	Angka Kemiskinan	%	4,52	4,70	4,65	4,47	4,83	3.96 – 4.01	4,56	87,93%	BPS
5	Indeks GINI	Indeks	0,351	0,347	0,340	0,334	0,351	0,286	0,325	88,00%	BPS
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,07	69,38	68,78	68,38	68,43	64,00	71,03*	110,98%	DLH Prov. Kalsel
7	Tingkat pertumbuhan penduduk	%	1,65	1,59	1,53	1,47	1,59	1,59	0,9	176,66%	BPS
Rata-rata Capaian										103,10%	

Keterangan :

*Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup





**Tabel 2 : PERBANDINGAN PERJANJIAN KINERJA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021**

2020				2021			
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya Daya Saing Sumber daya Manusia	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Angka Harapan Lama Sekolah
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1	Indeks Refomrasi Birokrasi			2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah
3	Terwujudnya Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan Pemerintahan yang Akuntabel	1	Indeks Profesionalisme Pegawai	2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Angka Harapan Hidup (AHH)
4	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	1	Tingkat Kemiskinan	3	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	1	Tingkat Pengangguran Terbuka
		2	Angka Pengangguran	4	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
		3	Tingkat Pertumbuhan Penduduk	5	Meningkatnya Kesetaraan Gender	1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
5	Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh Wilayah dengan Tata Ruang	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi			2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
		2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Kepuasan Masyarakat
6	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	7	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	1	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah
		2	Indeks Gini	8	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	1	Indeks Reformasi Birokrasi
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			2	Opini BPK





2021			
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		3	Nilai SaKIP
		4	Indeks Profesionalisme Pegawai
9	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	1	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasar
10	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	1	Angka Konflik
		2	Angka Kriminalitas
11	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	1	Indeks Pembangunan Pemuda
		2	Persentase Pemuda Mandiri
12	Meningkatnya prestasi olahraga provinsi kalsel	1	Indeks Pembangunan Pemuda
13	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Kebudayaan
14	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan	1	Persentase Infrastruktur Ke-PU an yang berkualitas
		2	Persentase Kesuaian Tata Ruang
		3	Persentase luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan dalam Kondisi Baik
		4	Rasio Elektrifikasi
		5	Indeks Kepuasan Masyarakat Budang Transportasi





2021			
NO	KINERJA UTAMA	NO	INDIKATOR KINERJA UTANA
15	Meningkatnya perekonomian daerah	1	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel
16	Terwujudnya Mandiri Pangan	1	Skor pola pangan harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan
17	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	1	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)
18	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
19	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)
		2	Jumlah Hari lama tinggal wisatawan

Perjanjian Kinerja Ditahun 2020 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 sasaran dengan 11 indikator, setelah dilakukan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ada beberapa sasaran dan indkator yang diperbaharui dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Ada beberapa ssasaran yang sudah tidak relevan dengan kondisi di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Ada beberapa indikator yang sebelumnya tidak terukur.
3. Adanya ketidaksinkronan antara sasaran dengan indikator yang dituju.





Oleh karena itu ditahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melakukan langkah perbaikan serta penyempurnaan terhadap sasaran dan indikator kinerja Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga untuk tahun 2021 Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 19 sasaran dan 31 indikator. Adapun untuk capaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 : Capaian Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13,7	12,81	93,50%
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9	8,34	92,67%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	69,64	68,83	98,84%
3	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,6 - 4	4,95	80,80%
4	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	100	65,66	65,66%
5	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,00	88,61*	99,56%
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,78	74,48*	109,88%
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,63	85,92	102,73%
7	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah	51,87%	41,30%	79,62%
8	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	85,01	68,47*	80,54%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Nilai SaKIP	81,01	BB (78,49)*	96,88%
		Indeks Profesionalisme Pegawai	95	71,17	74,91%
9	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi Kebutuhan Dasar	45	33,50%	74,44%
10	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	Angka Konflik	0	0	100%
		Angka Kriminalitas	4344	5044	116,11%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
11	Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	53	50,67	95,60%
		Persentase Pemuda Mandiri	1,50	18,95%	1263,33%
12	Meningkatnya prestasi olahraga provinsi kalsel	Indeks Pembangunan Pemuda	50	50,67	101,34%
13	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	45	58,64	130,31%
14	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan	Persentase Infrastruktur Ke-PU an yang berkualitas	70,89	79,62%	112,31%
		Persentase Kesuainan Tata Ruang	82	79,75%*	97,25%
		Persentase luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan dalam Kondisi Baik	77,17	77,17%	100%
		Rasio Elektrifikasi	95,5	99,35%	104,03%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Budang Transportasi	81,25	77,50	95,38%
15	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel	4,50-5,03	3,48	77,33%
16	Terwujudnya Mandiri Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	84,50	79,68	94,29%
17	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	14,4	12,71	88,26%
18	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,00	71,03**	110,98%
19	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	2.473.434	2.790.898	112,83%
		Jumlah Hari lama tinggal wisatawan	5	3	60%

Keterangan: * Data tahun 2020

** Perhitungan Mandiri Dinas LH



**B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA****MAKRO****CAPAIAN ATAS KINERJA MAKRO**

Keberhasilan pencapaian Kinerja utama tahun 2021 diukur melalui 7 (tujuh) indikator makro yang tertuang dalam sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”, dengan rincian target dan realisasi indikator makro sebagaimana pada tabel 3 serta perbandingannya pada tabel 4.

Tabel 4 : Capaian Kinerja Makro Akhir Periode Tahun 2021
(BPS dan DLH Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Peningkatan IPM	Indeks	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,0-71,8	71,28	100%
2	Angka Pengangguran	%	5,45	4,77	4,35	4,18	4,74	3.6 - 4	4,95	80,80%
3	Pertumbuhan ekonomi	%	4,40	5,28	5,08	4,09	-1,82	4,50-5,03	3,48	77,33%
4	Angka Kemiskinan	%	4,52	4,70	4,65	4,47	4,83	3.96 - 4.01	4,56	87,93%
5	Indeks GINI	Indeks	0,351	0,347	0,340	0,334	0,351	0,286	0,325	88,00%
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,07	69,38	68,78	68,38	68,43	64,00	71,03*	110,98%
7	Tingkat pertumbuhan penduduk	%	1,81	1,77	1,74	1,71	1,13	1,59	0,9	176,66%
Rata-rata Capaian									103,10%	

Keterangan :

*Perhitungan Mandiri Dinas Lingkungan Hidup

Tabel 5 : Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG's
(Data BPS dan Data diolah dari IKLH Tahun 2020, Pusdatin KLHK)


No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Peningkatan IPM	71,28	71,25	67,90	76,88	71,19	-	72,29	-
2	Angka Pengangguran	4,95	4,53	5,82	6,83	4,58	-	6,49	-
3	Pertumbuhan ekonomi	3,48	3,40	4,78	2,48	3,98	-	3,69	-
4	Angka Kemiskinan	4,56	5,16	6,84	6,27	6,83	-	9,71	-
5	Indeks GINI	0,325	0,320	0,315	0,331	0,285	-	0,381	-





No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,43*	75,04*	72,59*	75,06*	80,85*	-	-	-
7	Tingkat pertumbuhan penduduk	0,9	-	-	-	-	-	-	-


Keterangan: * Data Tahun 2020

Perbandingan Realisasi dengan Target

 Pencapaian indikator **Indeks Pembangunan Manusia** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 71,28 dari target sebesar 71,0-71,8, sehingga persentase capaian IPM pada tahun 2021 sebesar 100%.

 Pencapaian indikator **Angka Pengangguran** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 4,95 dari target 3,6 – 4. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Angka Pengangguran yaitu sebesar 80,80%.

 Pencapaian indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi** Prov. Kalsel tahun 2021 terealisasi sebesar 3,48% dari target 4,50-5,03% sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel pada tahun 2021 sebesar 77,33%.

 Pencapaian indikator **Angka Kemiskinan** Provinsi Kalimantan Selatan per Maret tahun 2021 terealisasi sebesar 4,56 dari target 3,96-4,01. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Angka Kemiskinan yaitu sebesar **87,93%**.





Pencapaian indikator **Indeks GINI** Provinsi Kalimantan Selatan per September tahun 2021 terealisasi sebesar 0,325 dari target 0,286. Indikator ini merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada indikator Indeks GINI yaitu sebesar **88,00%**.



Pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 71,03 dari target 64,00, sehingga persentase capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar 110,98%. Angka tersebut masih perhitungan sementara dikarenakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dikeluarkan.



Pencapaian indikator **Tingkat Pertumbuhan Penduduk** Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 0,9 dari target 1,59 sehingga persentase capaian Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 176,66%.

Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi

Peningkatan IPM

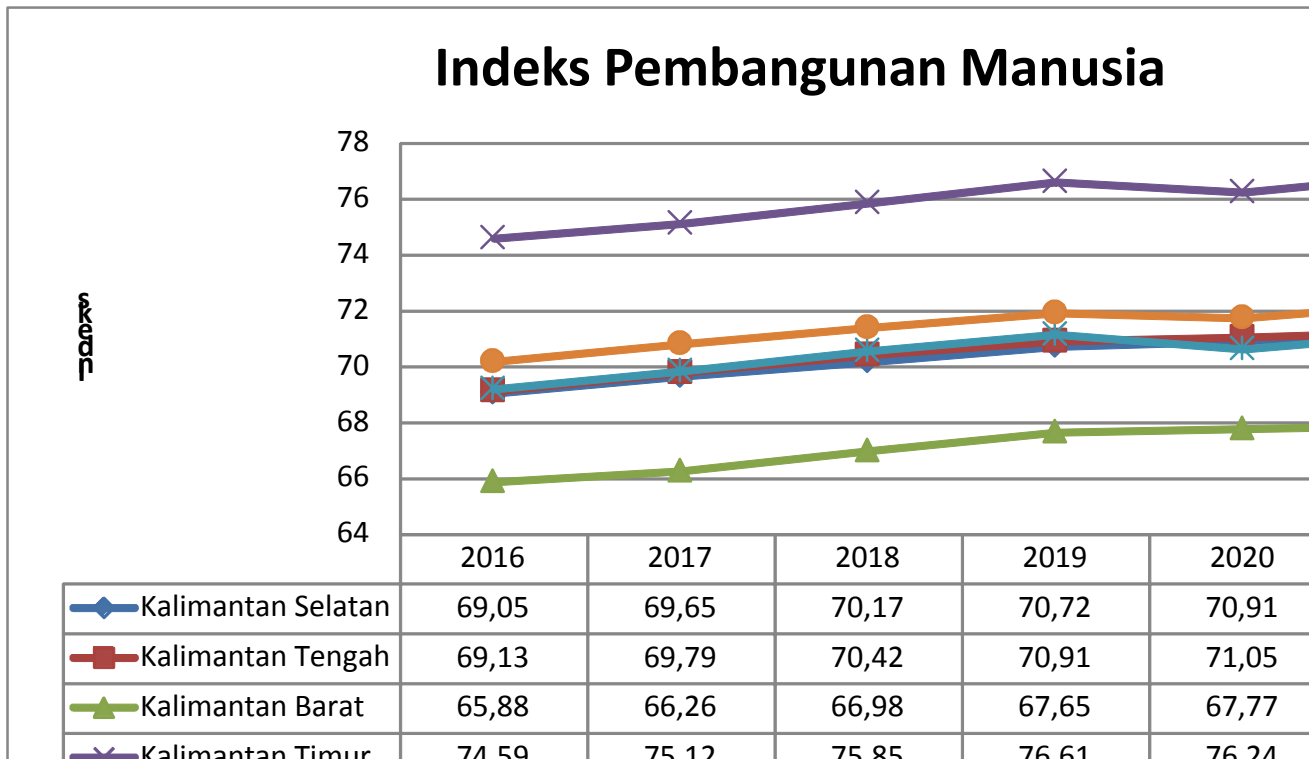
Indeks Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 terealisasi sebesar 71,28. Jika dilihat dari data tahun 2016-2021. Indeks Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan. Pada tahun 2021, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 71,28. Angka ini meningkat sebesar 0,37 poin dibandingkan dengan IPM Kalimantan Selatan pada tahun 2020 yang sebesar 70,91. Nilai tersebut menyatakan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Selatan telah berstatus “tinggi”, karena nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan sudah diatas 70.





Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini :

Grafik 1 : Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan



Tabel 6 : Komponen Indeks Pembangunan Manusia se-Kalimantan

Provinsi	AHH (Tahun)	HLS (Tahun)	RLS (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	IPM
Kalimantan Selatan	68,83	12,81	8,34	12.143	71,28
Kalimantan Tengah	69,79	12,74	8,64	11.182	71,25
Kalimantan Barat	70,776	12,65	7,45	8.974	67,90
Kalimantan Timur	74,61	13,81	9,84	12.116	76,88
Kalimantan Utara	72,65	12,94	9,11	9.075	71,19
Indonesia	71,57	13,08	8,54	11.156	72,29

Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa posisi IPM Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 berada pada peringkat ke-2 di bawah Kalimantan Timur, Sedangkan apabila dibandingkan dengan IPM Indonesia, maka posisi Kalimantan Selatan masih berada di bawah IPM Indonesia.

Berdasarkan peningkatan nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang terus menerus mengalami peningkatan menggambarkan bagaimana keberhasilan yang diraih dalam meningkatkan pembangunan manusia oleh Pemerintah.



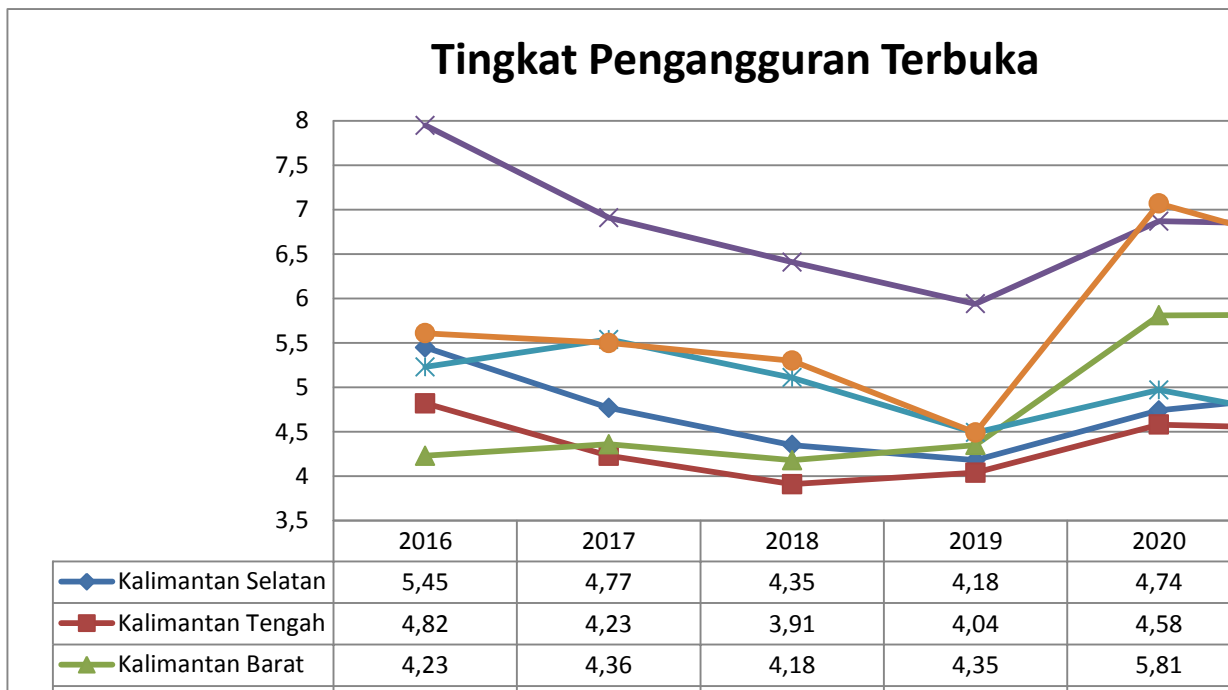
Angka Pengangguran

Pada bulan Agustus 2021, jumlah angkatan kerja mencapai 2.219.395 juta orang. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 32,428 ribu orang dibanding keadaan Agustus 2020 sebesar 2.186.967 juta orang. Pada periode Agustus 2021 jumlah pengangguran sebesar 109.968 ribu orang terdapat penambahan jumlah pengangguran sebanyak 6.320 ribu orang yang sebelumnya sebesar 103.648 ditahun 2020.

Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2021 adalah 4,95 persen. Indikator ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen dibandingkan keadaan Agustus 2020 sebesar 4,74 persen.

Perkembangan Indikator Angka Pengangguran Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 2 : Angka Pengangguran



Angka Pengangguran Kalimantan Selatan apabila dibandingkan dengan Provinsi di Kalimantan lainnya merupakan terendah ke-3 setelah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Angka Pengangguran Terbuka seluruh Provinsi di regional Kalimantan masih di bawah Angka Pengangguran Terbuka Nasional, kecuali Provinsi Kalimantan Timur.

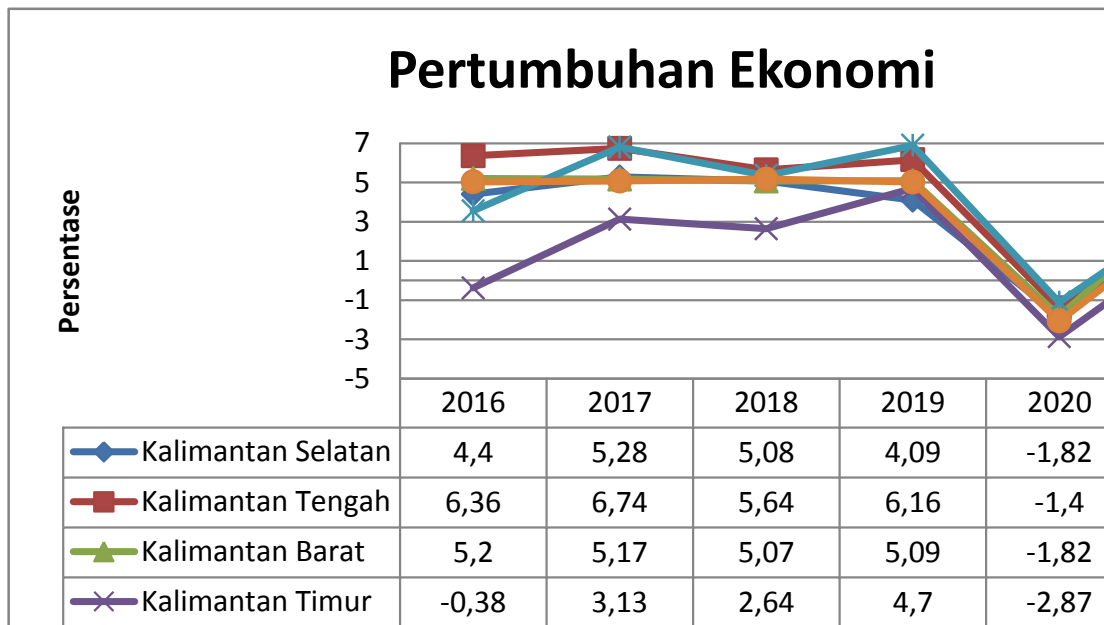


Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 3,48% ditahun 2021 dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,82%.

Perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 3 : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan



Pada tingkat regional, Pertumbuhan Ekonomi semuanya mulai membaik sejak terjadinya pandemi covid-19 selama tahun 2020. Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat disusul Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

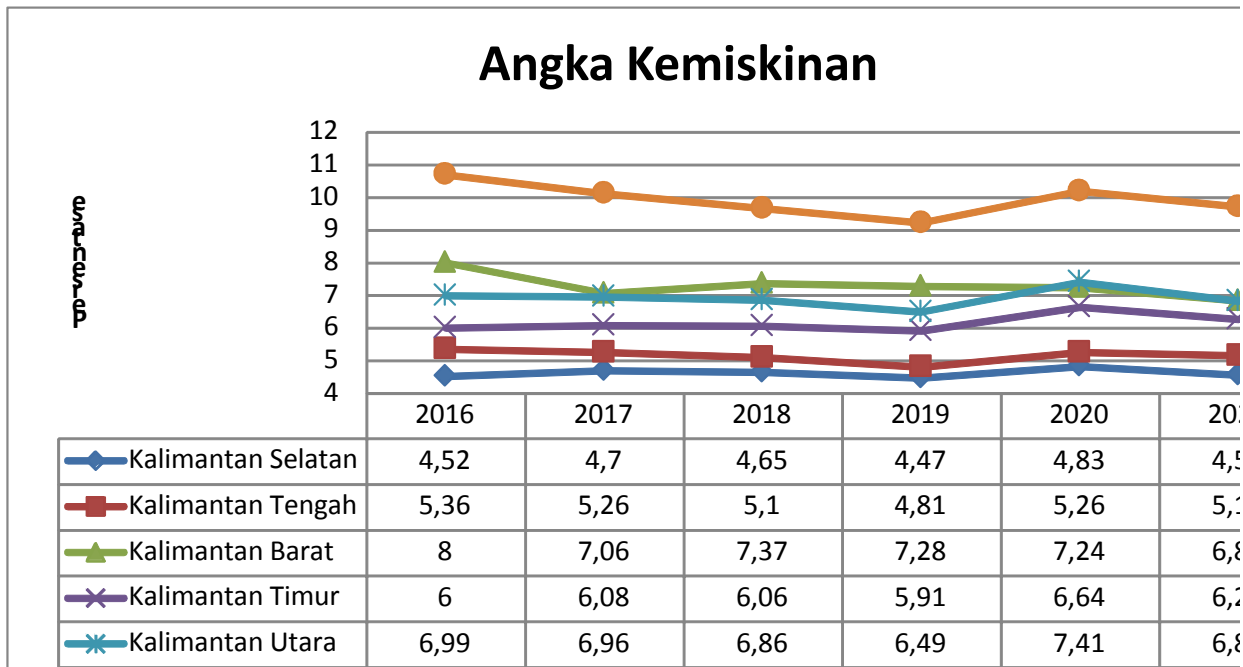
Angka Kemiskinan

Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan sebesar 197,76 ribu orang yang setara dengan 4,56% dari total penduduk Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 9,16 ribu orang dari kondisi September 2020 sebesar 206,92 ribu orang yang setara dengan 4,83%. Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 merupakan Provinsi dengan angka Kemiskinan terendah dipulau Kalimantan bahkan yang terendah di Indonesia.



Perbandingan Angka Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 4 : Angka Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021



Berdasarkan grafik diatas angka kemiskinan provinsi di Pulau Kalimantan pada periode yang sama Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi dengan Angka Kemiskinan tertinggi diregional Kalimantan.



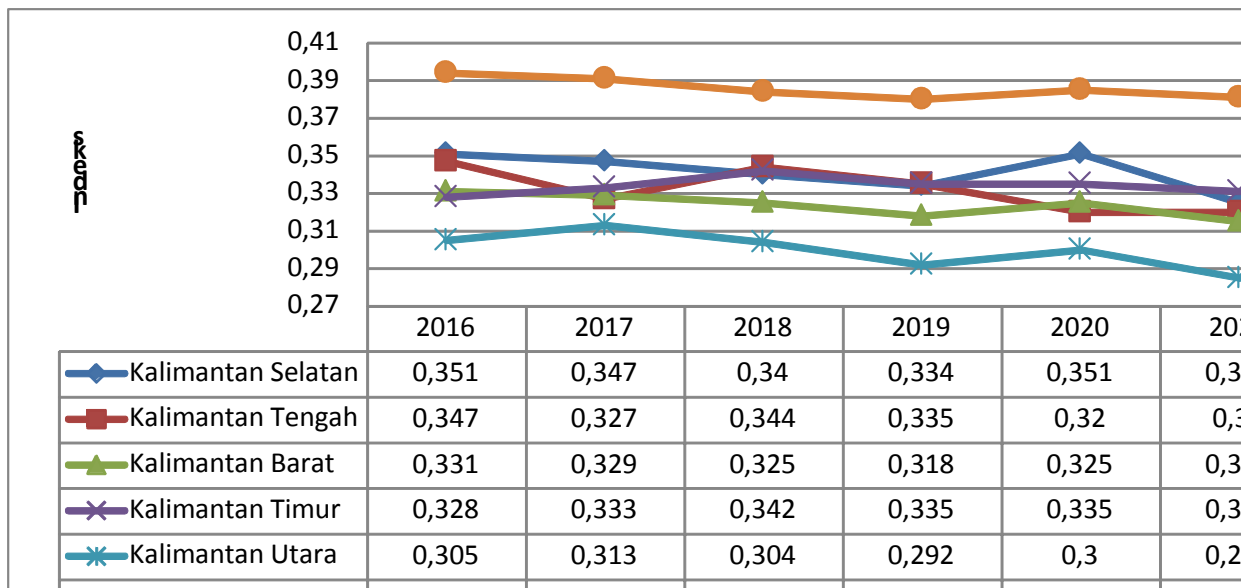
Indeks GINI/*GINI Ratio* merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0–1, dengan arti semakin mendekati 1 ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada kondisi bulan September 2021 mencapai 0,325. Angka ini menurun sebesar 0,026 dibandingkan kondisi bulan September tahun 2020 sebesar 0,351.

Perkembangan Indikator Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:





Grafik 5 : Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021



Berdasarkan grafik diatas pada September 2021, *Gini Ratio* seluruh provinsi di Pulau Kalimantan berada di bawah rata-rata *Gini Ratio* Indonesia yang sebesar 0,381. *Gini Ratio* relatif menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antar provinsi di regional Kalimantan. *Gini Ratio* terendah tercatat di Kalimantan Utara yaitu sebesar 0,285 dan yang tertinggi tercatat di Kalimantan Timur dengan *Gini Ratio* sebesar 0,331.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

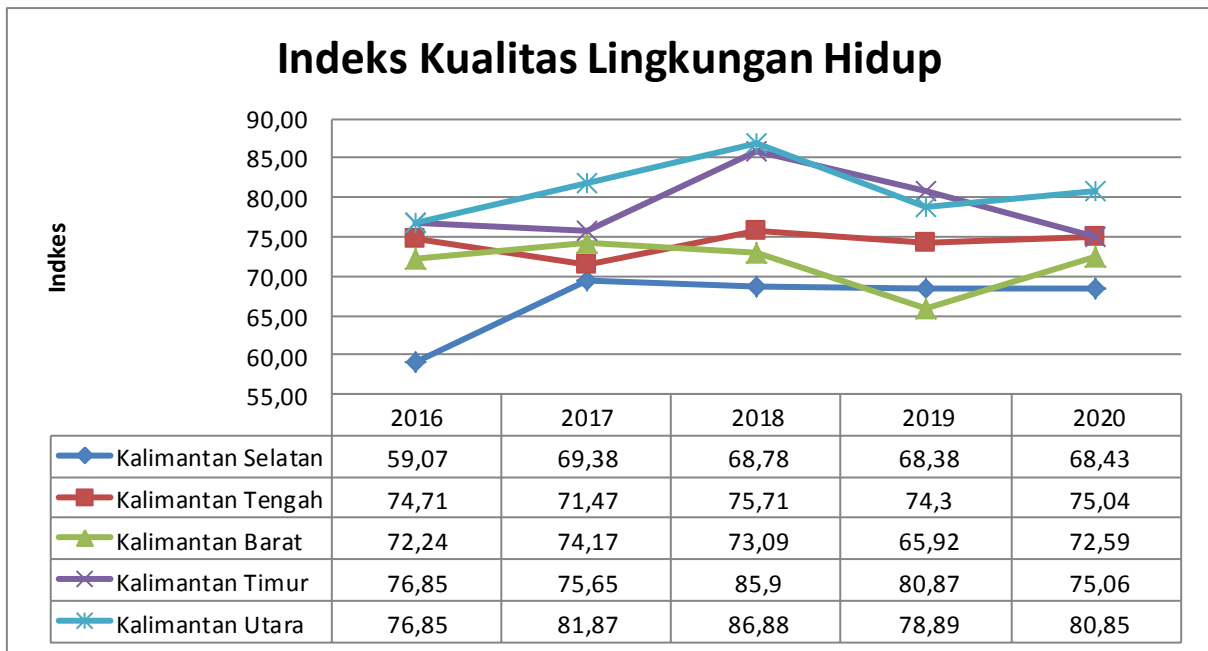
Dari perhitungan sementara yang dilakukan, IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 mencapai 71,03, dan jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,60 Point dimana pada tahun 2020 IKLH Kalimantan Selatan mencapai 68,43.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Pusdatin KLHK, IKLH Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 masih menjadi Provinsi dengan nilai IKLH terendah di antara Provinsi di pulau Kalimantan. Dengan nilai 68,43, Kalimantan Selatan berada di urutan terbawah, dan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan nilai IKLH paling tinggi, disusul dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.



Perkembangan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 6: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2020

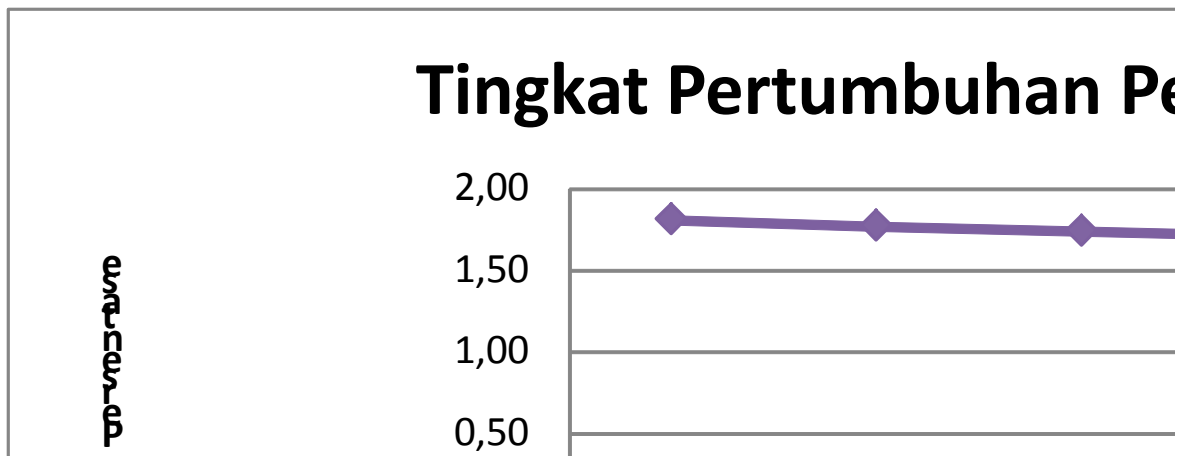


Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 0,9%, berhasil menekan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,23% dari capaian pada tahun 2020 yang berada pada 1,13%.

Perkembangan Indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 7: Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021





Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Peningkatan IPM

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan selalu meningkat setiap tahunnya. Sejak tahun 2016 sampai tahun 2021 sudah terjadi peningkatan sebesar 2,23 poin dari 69,05 (2016) menjadi 71,28 (2021). Setelah mengalami perlambatan pada 2020 karena pandemi Covid-19, peningkatan IPM Kalimantan Selatan sudah kembali membaik pada 2021 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator konsumsi riil per kapita (yang disesuaikan). Pada tahun 2021 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan mencapai mencapai 71,28 meningkat 0,37 poin atau 0,52 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya 70,91 (2020).

Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 0,92 persen.

Tabel 7 : Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen, 2016-2021

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AHH (Tahun)	67,92	68,02	68,23	68,49	68,66	68,83
HLS (Tahun)	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68	12,81
RLS (Tahun)	7,89	7,99	8,00	8,20	8,29	8,34
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah)	11 307	11 600	12 062	12 253	12 032	12.143
IPM	69,05	69,65	70,17	70,72	70,91	71,28



Angka Pengangguran

Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,21 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4,74 menjadi 4,95 tahun 2021.

Peningkatan Angka Pengangguran ini disebabkan masih adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya masalah kesehatan saja yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS periode antara periode bulan Agustus 2020 - Agustus 2021 terdapat penambahan jumlah pengangguran sebanyak 6.320 ribu orang dari sebelumnya sekitar 103.648 ribu orang menjadi 109.968 ribu orang di periode Agustus 2021. Sedangkan untuk jumlah penduduk angkatan kerja periode bulan Agustus 2020 – Agustus 2021 terdapat penambahan sebanyak 32.428 ribu orang yang sebelumnya sekitar 2.186.967 juta orang menjadi 2.219.395 juta orang di periode Agustus 2021.

Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,48 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,89 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,22 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 6,23 persen. Adapun lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Jasa Lainnya sebesar 1,16 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,16 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,19 persen. Sedangkan jika dilihat dari komponen pengeluaran, hampir semua komponen pengeluaran tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 19,02 persen diikuti oleh Komponen PK-P sebesar 3,56 persen, Komponen PK-LNPRT sebesar 1,10 persen; Komponen PMTB sebesar 0,83 persen; dan Komponen PKRT sebesar 0,79 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 21,01 persen.



Angka Kemiskinan

Pada September 2021, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan sebesar 197,76 ribu orang yang setara dengan 4,56% dari total penduduk Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 9,16 ribu orang dari kondisi September 2020 sebesar 206,92 ribu orang yang setara dengan 4,83%. Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 merupakan Provinsi dengan angka Kemiskinan terendah dipulau Kalimantan bahkan yang terendah di Indonesia.

Jika dilihat berdasarkan tempat tinggal pada periode Maret 2021 – September 2021, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan mengalami penurunan 0,77 ribu orang sedangkan di daerah perdesaan juga mengalami penurunan sebanyak 9,58 ribu orang. Pada September 2021, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan dan perdesaan secara berturut-turut sebesar 3,81 persen dan 5,28 persen.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2021–September 2021 antara lain adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi membaik, ditandai dengan ekonomi Kalimantan Selatan triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 9,32 persen. Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 terhadap triwulan I-2020 yang hanya tumbuh sebesar 2,99 persen. Sementara ekonomi triwulan III-2021 terhadap triwulan III-2020 juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,82 persen (y-on-y). Angka ini jauh meningkat dibanding capaian triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 yang berkontraksi sebesar 4,93 persen (y-on-y).
2. Pertumbuhan Lapangan Usaha Dominan pada PDRB Meningkat. Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang merupakan salah satu lapangan usaha dominan di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 46,97 persen (triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021). Sementara lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian yang merupakan penyumbang terbesar share terhadap PDRB Kalimantan Selatan juga tumbuh sebesar 9,14 persen (triwulan III-2021 terhadap triwulan I-2021).
3. Selama periode Maret 2021-September 2021, angka inflasi umum tercatat sebesar 0,36 persen. Sementara pada periode September 2020 - September 2021, tercatat inflasi sebesar 2,52 persen.



4. Nilai Tukar Petani (NTP) di atas 100 yang menunjukkan harga yang diterima petani lebih besar daripada yang dibayarkan petani. NTP September 2021 sebesar 107,89, sedikit lebih rendah dibanding NTP Maret 2021 yang sebesar 107,97.
5. Pertumbuhan Produksi Padi Meningkat. Selama periode Maret - September 2021, produksi padi di Kalimantan Selatan meningkat sebesar 211,67 persen (hasil KSA).

Indeks GINI

Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pengeluaran penduduk adalah *Gini Ratio*. *Gini Ratio* didasarkan pada *Kurva Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *Uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai *Gini Ratio* berkisar antara 0-1. Semakin besar nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi.

Pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur dengan *Gini Ratio* adalah sebesar 0,325. Angka ini turun 0,005 poin jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 0,330. Sementara itu, jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* September 2020 yang sebesar 0,351 terjadi penurunan sebesar 0,026 poin. Ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori rendah. Penurunan ketimpangan selama periode September 2020 – September 2021 di Kalimantan Selatan yang mengindikasikan dampak pandemi Covid-19 sudah berkurang dan perekonomian masyarakat 40 persen terbawah sudah mulai berangsur membaik. Beberapa kebijakan *lockdown*/pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang menghambat aktivitas ekonomi mereka sudah mulai ditiadakan sehingga memberikan efek positif bagi kemudahan mereka dalam memperoleh penghasilan

Hal ini ditunjukkan oleh persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah yang sebesar 20,86 persen. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk di perdesaan lebih baik dari pada tingkat ketimpangan penduduk di daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari persentase distribusi pengeluaran penduduk kelompok 40 persen terbawah di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan, 23,67 persen berbanding 19,67 persen.





Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasarkan perhitungan sementara indeks Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan berada pada angka 71,03 dengan kategori baik. Angka ini didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\ &= (0,340 \times 54,75) + (0,428 \times 89,15) + (0,133 \times 50,26) + (0,099 \times 76,45) \\ &= \mathbf{71,03} \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai indeks sementara diatas nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 2,60 poin dibanding tahun 2020 yaitu 68,43 menjadi 71,03. ditahun 2021. Nilai IKLH ini masih nilai sementara karena masih dalam proses pengumpulan data-data dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan refresentatif.

Angka ini didapat dari 4 komponen perhitungan IKLH yaitu *pertama*, Indeks Kualitas Air sebesar 54,75, *kedua* Indeks Kualitas Udara sebesar 89,15, *ketiga* Indeks Kualitas Lahan sebesar 50,26 dan yang *ke empat* Indeks Kualitas Air laut sebesar 76,45.

Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami penurunan positif secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir.

Dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan, pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana yang ditujukan pada program pembangunan keluarga (KKBPK) diharapkan dapat menekan tingginya usia perkawinan dini (usia ≤ 21 tahun) di Kalimantan Selatan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan (usia ≥ 21 tahun).



MISI I

MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk “Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi masyarakat (daya beli). Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,0-71,8	71,28	100,39%

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan lima sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”; **sasaran ketiga** adalah “Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja”; **sasaran keempat** adalah “Meningkatnya pemahaman keagamaan”; dan **sasaran kelima** adalah “Meningkatnya Kesetaraan Gender”.

1.1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2021 atas sasaran ” Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat” diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:



Tabel 9: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (data BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Harapan Lama Sekolah	%	12,29	12,46	12,50	12,52	12,68	13,70	12,81	93,50%
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	%	7,89	7,99	8,00	8,20	8,29	9,00	8,34	92,67%
Rata-rata Capaian										

Tabel 10: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Angka Harapan Lama Sekolah	12,81	12,74	12,65	13,81	12,94	13,6	13,08	-
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,34	8,64	7,45	9,84	9,11	8,85	8,54	-

Rumus Perhitungan:

- Angka Harapan Lama Sekolah

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

dimana:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i = Usia (a, a + 1, ..., n)

FK = Faktor koreksi pesantren

- Angka Rata-Rata Lama Sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Pencapaian indikator Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 12,81 dari target 13,70 sehingga persentase capaian Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2021 sebesar 93,50%.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

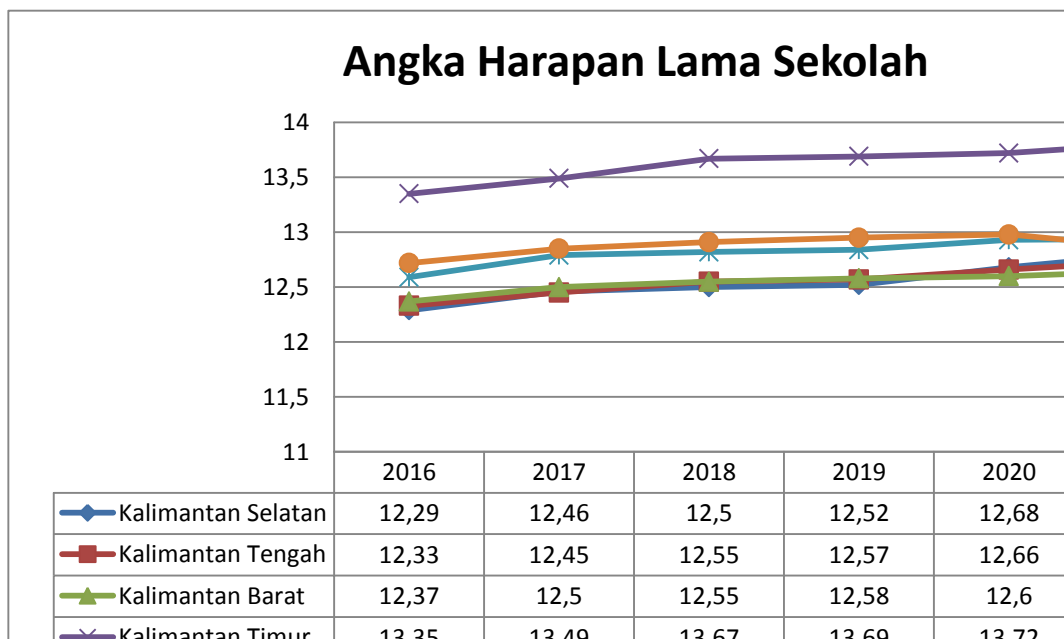
Pencapaian indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 8,34 dari target 9,00 sehingga persentase capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2021 sebesar 92,67%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Capaian indikator ini ditahun 2021 meningkat sebesar 0.13 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2020, meningkat dari 12,68 menjadi 12,81 ditahun 2021.

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi se Kalimantan dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik 8 sebagai berikut:



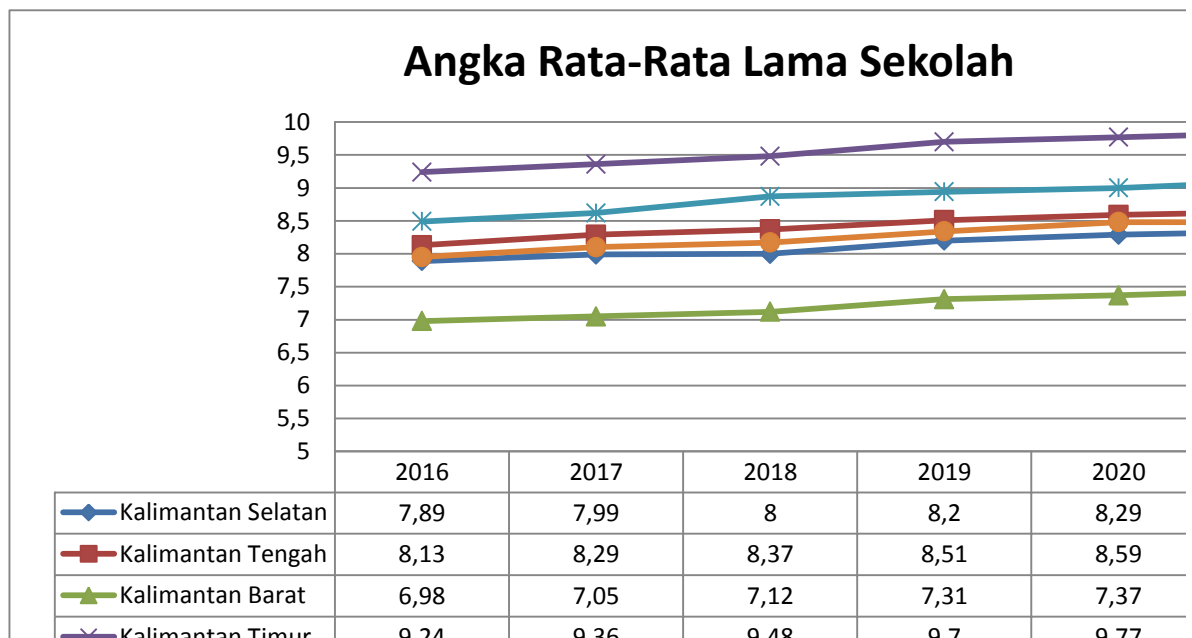


Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 berada pada posisi ke 3 di dibandingkan dengan provinsi yang berada di Pulau Kalimantan yaitu dibawah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan masih di atas Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian kinerja indikator ini ditahun 2021 meningkat sebesar 0,05 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2020, meningkat dari 8,29 menjadi 8,34 ditahun 2021.

Perkembangan Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi se Kalimantan dari tahun 2016-2021 dapat dilihat pada grafik 9 sebagai berikut:



Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 berada pada posisi ke 4 di dibandingkan dengan provinsi yang berada di Pulau Kalimantan yaitu dibawah Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah dan masih di atas Provinsi Kalimantan Barat.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Angka Harapan Lama Sekolah

Jika dilihat dari tren perkembangannya, Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya



menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk sekolah ke jenjang yang lebih tinggi semakin meningkat. Pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 12,81 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau hingga pendidikan tinggi setara Diploma 1. Jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 yang sebesar 12,68, maka Angka Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,13 point walaupun peningkatannya terbilang kecil tidak berarti bahwa proses pembangunan dibidang pendidikan yang telah dilakukan tidak mengalami kemajuan. Hal ini terjadi karena pendidikan merupakan sebuah proses yang panjang dan hasilnya pun tidak dapat dilihat atau dirasakan secara instan.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah diantaranya melalui:

- Pemberian Beasiswa Fakultas Kedokteran bagi Peserta Didik tidak mampu dengan output sebanyak 30 Mahasiswa dan dianggarkan sebesar Rp. 3.978.325.000.
- Pemberian BOSDA ke SMA Negeri dengan output sebanyak 59830 Siswa dan dianggarkan sebesar Rp. 33.341.907.000.
- Pemberian Perlengkapan Sekolah untuk Peserta Didik yang tidak mampu SMA dengan output sebanyak 5.590 Siswa dan dianggarkan sebesar Rp. 3.354.467.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA dengan output sebanyak 10 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 3.102.500.000.
- Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA dengan output sebanyak 8 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 2.204.400.000.
- Pembangunan Infrastruktur SMA dengan output sebanyak 39 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 8.514.140.000.
- Pembangunan Laboratorium SMA dengan output sebanyak 3 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 720.000.000.
- Pembangunan Musholla SMA dengan output sebanyak 6 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.



- Pembangunan Ruang Kantor SMA dengan output sebanyak 1 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 4.839.966.842.
- Pembangunan Kantin Sekolah SMA dengan output sebanyak 4 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 886.145.000.
- Pembangunan Jamban SMA dengan output sebanyak 2 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 45.9790.000.
- Pengadaan Peralatan Komputer SMA dengan output sebanyak 14 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.308.979.400.
- Pengadaan Meubelair SMA dengan output sebanyak 27 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.541.840.000.
- Pengadaan Tablet SMA dengan output sebanyak 100 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 207.750.000.
- Pengadaan Peralatan Buku SMA dengan output sebanyak 26 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.652.750.000.
- Pengadaan Alat Kesenian SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 780.000.000.
- Pengadaan Peralatan Keterampilan SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 823.800.000.
- Pengadaan Alat Olahraga Sekolah SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 801.900.000.
- Pemberian Dana BOS ke SMA dengan output sebanyak 59634 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 122.491.500.000.
- Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 2.183.696.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dengan output sebanyak 28 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 6.571.528.400.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA dengan output sebanyak 5 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.729.500.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA dengan output sebanyak 1 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 356.200.000.
- Pembangunan Toilet / Jamban SMA dengan output sebanyak 16 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 3.894.154.000.



- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMA dengan output sebanyak 8 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.946.654.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMA dengan output sebanyak 7 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.685.050.000.
- Pembangunan Ruang Guru SMA dengan output sebanyak 4 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.850.578.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SMA dengan output sebanyak 1 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000.000.
- Pengadaan Media Pendidikan SMA dengan output sebanyak 4 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMA dengan output sebanyak 3 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000.
- Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMA dengan output sebanyak 3 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000.
- Pengadaan Meubelair SMA dengan output sebanyak 64 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1420.000.000.
- Pemberian BOSDA ke SMK Negeri dengan output sebanyak 43.940 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 4.3940.000.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dengan output sebanyak 6 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium SMK dengan output sebanyak 6 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.
- Pembangunan Musholla SMK dengan output sebanyak 3 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 720.000.000.
- Pembangunan Perpustakaan SMK dengan output sebanyak 2 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 480.000.000.
- Rehabilitasi Bangunan SMK dengan output sebanyak 9 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.890.000.000.
- Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK dengan output sebanyak 2 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.770.000.000.



- Pengadaan Peralatan Komputer SMK dengan output sebanyak 7 Set dan dianggarkan sebesar Rp. 745.650.000.
- Pengadaan Meubeler SMK dengan output sebanyak 13 Set dan dianggarkan sebesar Rp. 570.000.000.
- Pengadaan Peralatan Praktikum SMK dengan output sebanyak 11 Set dan dianggarkan sebesar Rp. 877.450.000.
- Pengadaan Buku Literasi SMK dengan output sebanyak 63 set dan dianggarkan sebesar Rp. 441.000.000.
- Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK dengan output sebanyak 19 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 21.309.279.200.
- Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK dengan output sebanyak 20 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 30.851.925.250.
- Pemberian Dana BOS ke SMK dengan output sebanyak 43.645 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 71.200.320.000.
- dengan output sebanyak dan dianggarkan sebesar Rp.
- Pemberian BOP ke SLB dengan output sebanyak 2410 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 260.000.000.
- Peningkatan Sarana Infrastruktur SLB dengan output sebanyak 9 Paket, 9 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 1.553.000.000.
- Ruang Kelas Baru (RKB) SLB dengan output sebanyak 3 Unit, 3 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 510.000.000.
- Ruang Pusat Sumber (Assesment) SMAN 2 Martapura Inklusi dengan output sebanyak 1 Unit, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000.
- Ruang Perpustakaan SLBN 2 Amuntai dengan output sebanyak 1 Unit, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000.
- Rehab Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 1 Unit, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000.
- Pembangunan Tempat Ibadah dengan output sebanyak 3 Unit, 3 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 570.000.000.
- Pembangunan Pengadaan Meubelair Ruang Assement Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 4 Paket, 4 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000.



- Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 7 Paket, 8 sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 510.000.000.
- Perlengkapan Pelaksanaan Ibadah Musholla Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 6 Paket, 6 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 243.000.000.
- Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 1 Paket, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000.
- Pengadaan Meubelair Kantor Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 1 Paket, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.
- Pengadaan Peralatan Pencegahan Covid-19 SLB dengan output sebanyak 26 sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 980.000.000.
- Pengadaan Alat Penunjang Keterampilan Siswa dengan output sebanyak 20 Paket, 20 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000.
- Pengadaan Peralatan Praktikum Life Skill Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 18 Paket, 18 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 1.620.000.000.
- Pengadaan Buku Mapel Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 20 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000.
- Bantuan Bahan Belajar Siswa SLB dengan output sebanyak 2231 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 3.676.200.000.
- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya dengan output sebanyak 7 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 579.780.000.
- Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya dengan output sebanyak 2 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 257.324.500.
- Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya dengan output sebanyak 1 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 117.984.000.





- Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya dengan output sebanyak 2 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 140.160.000.
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya dengan output sebanyak 3 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 353.312.000.
- Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru baik beserta sanitasinya dengan output sebanyak 5 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 717.714.000.
- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya dengan output sebanyak 3 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 299.620.000.
- Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya dengan output sebanyak 3 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 365.256.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan dengan output sebanyak 6 Paket, 6 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 342.342.000.
- Pengadaan Media Pendidikan dengan output sebanyak 5 Paket, 5 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 576.317.500.
- Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dengan output sebanyak 6 Paket, 6 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 362.406.000.
- Pengadaan Peralatan Seni Budaya dengan output sebanyak 5 Paket, 5 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 137.417.500.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dengan output sebanyak 7 Paket, 7 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 171.350.500.
- Pemberian Dana BOS ke SLB dengan output sebanyak 2410 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 4.430.000.000.

Hambatan dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah adalah

- Budaya Masyarakat yang masih banyak melakukan pernikahan dini.
- Mindset Masyarakat bahwa bekerja membantu orang tua lebih menguntungkan karena mendapatkan uang.
- Kesejahteraan Keluarga/faktor ekonomi masyarakat masih relatif rendah.
- Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah. Dimana keberadaan mereka tidak bisa



dimasukkan dalam Pendataan Pendidikan (Dapodik) karena tidak memiliki NISN.

- Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus (dianggap sebagai aib keluarga).

Rencana tindaklanjut untuk meningkatkan pencapaian ini adalah dengan:

- Melakukan Sosialisasi Program Wajib Belajar 12 tahun.
- Pemberian Bantuan Operasional Sekolah.
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan secara efektif dan maksimal.
- Optimalisasi penerapan SMA Terbuka.
- Optimalisasi Pendidikan Penyetaraan Paket C.
- Optimalisasi Pembangunan Fasilitas Pendidikan di daerah 3T

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Selatan jika dilihat dari tren perkembangan sampai dengan tahun 2021 ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kalimantan Selatan yang lebih baik. Pada tahun 2021 ini Angka Rata-Rata Lama Sekolah mengalami peningkatan sebesar 0,05 point sebesar 8,29 ditahun 2020 menjadi 8,34 ditahun 2021.

Adapun upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah diantaranya:

- Pemberian Beasiswa Fakultas Kedokteran bagi Peserta Didik tidak mampu dengan output sebanyak 30 Mahasiswa dan dianggarkan sebesar Rp. 3.978.325.000.
- Pemberian BOSDA ke SMA Negeri dengan output sebanyak 59830 Siswa dan dianggarkan sebesar Rp. 33.341.907.000.
- Pemberian Perlengkapan Sekolah untuk Peserta Didik yang tidak mampu SMA dengan output sebanyak 5.590 Siswa dan dianggarkan sebesar Rp. 3.354.467.000.



- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA dengan output sebanyak 10 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 3.102.500.000.
- Rehabilitasi Gedung Sekolah SMA dengan output sebanyak 8 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 2.204.400.000.
- Pembangunan Infrastruktur SMA dengan output sebanyak 39 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 8.514.140.000.
- Pembangunan Laboratorium SMA dengan output sebanyak 3 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 720.000.000.
- Pembangunan Musholla SMA dengan output sebanyak 6 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.
- Pembangunan Ruang Kantor SMA dengan output sebanyak 1 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 4.839.966.842.
- Pembangunan Kantin Sekolah SMA dengan output sebanyak 4 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 886.145.000.
- Pembangunan Jamban SMA dengan output sebanyak 2 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 45.9790.000.
- Pengadaan Peralatan Komputer SMA dengan output sebanyak 14 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.308.979.400.
- Pengadaan Meubelair SMA dengan output sebanyak 27 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.541.840.000.
- Pengadaan Tablet SMA dengan output sebanyak 100 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 207.750.000.
- Pengadaan Peralatan Buku SMA dengan output sebanyak 26 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.652.750.000.
- Pengadaan Alat Kesenian SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 780.000.000.
- Pengadaan Peralatan Keterampilan SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 823.800.000.
- Pengadaan Alat Olahraga Sekolah SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 801.900.000.



- Pemberian Dana BOS ke SMA dengan output sebanyak 59634 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 122.491.500.000.
- Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 2.183.696.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA dengan output sebanyak 28 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 6.571.528.400.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika SMA dengan output sebanyak 5 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.729.500.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi SMA dengan output sebanyak 1 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 356.200.000.
- Pembangunan Toilet / Jamban SMA dengan output sebanyak 16 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 3.894.154.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer SMA dengan output sebanyak 8 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.946.654.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa SMA dengan output sebanyak 7 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.685.050.000.
- Pembangunan Ruang Guru SMA dengan output sebanyak 4 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.850.578.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA SMA dengan output sebanyak 1 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK SMA dengan output sebanyak 13 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 2.600.000.000.
- Pengadaan Media Pendidikan SMA dengan output sebanyak 4 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) SMA dengan output sebanyak 3 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 180.000.000.
- Pengadaan Alat Kesenian Tradisional SMA dengan output sebanyak 3 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 270.000.000.





- Pengadaan Meubelair SMA dengan output sebanyak 64 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 1.420.000.000.
- Pemberian BOSDA ke SMK Negeri dengan output sebanyak 43.940 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 4.3940.000.000.
- Pembangunan Ruang Kelas Baru SMK dengan output sebanyak 6 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.
- Pembangunan Ruang Laboratorium SMK dengan output sebanyak 6 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.440.000.000.
- Pembangunan Musholla SMK dengan output sebanyak 3 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 720.000.000.
- Pembangunan Perpustakaan SMK dengan output sebanyak 2 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 480.000.000.
- Rehabilitasi Bangunan SMK dengan output sebanyak 9 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.890.000.000.
- Pembangunan Unit Sekolah Baru SMK dengan output sebanyak 2 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 1.770.000.000.
- Pengadaan Peralatan Komputer SMK dengan output sebanyak 7 Set dan dianggarkan sebesar Rp. 745.650.000.
- Pengadaan Meubeler SMK dengan output sebanyak 13 Set dan dianggarkan sebesar Rp. 570.000.000.
- Pengadaan Peralatan Praktikum SMK dengan output sebanyak 11 Set dan dianggarkan sebesar Rp. 877.450.000.
- Pengadaan Buku Literasi SMK dengan output sebanyak 63 set dan dianggarkan sebesar Rp. 441.000.000.
- Pembangunan Ruang Praktek Siswa SMK dengan output sebanyak 19 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 21.309.279.200.
- Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK dengan output sebanyak 20 Paket dan dianggarkan sebesar Rp. 30.851.925.250.
- Pemberian Dana BOS ke SMK dengan output sebanyak 43.645 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 71.200.320.000.



- dengan output sebanyak dan dianggarkan sebesar Rp.
- Pemberian BOP ke SLB dengan output sebanyak 2410 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 260.000.000.
- Peningkatan Sarana Infrastruktur SLB dengan output sebanyak 9 Paket, 9 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 1.553.000.000.
- Ruang Kelas Baru (RKB) SLB dengan output sebanyak 3 Unit, 3 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 510.000.000.
- Ruang Pusat Sumber (Assesment) SMAN 2 Martapura Inklusi dengan output sebanyak 1 Unit, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000.
- Ruang Perpustakaan SLBN 2 Amuntai dengan output sebanyak 1 Unit, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000.
- Rehab Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 1 Unit, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 170.000.000.
- Pembangunan Tempat Ibadah dengan output sebanyak 3 Unit, 3 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 570.000.000.
- Pembangunan Pengadaan Meubelair Ruang Assesment Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 4 Paket, 4 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 200.000.000.
- Pengadaan Meubelair Ruang Kelas Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 7 Paket, 8 sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 510.000.000.
- Perlengkapan Pelaksanaan Ibadah Musholla Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 6 Paket, 6 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 243.000.000.
- Pengadaan Meubelair Ruang Perpustakaan Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 1 Paket, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000.





- Pengadaan Meubelair Kantor Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 1 Paket, 1 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000.
- Pengadaan Peralatan Pencegahan Covid-19 SLB dengan output sebanyak 26 sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 980.000.000.
- Pengadaan Alat Penunjang Keterampilan Siswa dengan output sebanyak 20 Paket, 20 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000.
- Pengadaan Peralatan Praktikum Life Skill Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 18 Paket, 18 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 1.620.000.000.
- Pengadaan Buku Mapel Sekolah Pendidikan Khusus dengan output sebanyak 20 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000.
- Bantuan Bahan Belajar Siswa SLB dengan output sebanyak 2231 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 3.676.200.000.
- Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya dengan output sebanyak 7 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 579.780.000.
- Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya dengan output sebanyak 2 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 257.324.500.
- Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta perabotnya dengan output sebanyak 1 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 117.984.000.
- Rehabilitasi toilet (jamban) siswa/guru dengan tingkat kerusakan sedang atau berat beserta sanitasinya dengan output sebanyak 2 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 140.160.000.
- Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya dengan output sebanyak 3 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 353.312.000.



- Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru baik beserta sanitasinya dengan output sebanyak 5 Unit dan dianggarkan sebesar Rp. 717.714.000.
- Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya dengan output sebanyak 3 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 299.620.000.
- Pembangunan ruang keterampilan beserta perabotnya dengan output sebanyak 3 Ruang dan dianggarkan sebesar Rp. 365.256.000.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan dengan output sebanyak 6 Paket, 6 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 342.342.000.
- Pengadaan Media Pendidikan dengan output sebanyak 5 Paket, 5 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 576.317.500.
- Pengadaan Alat Kesenian Tradisional dengan output sebanyak 6 Paket, 6 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 362.406.000.
- Pengadaan Peralatan Seni Budaya dengan output sebanyak 5 Paket, 5 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 137.417.500.
- Pengadaan Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) dengan output sebanyak 7 Paket, 7 Sekolah dan dianggarkan sebesar Rp. 171.350.500.
- Pemberian Dana BOS ke SLB dengan output sebanyak 2410 Orang dan dianggarkan sebesar Rp. 4.430.000.000

Hambatan dalam rangka meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah adalah:

- Budaya Masyarakat yang masih banyak melakukan pernikahan dini.
- Mindset Masyarakat bahwa bekerja membantu orang tua lebih menguntungkan karena mendapatkan uang.
- Kesejahteraan Keluarga/faktor ekonomi masyarakat masih relatif rendah.
- Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah. Dimana keberadaan mereka tidak tidak bisa



dimasukkan dalam Pendataan Pendidikan (Dapodik) karena tidak memiliki NISN.

- Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus (dianggap sebagai aib keluarga).

Rencana tindaklanjut untuk meningkatkan pencapaian ini adalah dengan:

- Melakukan Sosialisasi Program Wajib Belajar 12 tahun.
- Pemberian Bantuan Operasional Sekolah.
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan secara efektif dan maksimal.
- Optimalisasi penerapan SMA Terbuka.
- Optimalisasi Pendidikan Penyetaraan Paket C.
- Optimalisasi Pembangunan Fasilitas Pendidikan di daerah 3T.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam pencapaian dua indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan.
- b. Program Pengembangan Kurikulum.
- c. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.

1.2

Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagaimana pada tabel 11 sebagai berikut:





Tabel 11 :Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (data BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Harapan Hidup	Angka	67,92	68,02	68,23	68,49	68,66	69,64	68,83	98,84%
Rata-rata Capaian										98,84%

Tabel 12 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Angka Harapan Hidup	68,83	69,79	70,76	74,61	72,65	-	71,57	-

Rumus Perhitungan:

Angka Harapan Hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian, jika kematian bayi jumlahnya besar, maka usia harapan hidup akan rendah. Cara menghitung usia harapan hidup adalah dengan menjumlahkan umur penduduk yang meninggal dibagikan jumlah penduduk yang meninggal dalam kurun waktu tertentu.

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

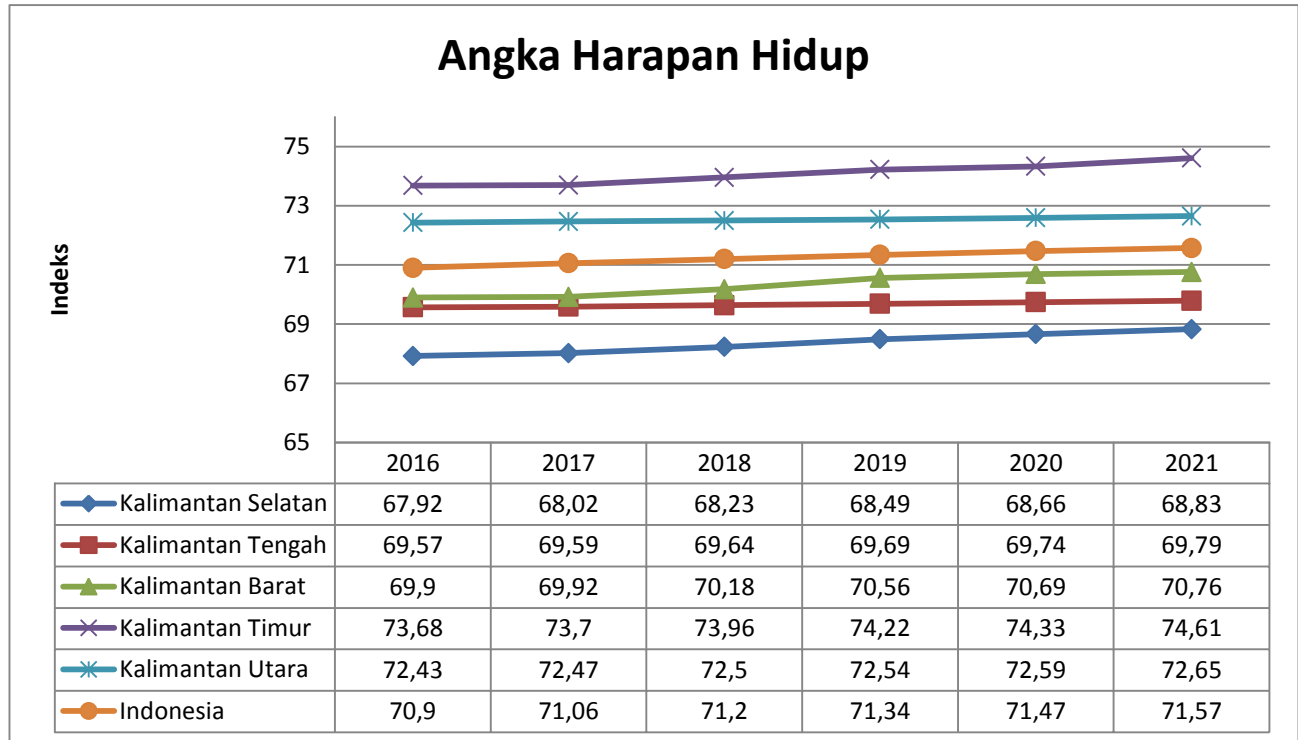
Pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 68,83 dari target sebesar 69,64, sehingga persentase capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2021 sebesar 98,84%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Angka Harapan Hidup di tahun 2021 berhasil meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2020. Ditahun 2021 Angka Harapan Hidup di angka 68,83 meningkat sebesar 0,17 dari Angka ditahun 2020 sebesar 68,66.

Grafik 10 : Angka Harapan Hidup





Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 masih berada pada peringkat paling bawah (urutan ke 5) di dibandingkan dengan provinsi yang berada di Pulau Kalimantan.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Selama periode 2016 hingga 2021 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan capaian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini untuk peningkatan Usia Harapan Hidup di Kalsel memberikan hasil sudah *on the right track* yaitu melalui upaya peningkatan penurunan AKI dan AKB, pencegahan dan pengendalian stunting, penanggulangan penyakit dan peningkatan kesehatan dasar bagi masyarakat. Namun demikian harus terus diupayakan agar peningkatannya bisa lebih tinggi lagi.

Adapun upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kalimantan Selatan yaitu dengan:

- Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
 - Penyediaan fasilitas kesehatan dasar (Puskesmas) dan kesehatan rujukan (rumah sakit) yang terjangkau dan berkualitas.
 - Pemenuhan SDM Kesehatan di Daerah Terpencil dan Sangat Terpencil.
 - Penyediaan dan peningkatan mutu kefarmasian dan alat kesehatan.



- Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk tidak mampu/miskin melalui perlindungan masyarakat miskin dan integrasi jaminan kesehatan untuk mencapai UHC.
- Sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dimana diamanatkan pemerintah daerah harus mengalokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diluar gaji. Alokasi anggaran kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk bidang kesehatan telah memenuhi bahkan melebihi yaitu sebesar 15,21% dari total belanja langsung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana
 - Berupaya menurunkan kematian ibu dan bayi di fasilitas kesehatan melalui peningkatan pelayanan ibu hamil sampai melahirkan dan melalui program continuum of care (1.000 hari pertama kelahiran); dan
 - Peningkatan pelayanan kesehatan reptoduksi dan keluarga berencana baik bagi remaja putri maupun kepada ibu usia subur.
- Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS dan Malaria.
 - Pengendalian penyakit tropis penyebab wabah dan Kejadian Luar Biasa (KLB).
 - Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak menular seperti kanker, hipertensi, diabetes dan lain-lain; dan
 - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL).
- Percepatan penurunan stunting dan masalah gizi lainnya
 - Peningkatan Pendidikan gizi yaitu melalui penyuluhan gizi kepada masyarakat, anak sekolah dan kelompok rentan lainnya.
 - Penguatan surevilans gizi masyarakat.
 - Pemberian suplemen gizi baik untuk pencegahan maupun pengobatan masalah gizi.
 - Kegiatan konvergensi stunting yang dilaksanakan mulai di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang dipayungi dengan SK konvergensi di masingmasing kabupaten/kota



- Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
 - Peningkatan kualitas lingkungan sehat;
 - Peningkatan konsumsi pangan sehat (perbanyak makan buah dan sayur); dan
 - Peningkatan aktifitas fisik/olahraga.

Beberapa hal yang menjadi ***hambatan dalam pencapaian*** Angka Harapan Hidup di Kalimantan Selatan yaitu:

- Kurangnya kualitas tenaga kesehatan dan distribusi sumber daya manusia kesehatan yang kurang merata, meskipun telah di tempatkan Tenaga Kesehatan melalui Program Nakes Strategis. Hal ini disebabkan beberapa tenaga mengalami pemindahan lokasi kerja.
- Kualitas Sarana dan prasaran kesehatan yang kurang baik di fasilitas pelayanan Kesehatan

Rencana tindaklanjut:

- Meningkatkan mutu tenaga Kesehatan dengan peningkatan sertifikasi dan kompetensi sesuai standar
- Memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia yang kurang merata dengan memperhatikan kebutuhan standar setiap fasilitas pelayanan
- Meningkatkan sarana dan prasaran di fasilitas pelayanan kesehatan

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam pencapaian satu indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.





1.3 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 13 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (data BPS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,45	4,77	4,35	4,18	4,74	3.6 - 4	4,95	80,80%
Rata-rata Capaian									80,80%	

Tabel 14 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data BPS)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,95	4,53	5,82	6,83	4,58	6,49	-

Rumus Pehitungan:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 4,95% dari target 3.6 - 4% untuk persentase capaian pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka yaitu sebesar 80,80%

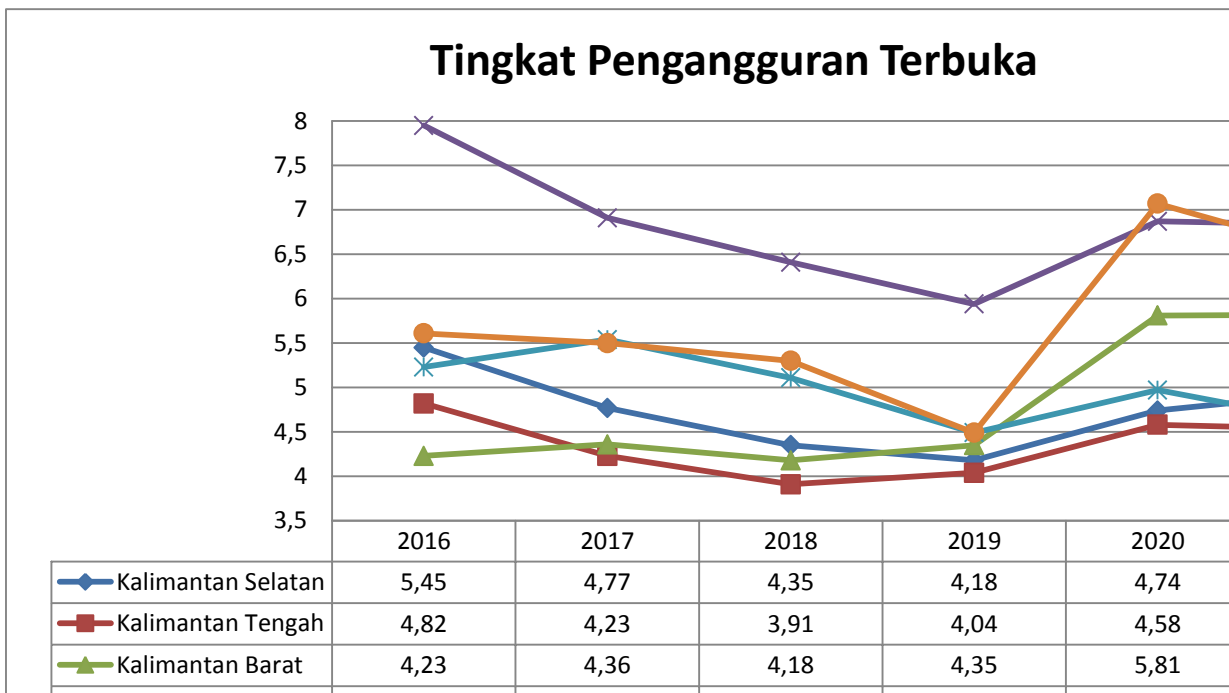
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mencapai 4,95% dimana realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami peningkatan sebesar 0,21% jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu 4,74%.

Perkembangan Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2016–2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:



Grafik 11 : Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan (data BPS)



Angka Pengangguran Kalimantan Selatan apabila dibandingkan dengan Provinsi di Kalimantan lainnya merupakan terendah ke-3 setelah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Angka Pengangguran Terbuka seluruh Provinsi di regional Kalimantan masih di bawah Angka Pengangguran Terbuka Nasional, kecuali Provinsi Kalimantan Timur.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan ditahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,21 jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4,74 menjadi 4,95 ditahun 2021.

Peningkatan Angka Pengangguran ini disebabkan masih adanya pandemi Covid-19 yang tidak hanya masalah kesehatan saja yang timbul, namun semua aspek dalam kehidupan ikut terdampak termasuk perekonomian. Perekonomian mulai menurun sejak diberlakukannya pembatasan aktivitas. Penurunan tersebut juga berdampak pada dinamika ketenagakerjaan di Indonesia.

Berdasarkan data BPS periode antara periode bulan Agustus 2020 - Agustus 2021 terdapat penambahan jumlah pengangguran sebanyak 6.320 ribu orang dari sebelumnya sekitar 103.648 ribu orang menjadi 109.968 ribu orang diperiode Agustus 2021. Sedangkan untuk jumlah penduduk angkatan kerja



periode bulan Agustus 2020 – Agustus 2021 terdapat penambahan sebanyak 32.428 ribu orang yang sebelumnya sekitar 2.186.967 juta orang menjadi 2.219.395 juta orang di periode Agustus 2021.

Upaya yang telah dilaksanakan yaitu dengan mengadakan program pelatihan keterampilan. Ada sembilan Balai Latihan Kerja (BLK) tersebar di kabupaten/kota dan masyarakat bisa mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang yang diminati. Dan juga mengadakan program pemagangan langsung di perusahaan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan menggelar pemagangan. Pemagangan dilakukan selama 5 bulan. Selama lima bulan itu mereka mendapat pelatihan pembekalan, baik materi teori sebanyak 25 persen dan 75 persen praktik lapangan. Tidak sedikit peserta dari program pemagangan yang akhirnya direkrut langsung oleh perusahaan untuk bekerja. Pada tahun 2021 Jumlah peserta pemagangan ada sebanyak 250 Orang, dan jumlah peserta yang dapat diserap yaitu sebanyak 159 Orang.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan bursa tenaga kerja atau job fair. Bursa tenaga kerja ini merupakan tempat yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan pencari kerja. Dengan melakukan cara ini, para pencari kerja tidak akan kesulitan lagi dalam mendapatkan informasi lowongan pekerjaan yang sesuai dengan potensinya. Setiap pekerjaan akan diisi oleh Sumber Daya Manusia yang sesuai di bidangnya dan pencari kerja tinggal melakukan sistem seleksi untuk menentukan pihak yang layak diterima untuk mengisi posisi yang ditawarkan.

Adanya bursa kerja memang salah satu penanganan pemerintah untuk merekrut lulusan terbaru dari berbagai lapangan pekerjaan yang tersedia. Bursa tenaga kerja ini tentunya dapat memberikan jumlah lapangan kerja untuk banyak orang. Hal ini memang sangat mampu dalam mengatasi segala permasalahan mengenai permasalahan pengangguran.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah masih sedikitnya paket pemagangan maupun pelatihan yang tersedia, sehingga masyarakat yang mendaftar tidak dapat terakomodir semua. Karena 1 paket pelatihan maupun



pemagangan hanya terdiri 16 orang. Selain itu lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian sumber daya manusia yang ada.

Rendahnya jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan karena tidak seimbangnya jumlah pencari kerja yang terdaftar dalam Bursa Kerja Online dengan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan. Hal tersebut disebabkan karena lapangan pekerjaan yang ditawarkan rendah karena perkembangan perekonomian yang lagi melemah sehingga kapasitas produksi perusahaan tidak maksimal dan berdampak pada rekrut tenaga kerja. Kompetensi tenaga kerja tidak sesuai yang dibutuhkan oleh pasar kerja, sehingga tidak dapat mengisi lapangan kerja yang tersedia

Rencana tindak lanjut kedepannya adalah memberikan lebih banyak lagi paket pelatihan maupun pemagangan dan pelatihan yang diadakan sesuai dengan perkembangan zaman, dengan memperbaharui sarana prasarana untuk pelatihan. Sehingga lulusan yang dihasilkan dapat langsung terserap di pasar kerja.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja.

1.4

Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 15 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (data Kementerian Agama RI)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	-	-	67,3	72,5	-	100	65,66	65,66%
Rata-rata Capaian									65,66%	



1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 65,66 dari target 100%, sehingga persentase capaian Indeks Kerukunan Umat Beragaman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebesar 65,66%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama pada tahun 2021 mendapat nilai baik dengan skor 65,66. Pada tahun 2020 Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI tidak melaksanakan survey nilai provinsi dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Jika dibandingkan dengan data ditahun 2019 capaian Indeks Kerukunan Umat Beragama menurun sebesar 6,85 yang semula sebesar 72,5 ditahun 2019 menjadi 65,66 di tahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan didapat dari perhitungan yang dikeluarkan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI. Pada tahun 2021 ini realisasi Indeks Kerukunan Umat beragama sebesar 65,66. Angka ini menurun sebesar 6,85 dari capaian realisasi ditahun 2019 sebesar 72,5. Ditahun 2020 Indeks Kerukunan Umat Beragama tidak dilakukan perhitungan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag RI dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

Adapun **upaya yang telah dilaksanakan** dalam mencapai capaian kinerja tersebut yaitu:

- Optimalisasi dan sosialisasi aturan perundang-undangan kerukunan umat beragama, peningkatan peran pemerintah daerah dalam menggalakkan kegiatan sosial lintas agama.
- Penguatan kerukunan melalui aturan daerah untuk menciptakan kerukunan umat beragama melalui kegiatan Sarasehan dan Dialog Umat beragama, Pengembangan wawasan bagi pemuka agama, Bimtek konflik umat beragama, dan Rakor keagamaan.



- Perlu dilakukan kegiatan untuk mendorong andil dalam hal menghidupkan tradisi setempat untuk menguatkan kerukunan.
- Optimalisasi public educators (penyuluh) sebagai duta KUB, bagaimana dikuatkan untuk pengarusutamaan moderasi beragama.

Beberapa permasalahan yang menghambat upaya peningkatan kerukunan umat beragama antara lain:

- Persepsi sebagian masyarakat bahwa berbagai program peningkatan kerukunan yang dikembangkan cenderung bersifat elitis, upaya penciptaan dan pemeliharaan kerukunan selama ini lebih menekankan pada pendekatan struktural formal daripada pendekatan informal.
- rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukung program kerukunan.

Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan agar pencapaian capaian kinerja lebih maksimal untuk mendukung peningkatan kualitas kerukunan umat beragama yaitu:

- Menyusun program (advokasi kebijakan persepektif kerukunan) yang mempertemukan pemeluk antar agama, kegiatan dapat menysasar masyarakat di setiap level.
- Menguatkan kurikulum pembelajaran multikultural, mengenalkan perbedaan sejak dini, dan menghidupkan edukasi kerukunan di ruang publik yang luas.
- hasil kesepakatan pertemuan antar umat beragama untuk ditindaklanjuti para tokoh dan pemuka agama agar apa-apa yang direkomendasikan dan dijalankan sesuai dengan hasil kesepakatan diimplementasikan pada kehidupan beragama di masyarakat.
- Usulan revitalisasi tradisi dan kearifan lokal.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

1. Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.





1.5

Meningkatnya Kesetaraan Gender

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kesetaraan Gender" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 16 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (data BPS dan DPPA Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	88,86	88,60	88,86	88,60	88,61	89,00	88,61*	99,56%
2	Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks	70,83	71,39	71,31	74,60	74,48	67,78	74,48*	109,88%
Rata-rata Capaian										

Keterangan: Data Tahun 2020

Tabel 17 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	Indeks Pembangunan Gender	*88,61	-	-	-	-	-	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender	*74,48	-	-	-	-	-	-

Keterangan: Data Tahun 2020

Rumus Pehitungan:

Indeks Pembangunan Gender:

$1/3 [Xede (1) + Xede (2) + Linc-Dist]$

Xede (1) = Xede untuk harapan hidup

Xede(2) = Xede untuk pendidikan

Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan

Indeks Pemberdayaan Gender:

$1/3 (Ipar+IDM+Lin-Dist)$

Ipar= indeks keterwakilan di parlemen

IDM= indeks pengambilan keputusan

Linc= indeks distribusi pendapatan.





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2020 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun 2019 sebesar 88,60 menjadi 88,61 ditahun 2020.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu data yang dirilis dari Badan Pusat Statistik. Akan tetapi jika menggunakan data tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 0,12 dari tahun 2019 sebesar 74,60 menjadi 74,48 ditahun 2020.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Upaya yang dilaksanakan dalam peningkatan Indeks Pembangunan Gender adalah dengan strategi meningkatkan indikator penunjang IPG:

1. Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan.





- Mou dengan kepala daerah se kalsel untuk melaukan pencegahan perkawinan anak khususnya anak usia sekolah.
- Melakukan koordinasi dan advokasi ke lembaga-lembaga pendidikan untuk memberikan ha-hak anak khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

2. Angka Harapan Hidup.

Untuk meningkatkan angka harapan hidup adalah dengan menysar kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi dan Kesehatan. Strategi untuk meningkatkan ekonomi keluarga dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan produk rumahan dan memberikan peralatan ketrampilan yang dapat digunakan sebaga modal usaha. Strategi untuk meningkatkan upaya peningkatan angka harapan hidup perempuan dan anak adala dengan menysar ke Lembaga-lembaga layanan Kesehatan seperti puskesmas dan posyandu. Kegiatan adalah dengan memberikan advokasi kepada petugas layanan Kesehatan tentang pemenuhan ha-hak anak di bidang Kesehatan. Dalam hal ini adalah fasilitas Kesehatan yang harus dipenuhi dan ramah bagi ibu dan anak.

3. Sumbangan Pendapatan Perempuan.

Untuk meningkatkan pendapatan perempuan, Dinas PPPA provinsi Kalimantan selatan berkolaborasi dengan Kabupaten Kota dan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan yang dilasanakan adalah membangun jejaring dengan organisasi-organisasi perempuan untuk mendorong usaha perempuan berkembang.

Terdapat 2 (dua) ***hambatan/kendala*** dalam pencapaian indikator tersebut adalah, yaitu:

- Hambatan internal:
Masih terbatasnya SDM di Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Selatan.
- Hambatan eksternal:
Permasalahan perkawinan anak menjadi masalah besar yang harus dilaksanakan secara kolaborasi dan komitmen dari semua pemegang kebijakan daerah.



Rencana Tindak lanjut untuk kedepannya adalah dengan:

1. Meningkatkan strategi pemenuhan hak-hak anak diharapkan dapat mencegah perkawinan anak.
 - a) Meningkatkan pemenuhan kabupaten/ kota layak anak.
 - b) Meningkatkan peran Tim Gugus Tugas KLA Kab/Kota.
 - c) Melakukan advokasi dan fasilitasi Kab/Kota untuk menyusun Kebijakan Afirmatif peningkatan akte kelahiran.
 - d) Meningkatkan sosialisasi tentang indikator **lembaga kesehatan/ puskesmas** ramah anak.
 - e) Meningkatkan sosialisasi tentang indikator sekolah ramah anak.
 - f) Meningkatkan sosialisasi tentang indikator taman bermain ramah anak.
 - g) Meningkatkan koordinasi/sinkroniasi data antara DPPPA Kab/Kota dengan Dinkes Kab/Kota (termasuk puskesmas).
 - h) Mengoptimalkan fungsi Sekolah Ramah Anak.
2. Meningkatkan pola asuh anak di keluarga dengan meningkatkan ketahanan dan kuitas keluarga.
3. Memperkuat koordinasi antar Lembaga Perempuan dan anak.

b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dengan melaksanakan strategi meningkatkan indeks penyusun IDG seperti keterwakilan di parlemen, Meningkatkan persentase perempuan profesional, dan meningkatkan pendapatan perempuan. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah memberikan advokasi kepada calon anggota legislatif dan memberikan penguatan kepada perempuan yang terpilih di legislatif. Sedangkan untuk meningkatkan perempuan profesional adalah dengan melaksanakan koordinasi dan bekerja sama dengan Lembaga dan organisasi perempuan seperti IWAPI dan P2LIPI. Kolaborasi dengan organisasi perempuan akan menghasilkan output pelatihan-pelatihan ekonomi perempuan.





Hambatan dalam pencapaian indikator tersebut adalah kurang optimalnya kegiatan-kegiatan yang memiliki daya tarik dan pengungkit besar untuk meningkatkan ekonomi perempuan dan menjadikan perempuan lebih mandiri serta terbatasnya anggaran yang tersedia dan refocusing anggaran menjadi penghambat untuk menghasilkan pelatihan yang lebih bervariasi.

Rencana Tindak Lanjut untuk kedepannya adalah perlu melakukan pemetaan dan koordinasi lintas Lembaga lebih lanjut untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan.
- Program Perlindungan Perempuan.
- Program Peningkatan Kualitas Keluarga.
- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.
- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).
- Program Perlindungan Khusus Anak.

MISI II

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Indikator Opini BPK dan Indikator Nilai SAKIP. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	SAKIP	Nilai	A (81,01)	*BB (78,49)	96,88%
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	100%

Keterangan: *Data Tahun 2020



Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan tiga sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”; **sasaran ketiga** adalah “Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel”.

2.1 Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran “**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik**” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut

Tabel 19 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,07	80,37	80,10	81,01	84,31	83,63	85,92	102,73%
Rata-rata Capaian									102,73%	

Tabel 20 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,92	-	-	-	-	-	-

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 85,92 dari target 83,63, sehingga persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 102,73%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator Nilai rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perangkat daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020. Ditahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,31 meningkat sebesar 1,61 menjadi 85,92 ditahun 2021.



3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh termasuk kategori Baik yang mana dilakukan survei terhadap Unit Pelayanan Publik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

Tabel 21 Unit Pelayanan Publik Prov. Kalsel

No	UNIT KERJA	NILAI IKM
1	Dinas Perdagangan	83,75
2	Badan Keuangan Daerah	86,01
3	Balai Latihan Kerja	90,40
4	Panti Sosial Tresna Werdha "Budi Sejahtera"	82,16
5	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I	90,67
6	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II	88,22
7	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru	90,30
8	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura	84,53
9	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau	83,60
10	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan	83,99
11	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai	86,48
12	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin	84,66
13	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai	85,27
14	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung	84,14
15	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari	87,66
16	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin	85,53
17	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru	85,42
18	Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan	83,73
NILAI RATA-RATA		85,92

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di atas didapatkan nilai rata-rata SKM sebesar 85,92 dari 18 Dinas/UPPD yang melaksanakan SKM ditahun 2021, jika dibandingkan capaian di tahun 2020 yang hanya 84,31 dari 26 Dinas/UPPD yang melaksanakan SKM. Ada peningkatan rata rata nilai SKM pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,61. Akan tetapi, jika dilihat dari SKPD/UPPD yang melaksanakan SKM, ini mengalami penurunan, ditahun 2020 yang melaksanakan SKM sebanyak 26 SKPD/UPPD sedangkan ditahun 2021 hanya 18 SKPD/UPPD yang melaksanakan SKM, hal ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya seluruh SKPD/UPPD wajib melaksanakan SKM untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat (user). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara regulasi telah mengatur kebijakan pelaksanaan SKM yang diberlakukan



kepada seluruh SKPD/UPPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik itu berupa Peraturan Gubernur Nomor 064 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik, namun karena tingkat pengawasan terhadap regulasi masih belum berjalan maksimal sehingga SKPD/UPPD masih belum sadar akan pentingnya SKM tersebut..

Upaya yang dilaksanakan untuk mencapai capaian kinerja adalah dengan melaksanakan Pembinaan terhadap Perangkat Daerah dengan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik khususnya tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian adalah

1. Masih ada Perangkat Daerah yang belum memahami Peraturan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik.
2. Dari faktor leadership (Kepemimpinan) yang tidak berkomitmen dalam melaksanakan Perundang-undangan tentang Pelayanan Publik.
3. Sebagian SDM yang masih kurang bermutu dan berkualitas sehingga mempengaruhi terhadap proses pelayanan publik.

Rencana Tindakanjutt untuk kedepannya dengan melaksanakan Monitoring Pelayanan Publik ke seluruh Perangkat Daerah setelah mengevaluasi pelayanan publik ke Perangkat Daerah secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan fasilitasi **pelayanan publik** yang diterapkan di SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas **pelayanan publik**.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

Program Penataan Organisasi.

2.2

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:



Tabel 22 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (Data Bakeuda Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase PAD terhadap PD	%	47,91%	50,66%	53,96%	51,82%	45%	51,87%	41,30%	79,62%
Rata-rata Capaian										79,62%

Tabel 23 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (Data Bakeuda Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	Persentase PAD terhadap PD	41,30%	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan:

$$\text{Persentase PAD terhadap PD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Persentase PAD terhadap PD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 41,30% dari target 51,87%, sehingga persentase capaian Persentase PAD terhadap PD Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebesar 79,62%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Persentase PAD terhadap PD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 menurun sebesar 3,70% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang capaian ditahun 2020 sebesar 45% menjadi 41,30% ditahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Salah satu indikator yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah rasio keuangan daerah terhadap anggaran pendapatan belanja daerah yang terukur secara efektif dan efisien dengan cara membandingkan PAD terhadap PD. PAD merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Sumber PAD terbesar adalah:



Tabel 24. Sumber PAD Prov. Kalsel

NO.	Uraian	Realisasi 2020	%
1	Pajak Daerah	Rp. 2.631.708.038.456,76	93,08
2	Retribusi Daerah	Rp. 38.414.822.503,23	90,67
3	Lain-lain PAD yang sah	Rp. 859.816.386.139,78	137,63
4	Hasil Kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 41.271.583.203,00	79,98

sedangkan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditahun 2020 sebesar Rp. 6.315.755.108.118,44. Adapun pencapaian indikator Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 41,30%.

Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan persentase PAD yaitu melakukan program **SUPER PKB**: yaitu memberikan Surat Peringatan kepada Wajib Pajak yang masa berlaku pajaknya sudah melewati batas waktu. **SAMSAT Jemput Antar** yaitu program bagi wajib pajak yang ingin membayarkan pajak tanpa harus datang ke SAMSAT dengan cara menghubungi Petugas SAMSAT untuk mengambil berkas pengisian pajak ke rumah/tempat yang telah disepakati. **SAMSAT DRIVE THRU** yaitu SAMSAT yang melakukan pembayaran hanya di dalam mobil yang berlokasi di SAMSAT Banjarmasin II. **Samsat Keliling** tiap UPPD yaitu melakukan penagihan langsung ke kecamatan-kecamatan dengan mobil SAMSAT KELILING (SAMKEL). **SAMSAT Corner** di Duta Mall Banjarmasin dan pelayanan **SAMSAT Corner** depan Q Mall Banjarbaru, dan **Pendapatan Retribusi**.

Hambatan dalam pencapaian:

- Terkait Pajak Daerah, banyak hal yang menyebabkan adanya penurunan PAD di tahun 2021 ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya khususnya jenis Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini disebabkan kemampuan dan daya beli (konsumsi) masyarakat dan pelaku usaha mengalami kontraksi negatif apabila dibanding tahun lalu, terlihat pertumbuhan ekonomi Kalsel. Pendapatan Asli Daerah kurang optimal karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, sehingga karena adanya pemulihan kesehatan, pembatasan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya, menyebabkan pembatasan mobilitas pelaku ekonomi yang menyebabkan daya beli masyarakat dan pelaku usaha menurun. Selain itu ada kesepakatan dari



stakeholder terkait, untuk memberlakukan pembatasan sehingga harus membatasi pelayanan unggulan yang langsung ke masyarakat seperti SUPER PKB, SAMSAT Jemput Antar, SAMSAT Corner di Duta Mall Banjarmasin dan pelayanan SAMSAT Corner depan Q Mall Banjarbaru, dan Samsat Keliling.

- Pendapatan Retribusi juga kurang optimal karena adanya pandemi COVID-19 yang sedang berlangsung, sehingga diadakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang menyebabkan beberapa tempat wisata yang tidak bisa beroperasi dan penyewaan gedung yang dibatasi.
- Dana Perimbangan

Dana Perimbangan	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021
	Rp.3.497.425.993.626	Rp.3.412.852.558.788	Rp.3.090.331.680.716,1	Rp. 2.978.929.084.391

Dari sisi Dana Perimbangan, terjadi penurunan capaian realisasi pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020.

Selain PAD, indikator lain yang mempengaruhi alokasi belanja modal adalah DAU, merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke pemerintah daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai pembagian dan pembentukan daerah yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Melihat realisasi tahun 2021 dari rasio PAD terhadap PD Provinsi Kalimantan Selatan, terjadi penurunan dengan realisasi sebesar 41,30% dari target sebesar 51,87%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya pemulihan kesehatan, pembatasan sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya, serta pembatasan mobilitas pelaku ekonomi yang membuat daya beli masyarakat dan pelaku usaha menurun. Sedangkan, dari sisi Pendapatan Daerah khususnya Dana Perimbangan realisasinya mengalami peningkatan dari target Rp.3.497.425.993.626 dengan realisasi Rp.3.412.852.558.788 atau (97,58%) pada tahun 2020. Dan pada tahun 2021 dari target Rp. 3.090.331.680.716,1 dengan realisasi Rp. 2.978.929.084.391 atau (96,39%).

- Lain-lain PAD yang sah di tahun 2021 realisasinya telah melampaui target yaitu sebesar 137,63%.
- Hasil Kekayaan yang Dipisahkan tahun 2021 saat ini tercapai realisasi sebesar 79,98% dari besaran target yang ditetapkan yaitu 100%.



Rencana tindaklanjut:

- Dalam upaya menjadikan pengelolaan keuangan yang Profesional, Mandiri dan Terdepan, terus mengupayakan peningkatan-peningkatan SDM, Sarana dan Prasarana serta penyempurnaan Tata Kelola Keuangan Daerah.
- Dalam rangka mempertahankan capaian hasil kinerja Pendapatan Daerah yang dikaitkan dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan cara melaksanakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah melalui antara lain:
 - Membangun database Wajib Pajak daerah sebagai sarana monitoring dan evaluasi kewajiban perpajakan yang terintegrasi dengan database instansi terkait.
 - Mendorong perbaikan tata kelola pajak daerah secara sistematis melalui perbaikan kebijakan, penguatan kelembagaan dan pengembangan sistem data serta informasi.
 - Penyempurnaan instrumen data dan informasi terkait Pajak Daerah.
 - Perbaikan sistem tata kelola pajak daerah berbasis aplikasi dengan menyesuaikan tuntutan kebutuhan dan perkembangan informasi teknologi.
 - Pemenuhan kewajiban Wajib Pajak yang masih terhutang, dapat melalui pemberian insentif pajak maupun tagih paksa, terkait hal ini harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah, situasi dan kondisi masyarakat.
 - Melakukan perubahan regulasi pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berasaskan prinsip berkeadilan serta tidak membebani masyarakat; dan
 - *Reward* dan *punishment*, perilaku kepatuhan Wajib Pajak mengikuti dinamika perekonomian dan kultur budaya daerah.
- Mencari sumber-sumber pendapatan Retribusi, Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan baru yang potensial melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah serta mendukung kinerja pemerintah daerah.
- Melakukan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran





pelayanan kepada masyarakat.

- Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan merupakan pendukung dalam rangka mengoperasionalkan sistem dan mekanisme pelayanan yang berbasis teknologi informasi. Sehingga ke depan pengembangan sistem dan mekanisme secara mandiri dapat dilaksanakan tanpa tergantung pada pihak ketiga.
- Melakukan koordinasi dengan *stakeholder* terkait tentang regulasi kegiatan layanan kesamsatan *new normal* dalam usaha meningkatkan layanan yang sesuai dengan protokol kesehatan WHO.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

2.3

Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel" diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 25 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021
(data Kementerian PAN RB dan BKD Prov. Kalsel)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	59,91	64,93	65,10	67,88	68,47	85,01	*68,47	80,54%
2.	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
3	Nilai SAKIP	Nilai	BB (76,69)	BB (77,29)	A (80,15)	A (80,74)	BB (78,49)	A (81,01)	*BB (78,49)	96,88%
4	Indeks Profesionalisme Pegawai	Indkes	-	-	66	62,83	**85	95	**71,17	74,91%
Rata-rata Capaian										

Keterangan: *Data Tahun 2020, **Perhitungan Mandiri BKD Prov. Kalsel



Tabel 26: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No.	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1	Indeks Reformasi Birokrasi	*68,47	-	-	-	-	-	-
2	Opini BPK	WTP	-	-	-	-	-	-
3	Nilai SAKIP	*BB (78,49)	-	-	-	-	-	-
4	Indeks Profesionalisme Pegawai	**71,17	-	-	-	-	-	-

Rumus perhitungan:

- Indeks Reformasi Birokrasi
 Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang termuat pada Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Opini BPK
 Pernyataan pendapat/opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
- Nilai SAKIP
 Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Indeks Profesionalisme Pegawai
 $IP = IP1 + IP2 + IP3 + IP4$
 - IP = Indeks Profesionalitas
 - IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi
 - IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi
 - IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja
 - IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



b. Opini BPK

Berdasarkan hasil Pemeriksaan BPK, pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 teralisasi WTP dari target WTP sehingga persentase capaian indikatornya pada tahun 2021 sebesar 100%.

c. Nilai SAKIP

Pencapaian indikator Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

d. Indeks Profesionalisme Pegawai

Pencapaian indikator Indeks Profesionalisme Pegawai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum rilis dari BKN. Akan tetapi berdasarkan perhitungan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Daerah pencapaian indikator Indeks Profesionalitas Pegawai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 71,17 dari target 95 sehingga untuk persentasenya sebesar 74,91%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan pencapaian ditahun sebelumnya yang mana untuk penilaian tahun 2021 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

b. Opini BPK

Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 dengan tahun 2020 tetap sama artinya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mampu mempertahankan Opini BPK pada tahun sebelumnya yaitu pada penilaian optimal dan maksimal berupa Opini BPK.





c. Nilai SAKIP

Pencapaian indikator Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan pencapaian ditahun sebelumnya yang mana untuk penilaian tahun 2020 belum dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi jika menggunakan data sampai dengan tahun 2020 Nilai SAKIP memperoleh nilai sebesar 78,49 dengan kategori BB sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/106/M/AA.05/2021. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 ini menurun sebesar 2,15. Pada tahun 2019 dengan nilai 80,74 menjadi 78,49 ditahun 2020.

d. Indeks Profesionalisme Pegawai

Pencapaian indikator Indeks Profesionalisme Pegawai Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 dan 2021 belum rilis resmi dari BKN. Akan tetapi jika dibandingkan dengan data perhitungan mandiri yang sama-sama dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan sebesar 13,83 dari sebelumnya sebesar 85 ditahun 2020 menjadi sebesar 71,17 ditahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi jika menggunakan data sampai dengan tahun 2020 Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan sebesar 0,59 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019. Pencapaian pada tahun 2019 sebesar 67,88 menjadi 68,47 ditahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.





Adapun upaya yang telah dilaksanakan:

- Pelaksanakan survei internal sebagai pengganti survei budaya kerja, survei ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memahami Tugas dan Fungsinya, sehingga dari hasil survei tersebut dapat dilakukan pemetaan terhadap pemahaman ASN terhadap Tupoksi masing-masing.
- Mengoptimalkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh SKPD.
- Mengikutsertakan seluruh SKPD dalam melakukan Penilaian Mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di SKPD masing-masing.
- Menetapkan Role Model dan Agent of Change diseluruh SKPD.
- Mengusulkan SKPD untuk dilakukan penilaian Zona Integritas.
- Mewajibkan seluruh SKPD untuk menetapkan Peta Proses Bisnis dan melakukan pengukuran kinerja secara bulanan.

Adapun hambatan/masalah yang masih terjadi adalah

- Tim Reformasi Birokrasi belum melakukan tugasnya berdasarkan mekanisme kerja yang baik (rencanakan, laksanakan, monitoring, dan evaluasi serta tindaklanjut).
- Roadmap Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan belum dijabarkan ke dalam rencana kerja dan dilaksanakan dengan baik.
- Peran asessor PMPRB kurang mendapat respon yang memadai dari Tim Reformasi Birokrasi, sehingga gambaran tentang kondisi yang ada masih sering tidak sama antara Tim Asessor dengan Tim RB, sehingga menjadi kendala dalam melakukan perbaikan.
- Pembentukan *agent of change*, belum memiliki pengaruh yang berarti dalam upaya untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan.
- Masih terdapat Peraturan Perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang memerlukan identifikasi dan revisi.
- Internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* belum berjalan dengan baik.



- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan belum memiliki Peta Proses Bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar OPD maupun inter OPD, sehingga SOP yang ada belum merupakan turunan Proses Bisnis.
- Penguatan sistem manajemen SDM belum optimal. Hal ini dapat dilihat pada standar kompetensi jabatan dan *asesment* pegawai yang belum menyeluruh dan ukuran kinerja individu yang belum digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
- Implementasi atas sistem pengawasan seperti penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System* dan benturan kepentingan masih belum berjalan secara optimal.
- Tingkat kepatuhan pejabat dan pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kewajibannya melaporkan Harta kekayaannya, baik dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) masih cukup rendah. Penyelenggara Negara yang telah menyampaikan LHKPN baru mencapai 58,68 % sedangkan ASN yang telah menyampaikan LHKASN baru mencapai 70,55 %.
- Belum optimalnya implementasi pelayanan publik khususnya di OPD pelayanan dalam hal implementasi standar layanan, Pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan dan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.

Adapaun rencana tindaklanjut untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah dengan

- Perbaiki mekanisme kerja Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan cara merencanakan, melaksanakan, memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja serta menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi tersebut.
- Tim Reformasi Birokrasi Provinsi Kalimantan Selatan agar membuat rencana kerja yang mengacu pada Road Map dan melaksanakan rencana kerja tersebut dengan baik.



- Tim Asessor RMPRB dan Tim RB Provinsi Kalimantan Selatan agar menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik, sehingga mampu melakukan percepatan pelaksanaan RB secara efektif serta dapat mengurangi gap penilaian antara Asessor PMPRB dengan Tim RB.
- Meningkatkan peran Agent of Change dalam melakukan perubahan pada setiap unit organisasi dengan cara mengikutsertakan dalam pelatihan serta memperluas cakupan media komunikasi.
- Mengoptimalkan sistem penataan peraturan perundang-undangan terkait identifikasi dan harmonisasi peraturan yang tumpang tindih serta sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan.
- Meningkatkan internalisasi budaya kerja dan perubahan *mindset* agar mempercepat terwujudnya perubahan budaya kerja dan pola pikir kearah yang lebih baik.
- Menetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan koordinasi dan sinergi antar OPD maupun inter OPD, kemudian menjabarkan Peta Proses tersebut ke dalam SOP, sebagai revisi atas SOP yang sudah ada.
- Mengoptimalkan sistem Manajemen SDM antara lain mengenai standar kompetensi jabatan, melakukan *assessment* pegawai secara menyeluruh dan menggunakan ukuran kinerja individu sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
- Mengoptimalkan implementasi atas sistem pengawasan seperti penganganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing System* dan benturan kepentingan.
- Memberikan peringatan kepada pejabat dan pegawai yang wajib LHKPN serta pejabat dan pegawai lain yang wajib LHKASN yang melakukan kewajibannya.
- Mengoptimalkan implementasi pelayanan publik khususnya di OPD Pelayanan dalam hal standar layanan, pemberian *reward/punishment* terhadap pemberi layanan dan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat.





b. Opini BPK

Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 masih mendapatkan nilai WTP, keberhasilan pencapaian secara positif. Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu pernyataan pendapat/opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021. Hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2020, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), keberhasilan pencapaian secara positif.

Adapun upaya/faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam mempertahankan predikat opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah seperti ketepatan Laporan Keuangan dan laporan lainnya.

Hambatan/masalah yang dihadapi adalah

Dalam menyampaikan sisi laporan keuangan masih ada beberapa kebijakan yang berubah dalam anggaran yang telah berjalan, dan masih ada beberapa SKPD yang menyampaikan laporan saat terakhir batas waktu penyampaian laporan

Rencana Tindakan untuk mengatasi permasalahan adalah

1. Memperbaiki pola alur pelaporan di SKPD dan koordinasi antar bidang,
2. Penggunaan aplikasi yang lebih handal,
3. Penatausahaan BMD tertib administrasi ,
4. Peningkatan Nilai pemanfaatan Barang Milik Daerah,
5. Tsertifikasi Aset Tanah dan Tersedia Dokumen Kepemilikan BMD,

c. Nilai SAKIP

Pencapaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 belum dapat dicapai dikarenakan masih menunggu penilaian yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Akan tetapi jika menggunakan data sampai dengan tahun 2020 Nilai SAKIP mengalami penurunan sebesar 2,15 jika



dibandingkan dengan pencapaian tahun 2019. Pencapaian pada tahun 2019 sebesar 80,74 menjadi 78,49 ditahun 2020.

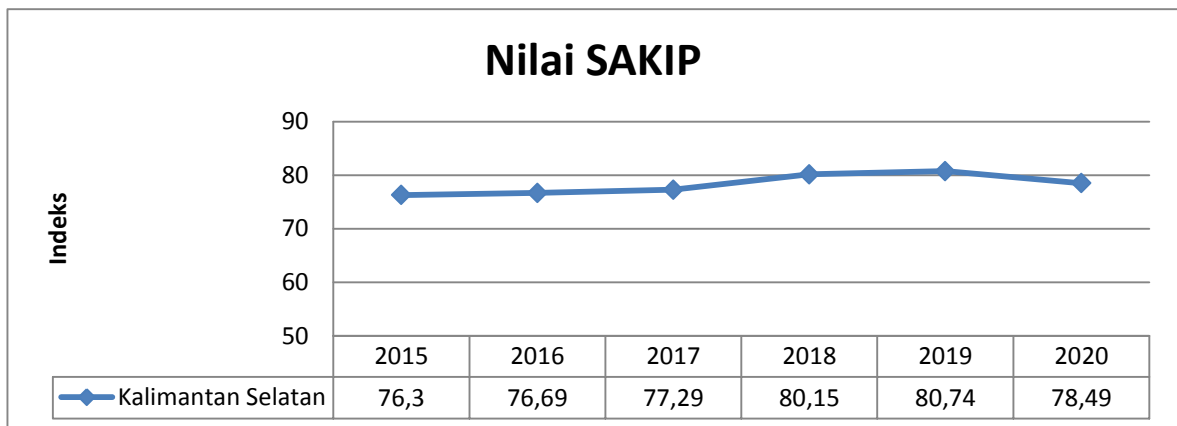
Pencapaian dan perkembangan nilai SAKIP perkomponen dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 27 : Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Provinsi Kalsel

No.	Penilaian	Bobot	Nilai				Bobot	Nilai	
			2015	2016	2017	2018		2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30	26,21	26,13	26,21	26,56	30	26,61	26,64
2.	Pengukuran Kinerja	25	16,98	17,13	18,05	20,90	25	20,99	20,02
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,97	11,39	11,41	11,67	15	11,69	11,71
4.	Evaluasi Internal	10	7,65	7,77	7,78	7,78	10	7,98	7,98
5.	Capaian Kinerja	20	14,49	14,27	13,84	13,24	20	13,47	12,14
	Total	100	76,30	76,69	77,29	80,15	100	80,74	78,49
	Kategori	-	BB	BB	BB	A	-	A	BB

Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 12 : Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan



Secara umum perkembangan nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan akan tetapi pada tahun 2020 pencapaian Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan. Meskipun mengalami penurunan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan orientasi penyelenggaraan pemerintahan pada hasil, serta efektivitas dan



efisiensi penggunaan sumber daya pada Provinsi Kalimantan Selatan sudah sangat baik, namun masih memerlukan penyempurnaan.

Upaya Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan:

- Mereviu kembali IKU ditingkat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar lebih memenuhi kriteria SMART dan menjawab isu-isu strategis, sehingga pencapaian kinerja dapat memberikan dampak manfaat bagi masyarakat dan lebih meningkat dari tahun sebelumnya.
- Membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan seluruh jajaran pimpinan dalam ber SAKIP.
- Penyelarasan Ukuran Kinerja telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2017 dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen Keselarasan dalam proses Perencanaan dengan mengacu pada Peta Proses Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun yang nantinya akan terus disempurnakan.
- Untuk kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Kalsel telah melaksanakan Lelang Jabatan pada tahap Levelan Eselon II, serta telah melaksanakan Uji Kompetensi pada pejabat levelan Esselon III dan IV.
- Monitoring serta Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang melalui Laporan Capaian Bulanan SKPD yang dilaporkan baik secara fisik maupun melalui aplikasi E-SAKIP Prov. Kalsel, yang saat ini Pelaporan Kinerja dilaksanakan secara bulanan.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memerintahkan seluruh PNS menetapkan Perjanjian Kinerja yang memiliki keterkaitan Kinerja dari Level tertinggi hingga level terbawah, dan secara berkesinambungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim SAKIP terus berupaya melaksanakan penyempurnaan terhadap keselarasan penjabaran (Cascade Down) Kinerja SKPD hingga ke Levelan individu pegawai, disetiap kesempatan melalui acara Asistensi Asistensi SAKIP.
- Refocusing Program dan Kegiatan dan Komponen Anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU.



- Dalam rangka mendukung peningkatan penerapan manajemen kinerja serta efektifitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja Organisasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan antara Perencanaan yang saat ini telah berbasis teknologi informasi dengan sistem penganggaran (Planing dan Budgeting).
- Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Laporan Kinerja Telah meningkatkan penyajian data capaian kinerja dengan menyajikan antara lain:
 - a. Capaian Kinerja dengan Target Tahunan.
 - b. Capaian Kinerja dengan Target 5 Tahunan.
 - c. Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Regional, Target Nasional dan SDG's.
 - d. Efektifitas program dan anggaran.
 - e. Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pelaporan juga secara Rutin melaksanakan Review awal yang dikoordinasi oleh Biro organisasi dengan Inspektorat Provinsi.
 - f. Untuk mencapai Pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD Prov. Kalsel, Pemprov Kalsel telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta membagikan Buku Saku Penyusunan Lakip di Tahun 2018.
- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menggerakkan seluruh Entitas SAKIP di Pemprov Kalsel dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel.
- Pemerintah Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapotan SKPD dengan mengumumkan hasil Raptan SKPD tersebut di Media Massa.





Rencana Tindak Lanjut:

- Menyempurnakan penjabaran (cascading) kinerja level pemerintah provinsi sampai ke individu dengan mengacu kepada hasil proses bisnis dan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga membentuk keselarasan dan keterkaitan kinerja antar jenjang organisasi dan juga kontribusi kinerja individu secara berjenjang sesuai levelnya dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah.
- Meningkatkan komitmen seluruh pimpinan dalam penerapan manajemen kinerja melalui pengintegrasian sistem perencanaan kinerja dan penganggaran serta meningkatkan mekanisme monitoring pengukuran kinerja organisasi dan individu yang dilakukan secara berkala sehingga dapat memicu perbaikan kinerja dan juga sebagai dasar pemberian reward and punishment.
- Mengoptimalkan pelaksanaan evaluasi terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada pohon kinerja, sehingga hasil evaluasi tersebut dapat memastikan bahwa anggaran yang digunakan untuk prioritas pembangunan dan memiliki daya ungkit yang efektif dalam pencapaian kinerja serta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.
- Mendorong Inspektorat untuk lebih meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas di internal pemerintah provinsi dan tetap konsisten melakukan pembinaan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, agar, melakukan pemantauan terhadap tindaklanjut saran atau rekomendasi hasil evaluasi secara berkala agar terwujud perbaikan yang nyata dan berkelanjutan kepada PD maupun kepada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mengoptimalkan penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan kinerja organisasi serta dijadikan acuan dalam penyusunan SKP.





d. Indeks Profesionalisme Pegawai (IPP)

Pengukuran Indeks Profesional ASN yang dilakukan pada PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2021 dilakukan terhadap 10.932 PNS, sumber data untuk pengukuran Indeks Profesional ASN menggunakan data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan hasil pendataan pada unit kerja yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Hasil pengukuran Indeks Profesional ASN mengalami kenaikan dari tahun 2019, yakni dari nilai indeks 62,83 menjadi 71,17. Untuk pengukuran tahun 2020 dan 2021 rilis resmi dari BKN belum dikeluarkan sehingga BKD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan perhitungan mandiri dengan menggunakan instrumen dan data yang tersedia.

Hasil rincian per komponen Indeks Profesional ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 seperti tabel 28 berikut:

Tabel 28 komponen Indeks Profesional ASN

Dimensi	Skor	
	Maksimal	Pengukuran
Kualifikasi	25	13,75
Kinerja	40	27,53
Kompetensi	30	24,9
Disiplin	5	4,99
Skor IP ASN		71,17

Adapun **upaya untuk meningkatkan** Indeks Profesional Pegawai adalah dengan:

- Melakukan pengumpulan data secara intensif sehingga diusahakan mendapatkan data yang lebih akurat.
- Melakukan perumusan kebijakan dan telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0529/KUM/2020 Tanggal 24 Juli 2020 tentang Konversi Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengatur tentang konversi pengembangan kompetensi di mana jika ASN telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi namun penyelenggara kegiatan tidak memfasilitasi pemberian sertifikat



keikutsertaan dan/atau tidak terdapat informasi JP kegiatan, maka ASN tersebut dapat diakui telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi dengan JP tertentu selama melampirkan dokumen yang dipersyaratkan untuk pengakuan JP tersebut.

- Melakukan monitoring dan evaluasi kepada SKPD terkait pemenuhan data komponen penilaian IP ASN.

Hambatan/Permasalahan dalam pencapaian Indeks Profesional Pegawai adalah:

- Sumber data dalam pengukuran IP ASN yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) belum sepenuhnya mutakhir sehingga diperlukan pemutakhiran data sebelum dilakukan pengambilan data sebagai dasar penghitungan IP ASN.
- Dalam rangka pencapaian nilai dimensi kompetensi ASN pada penyertaan Diklat Struktural/Fungsional terkendala terhadap tingginya biaya dan keterbatasan kuota dalam penyertaan Diklat.
- Kurangnya perhatian dan kesadaran individu ASN terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN.
- Hasil pengukuran IP ASN secara nasional di keluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara pada dua tahun terakhir belum tersedia sehingga akan kesulitan untuk menganalisa kelemahan dan kekurangan IP ASN pada tingkat daerah.

Rencana tindak lanjut Pencapaian Indeks Profesional Pegawai adalah

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemutakhiran data pegawai pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sehingga data akan selalu mutakhir terutama data pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin.
- Melakukan Sosialisasi secara intensif terhadap Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0529/KUM/2020 tentang Konversi Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan, Provinsi Kalimantan Selatan.
- Mendorong Kepala Perangkat Daerah agar dapat meningkatkan IP ASN tingkat Perangkat Daerah dengan cara membuat kompetisi IP ASN



tingkat Perangkat Daerah sehingga nantinya akan mendorong peningkatan IP ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
- d. Program Penataan Organisasi.
- e. Program Kepegawaian Daerah.

MISI III

MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Berbasiskan Kearifan Lokal.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indikator Indeks GINI, Persentase Kejadian Konflik Antar Suku, Agama dan Indikator Persentase Penurunan Angka Kriminalitas. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Indeks GINI	Indeks	0,286	0,325	88,00%
		Angka Kemiskinan	Angka	3,96 – 4,01	4,56	87,93%
2.	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Berbasiskan Kearifan Lokal	Persentase Kejadian Konflik Antar Suku dan Agama	%	0	0	100%
		Angka kriminalitas	Angka	4344	5044	116,11%



Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan delapan sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (PMKS)”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat”; **sasaran ketiga** adalah “Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan”; **sasaran keempat** adalah “Meningkatnya Prestasi Olahraga Provinsi Kalsel”; dan **sasaran kelima** adalah “Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat”.

3.1

Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ” Meningkatkan Kesejahteraan Sosial PMKS” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 30 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (Data Dinas Sosial Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Tahun 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	%	0,50%	34,35%	27,76%	29,68%	25,40%	45%	33,50%	74,44%
Rata-rata Capaian										74,44%

Rumus Perhitungan

$$\text{Persentase PMKS yg terpenuhi} = \frac{\sum \text{PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada tahun (n))}}{\sum \text{Populasi PMKS di Kalsel Tahun (n-1)}} \times 100\%$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Berdasarkan perhitungan secara mandiri, pencapaian indikator Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 33,50% dari target 45%, sehingga persentase capaian Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar pada tahun 2021 sebesar 74,44%.





2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian Indikator Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada tahun 2021 meningkat sebesar 8,10% jika dibandingkan dengan capaian realisasi tahun 2020. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar 25,40% menjadi 33,50% ditahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan Permensos RI No. 8 Tahun 2012, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Se Indonesia ada 26 jenis, namun dari 26 Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tersebut tidak semua ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada Tahun 2021 ini jumlah PMKS Provinsi Kalimantan Selatan yang ditangani sebanyak 424.477 Orang dari beberapa jenis PMKS dibandingkan dengan populasi jumlah PMKS di Kalimantan Selatan tahun 2021 yaitu 1.266.719 Orang dan sudah tercapai sebesar 33,50% PMKS yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Pencapaian tersebut meningkat sebesar 8,10% jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020.

Pada tahun 2021 Sasaran PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar pada tabel 31 berikut ini:

Tabel 31 PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar

No.	Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah
1.	Fakir Miskin	19.340
2.	Lanjut Usia Terlantar	210
3.	Penyandang Disabilitas	150
4.	Anak Terlantar	511
5.	Korban Bencana Alam	395.701
6.	Korban Bencana Sosial	8.431
7.	Tuna Sosial	40
8.	Korban Tindak Kekerasan	6
9.	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	88
Jumlah		424.477

Upaya yang dilaksanakan:

- Memberikan bantuan sosial Pemenuhan kebutuhan pangan (Sembako), Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P), Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP-KUBE), dan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk fakir miskin di 13 kabupaten/kota se



Kalimantan Selatan sebanyak 19.340 orang.

- Memberikan Pelayanan, Pelatihan, dan Rehabilitasi Sosial untuk Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, dan Tuna Sosial melalui Panti Sosial (PSAA, PSBN, PSTW, PSBR, PSBW, Panti Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Panti Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial).
- Memberikan Pelatihan keterampilan berusaha seperti Hidroponik, Tata Boga, dan Babershop untuk PPKS diluar panti jenis Bekas Warga Binaan Masyarakat (BWBP), Kelompok Minoritas, dan Tuna Susila.
- Penyediaan Dapur umum (Pemberian bantuan Logistik berupa lauk pauk) untuk Korban bencana alam yaitu banjir, dan korban bencana sosial yaitu kebakaran.

Dalam pencapaian kinerja tersebut ada beberapa hambatan yang dihadapi yaitu Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah Kabupaten/Kota, kewenangan pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, lanjut usia terlantar, peyandang disabilitas terlantar, gelandangan dan pengemis terlantar melalui Panti Sosial. Terbatasnya kapasitas dan sarana prasarana Panti Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi menyebabkan jumlah kelima PPKS tersebut diatas yang seharusnya menerima pelayanan dan rehabilitasi sosial menjadi terbatas menyesuaikan dengan jumlah daya tampung Panti Sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi sedangkan jumlah populasi PPKS tersebut terus meningkat, mengingat permasalahan sosial merupakan permasalahan yang dinamis.

Rencana tindaklanjut:

- Penambahan Panti Sosial Multi Layanan pada bangunan eks. RSJ Tamban yang di tahun 2021 telah dilaksanakan proses perencanaan rehab bangunannya dan di 2022 rencana proses pembangunan/ rehab bangunannya serta berproses untuk operasional kegiatannya. Panti Sosial Multi Layanan ini akan memberikan pelayanan dan rehabilitasi





sosial bagi Penyandang disabilitas eks Psikotik (Orang dengan gangguan Jiwa) dan permasalahan sosial lainnya.

- Melakukan koordinasi lintas sektor dengan SKPD/Lembaga Terkait untuk optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PPKS dengan MoU/Kesepakatan Bersama. Di tahun ini sudah mulai berjalan MoU dengan BNN, Kemenag, UIN, Poltekes, dan PHRI. Dan sedang berproses kesepakatan Bersama dengan SKPD terkait.
- Melakukan Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan SKPD terkait optimalisasi penanganan kemiskinan melalui Puskesmas-SLRT (Pusat Kesejahteraan Sosial) sebagai *single window service*, berperan sangat strategis sebagai pusat koordinasi dan kerjasama multi pihak untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dalam pemecahan permasalahan kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a) Program Pemberdayaan Sosial.
- b) Program Rehabilitasi Sosial.
- c) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial .
- d) Program Penanganan Bencana.
- e) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

3.2

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:





Tabel 32 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (Sumber data Poldakalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Angka Konflik	Angka	0	0	0	0	0	0	0	100%
2	Angka Kriminalitas	Angka	-	6400	5696	5303	5158	4344	5044	116,11%
										108,05%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Angka Konflik

Pencapaian indikator Angka Konflik tahun 2020 terealisasi sebesar 0 kejadian sehingga untuk persentase capaian Angka Konflik pada tahun 2021 sebesar 100%.

b. Angka Kriminalitas

Pencapaian indikator Angka Kriminalitas tahun 2020 terealisasi sebesar 5044 dari target 4344, sehingga persentase capaian Angka Kriminalitas pada tahun 2021 sebesar 116,11%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Angka Konflik

Pencapaian indikator Angka konflik adalah 0 kejadian ditahun 2021 sama dengan pencapaian di tahun 2020. Dengan kata lain angka 0 kejadian ini mampu dipertahankan dari tahun-ketahun.

b. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kalimantan Selatan tahun 2021 lebih baik jika dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 angka kriminalitas sebanyak 5158 sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 5044, Indikator ini merupakan indikator negative, yang mana bila pencapaiannya semakin kecil semakin baik.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Angka Konflik

Konflik sosial di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun tidak pernah lagi terjadi. Penanganan konflik sosial lebih mengutamakan penanganan



secara preventif, artinya melakukan upaya-upaya pencegahan potensi terjadinya konflik sosial.

Penyelesaian konflik sosial di Kalimantan Selatan sebenarnya bukan lagi pada taraf “menyelesaikan”, namun sudah pada taraf “mempertahankan” agar tidak lagi terjadi konflik sosial. Selama beberapa tahun belum pernah lagi terjadi konflik sosial di masyarakat, namun masih banyak sekali ditemukan potensi konflik. Potensi inilah yang dideteksi dan ditangani oleh Provinsi Kalimantan Selatan agar tidak berubah menjadi konflik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat Kalimantan Selatan tetap rukun dalam bermasyarakat.

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Polda Kalimantan Selatan Bidang Direktorat Intelijen Keamanan dalam capaian penyelesaian konflik sosial di Kalimantan Selatan.

Hambatan dalam pencapaian:

Hasil data yang diperoleh harus menunggu dari Polres Kab/kota yang dihimpun melalui Polda Kalimantan Selatan.

Rencana Tindak Lanjut

Angka Konflik Sosial dapat terselesaikan melalui penyadaran ke masyarakat dengan sosialisasi tepat sasaran.

b. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 dapat dikatakan lebih baik dari tahun 2020. Meski tidak terlalu signifikan, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus optimis dalam mencapai target untuk mewujudkan misi Gubernur untuk Kalimantan Selatan yang AMAN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 33. Data Angka Kriminalitas di Kalsel Tahun 2021

NO	JENIS KASUS	L	S	TSK
1	KONVENSIONAL	3213	2493	984
2	TRANSNASIONAL	1434	1370	131
3	KEKAYAAN NEGARA	60	47	15
4	KONTINJENSI	0	0	0
Jumlah		4707	3910	1130





Table 34 Data Angka Kriminalitas di Kalsel Tahun 2020

NO	JENIS KASUS	L	S	TSK
1	KONVENSIONAL	4108	3079	2956
2	TRANSNASIONAL	1625	1609	2101
3	KEKAYAAN NEGARA	125	123	100
4	KONTINJENSI	1	1	1
Jumlah		5859	4812	5158

Sumber data : Polda Kalsel, 2021 dan 2021

Upaya yang dilaksanakan dengan melakukan Koordinasi dan Komunikasi bersama Polda Kalimantan Selatan Bidang Biro Operasional.

Hambatan dalam pencapaian adalah Hasil data yang diperoleh harus menunggu dari Polres Kab/kota yang dihimpun melalui Polda Kalimantan Selatan.

Rencana Tindak Lanjut dengan membuat rencana aksi dengan kelompok sasaran masyarakat dan SKPD terkait.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan dan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik.
- c. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat.
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.
- e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Peningkatan Penanganan Konflik Sosial.

3.3

Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut



Tabel 35 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021
(Sumber data BPS, dan Kemenpora)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	-	47,17	47,00	48,00	47,43	53	50,67	95,60%
2	Persentase Pemuda Mandiri	%	-	-	45	24,2	0,53	1,50%	18,95%	1263,33%
Rata-rata Capaian										

Tabel 36: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1	Indeks Pembangunan Pemuda	50,67	50,67	47,83	54,83	52,67	55,33	51,00	-
2	Persentase Pemuda Mandiri	18,95%	-	-	-	-	-	-	-

Rumus Perhitungan

- Indeks Pembangunan Pemuda
Perhitungan dilaksanakan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
- Persentase Pemuda Mandiri
Perhitungan dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Indeks Pembangunan Pemuda

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 50,67 dari target 53, sehingga persentase capaian Indeks Pembangunan Pemuda pada tahun 2021 sebesar 95,60%.

b. Persentase Pemuda Mandiri

Pencapaian indikator Persentase Pemuda Mandiri Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 18,95% dari target 1.50%, sehingga persentase capaian Persentase Pemuda Mandiri pada tahun 2021 sebesar 1263,33%.



2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Indeks Pembangunan Pemuda

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,24 jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 sebesar 47,43 menjadi 50,67 ditahun 2021.

b. Persentase Pemuda Mandiri

Pencapaian indikator Persentase Pemuda Mandiri Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 18,42% jika di bandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,53 menjadi 18,95% ditahun 2021, hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan perhitungan yang digunakan.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Indeks Pembangunan Pemuda

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Pemuda Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,24 jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 sebesar 47,43 menjadi 50,67 ditahun 2021 dan menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan pada posisi ke 21 secara nasional.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan IPP adalah

- Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait dalam penilaian IPP dengan pembentukan Tim Pokja IPP.
- Melibatkan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan kepemudaan seperti: sarjana pemuda penggerak pembangunan Pendidikan, pekan pemuda lingkungan asri dan bersih, dan pelatihan satgas bencana bagi pemuda.
- Melakukan pembinaan kepada organisasi pemuda diantaranya bimtek pengelolaan keuangan bagi organisasi kepemudaan, bimtek pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda.
- Meningkatkan kapasitas kepemudaan dalam rangka pengembangan kepemudaan melalui kegiatan pendukung lainnya seperti pelatihan



kepemimpinan, seleksi dan pembentukan tim paskibraka kalsel, kepeloporan pemuda daerah, jambore pemuda remaja masjid, pelatihan manajemen dakwah pemuda remaja masjid santri pondok pesantren, dan lainnya.

Adapun Hambatan dalam pencapaian IPP adalah

- Fasilitasi pemberdayaan pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan masih kurang.
- Belum maksimalnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan khususnya perihal pengkaderan pemuda dalam berorganisasi.
- Pengembangan karakteristik kepemimpinan pemuda belum maksimal.
- Pelaksanaan *Crosscutting* belum dapat berjalan dengan baik.
- Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari penilaian IPP oleh Pemerintah Pusat.

Rencana kedepannya dalam rangka peningkatan nilai Indeks Pembangunan Pemuda adalah

- Membuat program kegiatan prioritas yang mengarah kepada pemberdayaan pemuda di kegiatan sosial kemasyarakatan namun tetap memperhatikan kemampuan pendanaan daerah dan SKPD.
- Memaksimalkan fungsi Organisasi Kepemudaan melalui pembinaan terhadap OKP.
- Membuat program kegiatan prioritas yang mengarah kepada pengembangan kepemimpinan pemuda dengan tetap memperhatikan kemampuan pendanaan daerah dan SKPD.
- Meningkatkan koordinasi lintas sectoral dengan SKPD lain khususnya terkait data yang ada di SKPD lain.
- Melaksanakan evaluasi secara bersama khususnya terhadap capaian indikator yang masih dibawah angka nasional.

b. Persentase Pemuda Mandiri

Pencapaian indikator Persentase Pemuda Mandiri Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 18,42% jika di bandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,53 menjadi 18,95% ditahun 2021, hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan perhitungan yang digunakan.



Adapun upaya yang telah dilaksanakan adalah

- Memberikan pelatihan kewirausahaan bagi Pemuda.
- Memberikan bantuan modal wirausaha bagi Kelompok Usaha Pemuda Produktif.
- Melaksanakan pelatihan-pelatihan lainnya bagi pemuda dalam rangka meningkatkan kreatifitas dan inovasi pemuda.

Hambatan dalam pencapaian adalah

- Persaingan dunia usaha yang ketat.
- Kurangnya inovasi dan kreatifitas pemuda dalam menciptakan jenis usaha baru.
- Modal usaha yang terbatas bagi kelompok usaha pemuda produktif yang baru merintis usaha.
- Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha bagi kelompok usaha baru.
- Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari capaian nilai indikator pada IPP.
- Pelaksanaan *crosscutting* belum dapat berjalan dengan baik.
- Tidak adanya pendataan secara mandiri, sehingga penilaian hanya bergantung terhadap hasil dari capaian nilai indikator pada IPP.

Rencana tindaklanjut dalam rangka peningkatan adalah

- Memperbanyak kualitas dan kuantitas pelatihan kewirausahaan pemuda dalam rangka mempersiapkan mental berwirausaha.
- Memberikan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kreativitas dan inovasi bagi pemuda khususnya di era teknologi 4.0.
- Peningkatan kuantitas penerima bantuan bagi kelompok usaha baru.
- Menjalin Kerjasama (*crosscutting*) dengan dinas terkait terkait seperti Dinas Koperasi dan UMKM Prov. Kalsel dan Disnakertrans Prov. Kalsel.
- Pengumpulan data secara mandiri melalui Monev.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:





- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- b. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

3.4

Meningkatnya Prestasi Olahraga Provinsi Kalsel

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Prestasi Olahraga Provinsi Kalsel" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 37: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (Dispora Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Medali Pada Event Olahraga Tingkat Nasional	Angka	-	-	-	57	-	50	45	90,00%
Rata-rata Capaian									90,00%	

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Jumlah Medali Pada Event Olahraga Tingkat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 45 dari target 50 sehingga persentase capaian indikator Jumlah Medali Pada Event Olahraga Tingkat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 90,00%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Jumlah Medali Pada Event Olahraga Tingkat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 tercapai sebanyak 45 medali. tidak dapat dibandingkan dengan capaian ditahun 2020 dikarenakan semua rencana kejuaran tingkat nasional yang diselenggarakan pada tahun 2020 ditunda pelaksanaannya sehubungan dengan adanya Pandemi Covid-19 yang terjadi disepanjang tahun 2020.





3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Setelah mengalami penundaan pelaksanaan PON dan PEPARNAS pada tahun 2020 yang lalu, pada tahun 2021 pelaksanaan PON dan PEPARNAS kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan yang ditunjuk sebagai tuan rumah yaitu Provinsi Papua. Pada tahun 2021 Jumlah Medali Pada Event Olahraga Tingkat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 tercapai sebanyak 45 Medali. Pencapaian ini dapat dikatakan sangat membanggakan khususnya untuk kejuaraan PEPARNAS dimana para atlet berkebutuhan khusus kalsel berhasil menyumbangkan 41 Medali emas dan berhasil meraih posisi ke - 4 secara nasional, sedangkan pada kejuaraan PON tahun ini mengalami penurunan prestasi dimana para atlet kalsel hanya mampu memperoleh 4 Medali emas dan meraih posisi ke – 22 secara nasional.

Upaya yang dilaksanakan dalam meningkatkan perolehan medali pada setiap event olahraga ditingkat Nasional adalah

- Melaksanakan pelatihan intense bagi atlet yang terseleksi untuk mewakili Kalsel.
- Fasilitasi sarana tanding cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
- Peningkatan kualitas tenaga keolahragaan.
- Standarisasi prasarana olahraga yang menjadi aset Dispora Kalsel.
- Fasilitasi partisipasi atlet dan tenaga keolahragaan pada Kejuaraan Nasional.

Hambatan dalam pencapaian adalah

- Masih kurangnya pembinaan atlet khususnya terhadap atlet PON.
- Kurangnya optimal pelaksanaan seleksi atlet pada Kejurnas Olahraga khususnya atlet PON.

Rencana Kedepannya adalah

- Melaksanakan pembinaan khususnya pembibitan atlet baru melalui PPLP.
- Melaksanakan pelatihan terhadap pelatih dan tenaga keolahragaan.
- Mendorong kabupaten/kota untuk masing – masing memiliki satu cabang olahraga unggulan.





4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
- Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

3.5

Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat

Keberhasilan Capaian Kinerja Atas Sasaran " Meningkatkan Ketahanan Budaya Dan Kualitas Seni Masyarakat " Diukur Melalui 1 Indikator Dengan Target, Realisasi Dan Capaiannya Sebagai Berikut:

Tabel 38 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021
Direktorat Jenderal Kebudayaan
pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indek	-	-	53,79	56,79	57,13	45	58,64	130,31%
Rata-rata Capaian									130,31%	

Rumus Perhitungan

Indeks Pembangunan Kebudayaan diperoleh dengan cara menghitung nilai indikator dengan mengasumsikan bobot masing-masing indikator sama, sehingga persamaan yang digunakan sebagai berikut:

Persamaan 1 :

$$Indeks D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) * 100$$

Keterangan :

SX_{ji} adalah nilai indikator i pada dimensi ke- j yang sudah dinormalisasi

n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke- j

$Indeks D_j$ adalah indeks Dimensi ke- j





Selanjutnya nilai IPK dihitung dengan cara menghitung indeks dimensi dan menambahkan pembobotan untuk masing-masing dimensi. Sehingga penghitungan IPK mempertimbangkan bobot masing-masing dimensi. Penghitungan menggunakan persamaan 2.

Persamaan 2 :

$$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j * Indeks D_j)$$

Keterangan :

IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan

D_j adalah Dimensi ke-*j*

W_j adalah Bobot Dimensi ke-*j*

Nilai akhir dari hasil penghitungan IPK dalam Persamaan 2 digunakan untuk mengukur IPK Indonesia baik tingkat nasional, maupun provinsi

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 58,64 dari target 45 sehingga persentase capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sebesar 130,31%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1,51 dari 57,13 ditahun 2020 menjadi 58,64 ditahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan



pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan Indeks ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pada tahun 2021 realisasi Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah 58,64% dari target sebesar 45,00%. Jika dibandingkan dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021, maka indikator ini telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan persentase capaian kinerja sebesar 130,31%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 57,13%, maka terdapat peningkatan sebesar 1,51.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- Optimalisasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi masyarakat umum dan berkebutuhan khusus yang mana berdampak pada peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Tingkat Partisipasi Sekolah Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (Bobot Dimensi).
- Optimalisasi Peningkatan Kuantitas dan Kompetensi Guru pada Kurikulum Muatan Lokal (Bobot Dimensi 1).
- Penetapan Warisan Budaya ditingkat Nasional (Bobot Dimensi 4).
- Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Selatan (Bobot Dimensi 4).
- Pergelaran Event Kesenian (Bobot Dimensi 4).
- Perlindungan dan Promosi Objek bersejarah (Bobot Dimensi 4).
- Pemeliharaan sarana dan prasarana museum (Bobot Dimensi 4).

Hambatan dalam pencapaian adalah:

- Budaya Masyarakat yang masih banyak melakukan pernihaan dini (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).





- Mindset Masyarakat bahwa bekerja membantu orang tua lebih menguntungkan karena mendapatkan uang (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).
- Kesejahteraan Keluarga/faktor ekonomi masyarakat masih relatif rendah (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).
- Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah. Dimana keberadaan mereka tidak bisa dimasukkan dalam Pendataan Pendidikan (Dapodik) karena tidak memiliki NISN (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).
- Masih banyaknya masyarakat yang tidak menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus (dianggap sebagai aib keluarga) (menghambat optimalisasi AHLS dan ARLS / bobot dimensi 1).
- Keterbatasan kajian akademis untuk penetapan WBTB Indonesia (menghambat optimalisasi bobot dimensi 4).
- Keterbatasan tim ahli cagar budaya (menghambat optimalisasi bobot dimensi 4).
- Adanya wabah Covid-19 yang mana berpengaruh terhadap pergelaran event pertunjukan kesenian (menghambat optimalisasi bobot dimensi 4).

Adapun **rencana tindak lanjut** dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan ini adalah:

- Melakukan Sosialisasi Program Wajib Belajar 12 tahun (optimalisasi bobot dimensi 1).
- Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (optimalisasi bobot dimensi 1).
- Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan secara efektif dan maksimal (optimalisasi bobot dimensi 1).
- Optimalisasi penerapan SMA Terbuka (optimalisasi bobot dimensi 1).
- Optimalisasi Pendidikan Penyetaraan Paket C (optimalisasi bobot dimensi 1).
- Optimalisasi Pembangunan Fasilitas Pendidikan di daerah 3T (optimalisasi bobot dimensi 1).



- Perlu adanya kerjasama dengan akademisi dan lembaga untuk kajian akademis (optimalisasi bobot dimensi 4).
- Membentuk tim cagar budaya setiap tahun nya (optimalisasi bobot dimensi 4).
- Promosi Objek berserajah secara masif (optimalisasi bobot dimensi 4).

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

1. Program Pengembangan Kebudayaan.
2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional.
3. Program Pembinaan Sejarah.
4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya.
5. Program Pengelolaan Permuseuman.

MISI IV

MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk “Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh Wilayah Sesuai Dengan Tata Ruang”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 39 : Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh Wilayah Sesuai Dengan Tata Ruang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	71,0 – 71,8	71,28	100,39%
		Pertumbuhan Ekonom	%	4,50-5,03	3,48	77,33%



Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan satu sasaran, yaitu “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan”

4.1

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan” diukur melalui 5 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 40 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021
(Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas	%	-	57,86%	63,83%	69,27%	75,01%	70,89%	79,62%	112,31%
2	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	%	-	80,00%	80,50%	74,90%	79,75%	82%	79,75%*	97,25%
3	Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik	%	-	-	76,70%	76,89%	77,02%	77,17%	77,17%	100%
4	Rasio Elektrifikasi	%	88,34%	92,12%	97,36%	99,27%	99,25%	95,5%	99,35%	104,03%
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang transportasi	Indeks	75,00	76,00	78,40	80,25	81,15	81,25	77,50	95,38%
Rata-rata Capaian										

Keterangan: *angka 2020

Tabel 41 Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas ESDM dan Dinas Perhubungan)

No.	Indikator Kinerja	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional
1	Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas	79,62%	-	-	-	-	-	-
2	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	79,75%	-	-	-	-	-	-



No.	Indikator Kinerja	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional
3	Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik	77,17%	-	-	-	-	-	-
4	Rasio Elektrifikasi	99,35 Des 2021	96.20	97	95.03 Juli 2021	95.03 Juli 2021	100	99,39 TW III 2021
5	Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang transportasi	77,50					85	83

Rumus Perhitungan

- Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas:
 - Persentase Realisasi Kinerja Tiga Unsur Kekaryaannya (Sumber Daya Air, Bina Marga dan Cipta Karya) terhadap masing masing target kinerjanya (berdasarkan Keputusan Menteri P.U. No.150/A/KPTS/1966)
 - $x = ((\text{realisasi kinerja BM} \times \text{bobot}) + (\text{realisasi kinerja SDA} \times \text{bobot}) + (\text{realisasi kinerja CK} \times \text{bobot})) / (50 + 20 + 30)$
- Persentase Kesesuaian Tata Ruang
 - Menghitung kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pola ruang,
 - Menghitung kesesuaian pembangunan jaringan sarana dan prasarana dengan rencana struktur ruang
- Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik

$$= \frac{\text{Luasan perumahan permukiman dan PSU dalam kondisi baik}}{\text{Total luas permukiman prov. kalsel}} \times 100$$
- Rasio Elektrifikasi = $\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Berlistrik}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga}} \times 100$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas

Pencapaian indikator Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 79,62% dari target 70,89%, sehingga persentase capaian Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas pada tahun 2021 sebesar 112,31%.





b. Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai dengan laporan kinerja ini di susun belum dapat dicapai. Namun jika menggunakan data tahun 2020 indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mengalami terealisasi sebesar 79,75% dengan target ditahun 2021 sebesar 82% sehingga persentase capaiannya sebesar 97,25%.

c. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik

Pencapaian indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 77.17% dari target 77,17%, sehingga persentase capaian Persentase Kesesuaian Tata Ruang pada tahun 2021 sebesar 100%.

d. Rasio Elektrifikasi

Pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 99,35% dari target 95,5%, sehingga persentase capaian Rasio Elektrifikasi pada tahun 2021 sebesar 104,03%.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi

Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 77,50 dari target 81,25, sehingga persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi pada tahun 2021 sebesar 95,38%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas

Pencapaian Indikator Persentase ke-PU an Yang Berkualitas pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,61% jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 sebesar 75,01% menjadi 79,62% di tahun 2021.





b. Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai dengan laporan kinerja ini di susun belum dapat dicapai. Namun jika menggunakan data tahun 2020 indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,85% dari 74,90% ditahun 2019 menjadi 79,75% ditahun 2020

c. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik

Pencapaian Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,15 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 77,02% menjadi 77,17% ditahun 2021.

d. Rasio Elektrifikasi

Pencapaian Ratio Elektrifikasi pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan mengalami peningkatan sebesar 0,10% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 99,25% menjadi 99,35% ditahun 2021.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi

Capaian realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi pada tahun 2021 terealisasi sebesar 77,50 dimana capaian realisasi ini mengalami penurunan sebesar 3,65 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang berada pada angka 80,15.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas

Pencapaian Indikator Persentase Infrastruktur ke-PU an Yang Berkualitas pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,61% jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020. Adapun pencapaian ditahun 2020 sebesar 75,01% menjadi 79,62% ditahun 2021. Indikator ini diwakili oleh SP.1 dengan indikator Irigasi dalam Kondisi Baik dengan realisasi sebesar 53,63% dari target 40,50%, SP.2 dengan indikator Jalan Kondisi Mantap dengan target sebesar 76% dan realisasi indikator sebesar 81,42%, dan SP.3



dengan indikator Cakupan Pelayanan Air Minum dengan realisasi 83,02% dari target 85,49%, Cakupan Pelayanan Air Limbah dengan realisasi 86,85% dari target 62,33% serta realisasi indikator Persentase Sarana dan Prasarana Publik dan Aparatur dalam Kondisi Baik sebesar 112,5% dari target 100%.

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator tersebut adalah dengan:

- Membentuk SATGAS Pencegahan COVID-19 yang dibentuk oleh setiap PPTK proyek yang beranggotakan pengguna jasa dan penyedia jasa.
- Melakukan lelang dini agar proyek konstruksi bisa selesai tepat waktu.
- Melakukan pemantauan proyek secara berkala dengan menerapkan protokol kesehatan.

Hambatan/masalah dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

- Proses lelang di Dinas PUPR mengalami sedikit keterlambatan terkait verifikasi dokumen dikarenakan adanya pembatasan orang masuk, physical distancing, sehingga ruang gerak pokja/panitia lelang menjadi terbatas akibat dampak dari COVID-19.
- Proses lelang di Dinas PUPR mengalami sedikit keterlambatan terkait verifikasi dokumen dikarenakan adanya pembatasan orang masuk, physical distancing, sehingga ruang gerak pokja/panitia lelang menjadi terbatas akibat dampak dari COVID-19.
- *Physical Distancing*, penggunaan masker dan Pembatasan sosial berskala besar berpengaruh pada distribusi barang dan tenaga kerja serta penyediaan faskes dilokasi proyek juga berpengaruh pada biaya konstruksi yang semakin meningkat.
- Wabah covid-19 juga akan berpengaruh pada waktu pelaksanaan pekerjaan.
- Kondisi alam yang tidak menentu.
- Terkendala pembebasan lahan yang memakan waktu lama karena ada beberapa penolakan dari masyarakat.





Rencana tindaklanjut:

- Dengan mengikuti Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Protokol Pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan menjadikan dasar pelaksanaan konstruksi di tengah wabah COVID-19 ini.
- Mengamati perkembangan yang ada agar dapat mengakomodasi pelaku usaha jasa konstruksi di tengah pandemi COVID-19, memaksimalkan pelatihan peningkatan ahli jasa konstruksi terhadap Sumber Daya Manusia lokal, serta pembayaran pembebasan tanah dilakukan melalui pengadilan.

b. Persentase Kesesuaian Tata Ruang

Pencapaian indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai dengan laporan kinerja ini di susun belum dapat dicapai. Namun jika menggunakan data tahun 2020 indikator Persentase Kesesuaian Tata Ruang Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,85% dari 74,90% ditahun 2019 menjadi 79,75% ditahun 2020.

Upaya yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator tersebut adalah dengan:

- Sosialisasi NSPK Penataan Ruang.
- Pengumpulan data dan informasi RTRW Kabupaten dan Kota meliputi Peraturan Daerah, Materi Teknis dan Peta.
- Melaksanakan kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten-kota.

Hambatan/masalah dalam pencapaian indikator tersebut adalah:

- Ketidak sesuaian rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
- Pembangunan seringkali tidak sesuai dengan peruntukan lahannya.
- Kebutuhan ruang yang meningkat, namun tidak diikuti dengan ketersediaan lahan.

Rencana tindaklanjut sebagai acuan untuk langkah kedepan antara lain revisi RTRW untuk mengakomodir dinamika pembangunan serta sinkronisasi kegiatan pembangunan dengan rencana tata ruang.





c. Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik

Pencapaian Indikator Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan Dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,15 jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2020 sebesar 77,02% menjadi 77,17% ditahun 2021.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari **upaya-upaya** yang telah dilaksanakan, yaitu

- Pengendalian kebijakan urusan perumahan dan kawasan permukiman.
- Memfasilitasi peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada perumahan swadaya.
- Melakukan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dan penanganan sarana, prasarana utilitas permukiman di Kalimantan Selatan.
- Melakukan penyusunan Perda RP3KP Penyediaan Permukiman dan kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan.
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait baik Pusat, Provinsi, Kab./Kota serta swasta.

Hambatan/kendala terhadap pencapaian indikator kinerja tersebut diatas adalah:

- Data pembangunan rumah yang dianalisis belum tersedia secara akurat, karena data yang tersedia hanya rumah yang dibangun pengembang, sedangkan data pembangunan rumah secara pribadi dan swadaya belum tersedia dengan baik
- Target penanganan kawasan permukiman kumuh masih tertangani
- Belum lengkapnya data PSU kawasan permukiman lintas Kabupaten/Kota
- Belum seluruh Kab./Kota mempunyai regulasi terkait penanganan perumahan dan kawasan permukiman





Rencana tindaklanjut yang akan dilakukan agar pencapaian indikator kinerja lebih maksimal:

- Intensifikasi koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan.
- Upaya penataan lingkungan dan pemenuhan prasarana, sarana dan utilias umum di kawasan permukiman.
- Kerjasama antar instansi pemerintah daerah dalam penanganan prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman.
- Melakukan sosialisasi dan pembinaan terkait pentingnya regulasi tentang penanganan perumahan dan kawasan permukiman kepada Kabupaten/Kota.

d. Rasio Elektrifikasi

Rasio Elektrifikasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 99,35% dimana realisasi Rasio Elektrifikasi **mengalami peningkatan** sebesar 0,10% jika dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 99,25%. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan data rumah tangga yang belum berlistrik yang telah dihimpun melalui survey desa belum berlistrik pada kegiatan Pengembangan Listrik Pedesaan Tahun Anggaran 2021 serta kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi Listrik untuk Rumah Tangga Miskin di 4 (empat) Kabupaten dengan total bantuan sebanyak 800 instalasi. Data terkini dan validasi data rumah tangga serta Desa/Dusun yang belum berlistrik ini sangat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan persentase Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun upaya yang telah dilakukan mencapai capain tersebut adalah

- Berkoordinasi dengan pihak Dirjen Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM RI.
- Mengumpulkan dan menginventarisasi rumah tangga miskin belum berlistrik.
- Memverifikasi usulan-usulan daerah terkait permohonan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin.





- Menyiapkan anggaran (dana) untuk pengadaan dan pemasangan instalasi untuk rumah tangga miskin.
- Berkoordinasi dengan pihak PT. PLN Kalselteng Persero dalam hal rasio elektrifikasi.
- Inovasi e-SIKMAS (Sistem Ketenagalistrikan Masyarakat).
- Berkoordinasi dengan DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal Rekomendasi Teknis Perizinan ketenagalistrikan.
- Pelayanan Perizinan Ketenagalistrikan.
- Berkoordinasi bersama Perusahaan penyedia layanan ketenagalistrikan dalam hal data perizinan ketenagalistrikan.
- Berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan perizinan ketenagalistrikan.
- Pengawasan Perizinan Ketenagalistrikan terhadap Pemilik Pembangkit
- Pengawasan K2 Ketenagalistrikan terhadap Pemilik Pembangkit

Hambatan dalam Pencapaian adalah

- Lokasi yang sulit dijangkau serta rumah-rumah penduduk yang tersebar sehingga sulit untuk mendata secara detail.
- Masih ada rumah tangga miskin belum berlistrik yang belum masuk data Basis Data Terpadu (BDT)
- Pengurangan anggaran dana akibat pandemic covid-19
- Kurangnya tenaga teknis S-1 elektro/listrik untuk mendukung pekerjaan rutin di Seksi Usaha Pengusahaan Ketenagalistrikan
- Peralatan penunjang lapangan belum mencukupi sehingga cukup mempengaruhi kelancaran kegiatan di lapangan
- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya masih belum maksimal
- Pihak perusahaan masih banyak yang belum mengetahui dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan khususnya kewajiban tentang Sertifikat Kompetensi bagi Tenaga Teknik, Ijin Operasi (IO)/Surat Tanda Laport dan Sertifikat Laik Operasi (SLO) Pembangkit





- Masih ada pemilik genset yang belum memenuhi ketentuan yang tertuang dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan.
- Terdapat perusahaan Jasa Penyedia Tenaga listrik yang perizinan, SBU dan Serkom Tenaga Tehniknya sudah habis masa berlakunya
- Koordinasi dengan Kabupaten/Kota serta instansi terkait lainnya masih belum maksimal
- Keikutsertaan personil seksi pada Diklat-Diklat Teknis masih sangat terbatas
- Masih banyak perusahaan khususnya dalam mengelola K2 yang belum dilaksanakan secara optimal
- Kurangnya pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan K2 dan lingkungan sekitar pembangkit
- Masih banyaknya temuan pada perusahaan Non PLN yang belum melengkapi ketentuan-ketentuan peraturan yang berkaitan dengan K2 dan lingkungan (umumnya temuan rata-rata berkaitan dengan rambu-rambu, perijinan, sertifikat kompetensi, sertifikat laik operasi dan lingkungan pembangkit yang kurang kebersihannya).

Rencana Tindaklanjut

- Kerja sama antara Dinas ESDM dengan Pemerintah Kabupaten (Desa dan Kecamatan) lebih ditingkatkan.
- Untuk mendapatkan data yang update akan dilakukan koordinasi dengan dinas terkait (Bappeda dan Dinas Sosial)
- Pengusulan kembali anggaran dana untuk kegiatan pengadaan dan pemasangan instalasi listrik untuk rumah tangga miskin
- Perlu dilakukan sosialisasi tentang regulasi ketenagalistrikan terbaru.
- Mengikutsertakan personil dalam kursus-kursus maupun diklat-diklat keterampilan yang berkaitan dengan ketenagalistrikan.
- Memprioritaskan kesempatan untuk mengikuti Diklat Teknis Ketenagalistrikan.
- Diberikannya kesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar maupun bimbingan teknis dan sejenisnya tentang Ketenagalistrikan dan Energi



Baru Terbarukan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- Penambahan tenaga personil yang sesuai dengan bidang listrik, untuk mengisi kekosongan yang ada.
- Menjelaskan, menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat/pemilik izin, untuk segera memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam undang-undang Nomor 30 Tahun 2009.
- Untuk mengatasi terdapatnya perusahaan jasa penyedia tenaga listrik yang telah habis masa berlakunya, maka akan diberikan arahan untuk segera mengurus ke lembaga yang menanganinya.
- Diberikannya kesempatan mengikuti kegiatan sosialisasi, seminar maupun bimbingan teknis dan sejenisnya tentang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

e. Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi

Capaian realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi pada tahun 2021 terealisasi sebesar 77,50 dimana capaian realisasi ini mengalami penurunan sebesar 3,65 poin jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang berada pada angka 80,15.

Adapun upaya yang dilaksanakan:

- Pengoperasian Bus rapid Transit (BRT) secara optimal untuk memenuhi *demand* masyarakat terhadap kebutuhan transportasi yang nyaman aman, murah dan ramah terhadap gender.
- Optimalisasi rekomendasi izin trayek-trayek yang dalam kewenangan provinsi yang ada di Kalimantan selatan.
- Memasang dan memelihara fasilitas keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
- Memelihara alur sungai untuk kelancara transportasi.
- Melakukan pengawasan terhadap angkutan barang yang melakukan over dimension and over loading.
- Meningkatkan pelayanan terminal tipe B.





Hambatan dalam pencapaian:

- Kondisi Masyarakat pada tahun 2021 yang masih dalam keadaan pandemi covid 19 masih ragu untuk menggunakan angkutan umum
- Adanya aturan pembatasan penumpang BRT maksimal 12 orang dalam bus sudah termasuk driver dan pembantu driver
- Belum terjangkaunya trayek AKDP sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- Pengaturan terhadap kelancaran AKDP pada terminal tipe B

Rencana tindak lanjut:

- Mengoperasikan Bus Rapid Transit (BRT) sesuai dengan protokol kesehatan sehingga mewujudkan sarana transportasi yang nyaman, aman, murah dan ramah terhadap gender. Menjaga ketepatan waktu jadwal Bus Rapid Transit (BRT) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan serta menetapkan titik henti yang menjadi kebutuhan masyarakat.
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas izin angkutan dalam trayek di Kalimantan Selatan untuk memastikan bahwa angkutan orang dalam trayek kewenangan provinsi yang beroperasi telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan Kartu Pengawasan (KP) angkutan orang dalam.
- Mewujudkan keselamatan pengguna transportasi salah satunya didukung oleh perlengkapan keselamatan jalan yang terpasang dan terpelihara. Pemasangan perlengkapan keselamatan jalan di ruas jalan provinsi terdiri dari pemasangan PJU *smart system*, traffic light pada persimpangan jalan yang rawan kecelakaan, pemasangan rambu jalan dan pengecatan rambu jalan. Selain di pasang, perlengkapan keselamatan jalan juga dilakukan secara berkala untuk menjaga fungsi dari perlengkapan keselamatan jalan tersebut.
- Melaksanakan pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan yang ada di Kalimantan selatan untuk kelancaran dan kenyamanan alur pelayaran.
- Pengaturan terhadap AKDP yang keluar masuk terminal tipe B dan penarikan retribusi pada AKDP yang masuk terminal tipe B.





- Melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap angkutan yang over dimension and over loading (ODOL) untuk kelancaran arus lalu lintas dan kesesuaian penggunaan jalan di Kalimantan selatan. Kegiatan pengawasan dan penertiban ini dilaksanakan lintas sektor yaitu dengan POLRI, TNI dan dinas perhubungan Kab/Kota.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air.
- b. Program Penyelenggaraan Jalan.
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem.
- d. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah.
- e. Program Penataan Bangunan Gedung.
- f. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.
- g. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- h. Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- i. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
- j. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Program Penatagunaan Tanah.
- k. Program Pengaturan Jasa Konstruksi.
- l. Program Pengembangan Perumahan.
- m. Program Kawasan Permukiman.
- n. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).
- o. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
- p. Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara
- q. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- r. Program Pengelolaan Pelayaran.





MISI V

MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian.
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indikator Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN serta Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 42: Capaian Terhadap Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021

No.	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Tahun 2021		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan Daya Saing Perekonomian	Pertumbuhan Ekonomi	Nilai	4,50 – 5,03	3,48	77,33%
		Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rupiah	14,4	12,71	88,26%
2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	70,6	71,03**	100,60%

Catatan:: ** Perhitungan Mandiri Dinas LH

Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan enam sasaran, yaitu **sasaran pertama** adalah “Meningkatnya Perekonomian Daerah”; **sasaran kedua** adalah “Meningkatnya Perekonomian Sektor-Sektor Unggulan”; **sasaran ketiga** adalah “Terwujudnya Mandiri Pangan”; **sasaran keempat** adalah “Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian”; dan **sasaran kelima** adalah “Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan”.





5.1 Meningkatnya Perekonomian Daerah

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Perekonomian Daerah" diukur melalui 2 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 43: Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (data BPS)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel	%	4,40	5,28	5,08	4,09	-1,82	4,50-5,03	3,48	77,33%
2.	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	11 307.00	11 600.000	12.062.000	12.253.000	12 032.000	11.111.006	12.143.000	109,28%
Rata-rata Capaian										93,30%

Tabel 44 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (data BPS)

No	Indikator	Perbandingan					
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Realisasi Nasional
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel	3,48	3,40	4,78	2,48	3,98	3,69
2.	Pengeluaran Perkapita	12.143.000	11.182.000	8.974.000	12.116.000	9.075.000	11.156.000

Rumus Perhitungan:

- Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel

$$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$$

Dimana :

- PE = Pertumbuhan Ekonomi
 PDB = Produk Domestik Bruto
 T = Periode Tertentu
 t-1 = Periode sebelumnya





- Pengeluaran Perkapita

$$Y^{**} = \frac{Y^*}{PPP}$$

$$Y^* = \frac{Y}{IHK} \times 100$$

dimana:

Y^{**} = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan

Y^* = Pengeluaran per kapita harga konstan

Y = Pengeluaran per kapita setahun

IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel

Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel tahun 2021 terealisasi sebesar 3,48% dari target 4,50,5,03% sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel pada tahun 2021 sebesar 77,33%.

b. Pengeluaran Perkapita

Pencapaian indikator Pengeluaran Perkapita Prov. Kalsel tahun 2021 terealisasi sebesar Rp 12.143.000 dari target Rp 11.111.006 sehingga persentase capaian Pengeluaran Perkapita Prov. Kalsel pada tahun 2020 sebesar 109,28%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel

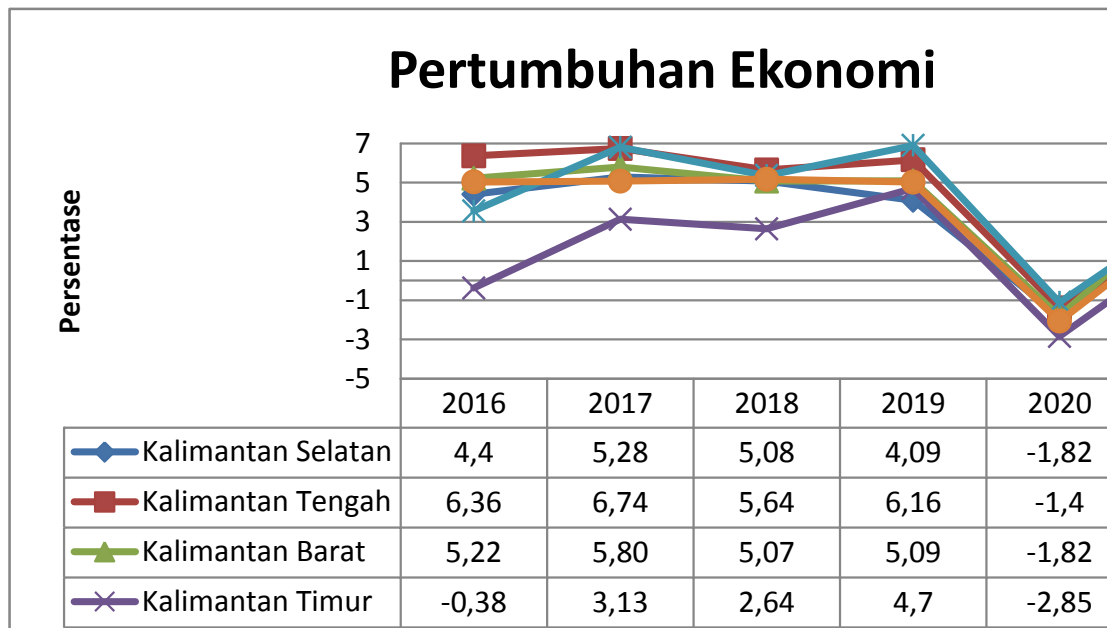
Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021 (c-to-c) mengalami pertumbuhan sebesar 3,48% ditahun 2021 dibanding tahun 2020 yang mengalami kontraksi sebesar -1,82%.

Perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:





Grafik 13 : Pertumbuhan Ekonomi



Pada tingkat regional, Pertumbuhan Ekonomi semuanya mulai membaik sejak terjadinya pandemi covid-19 selama tahun 2020. Berdasarkan data BPS pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di Provinsi Kalimantan Barat disusul Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

b. Pengeluaran Perkapita

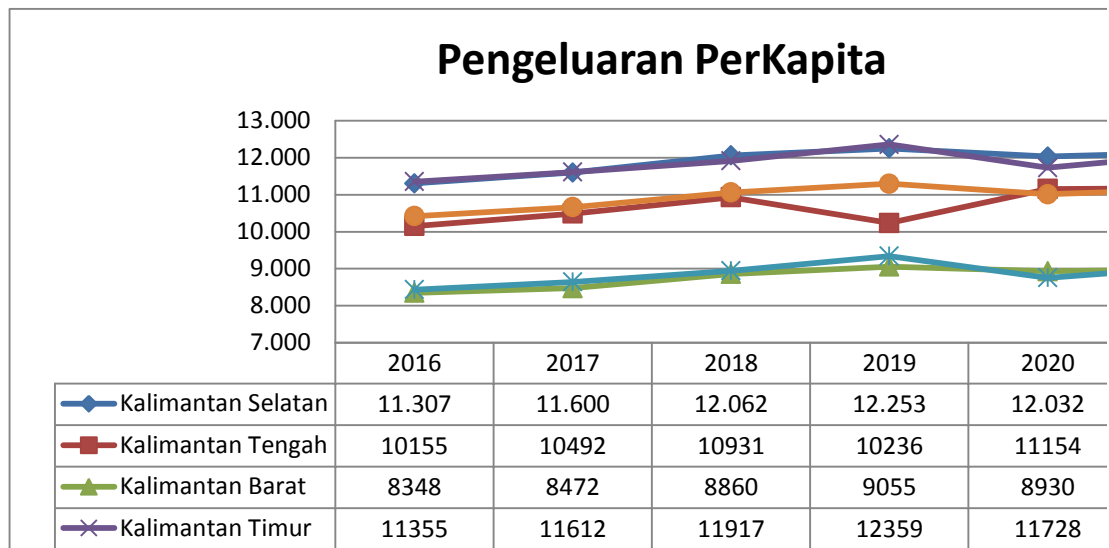
Pencapaian Indikator ini pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 111.000 jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 sebesar Rp 12.032.000 menjadi Rp 12.143.000 ditahun 2021.

Perkembangan indikator Pengeluaran Perkapita Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 dapat dilihat dari grafik berikut ini:





Grafik 14 : Pengeluaran Perkapita



Berdasarkan tabel diatas Pengeluaran PerKapita tahun 2021 menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada tahun 2020 mengalami penurunan.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,48 persen. Pertumbuhan positif terjadi pada seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan tertinggi adalah Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,89 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,22 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 6,23 persen. Adapun lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan terendah adalah Jasa Lainnya sebesar 1,16 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,16 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,19 persen. Sedangkan jika dilihat dari komponen pengeluaran, hampir semua komponen pengeluaran tumbuh positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 19,02 persen diikuti oleh Komponen PK-P sebesar 3,56 persen, Komponen PK-LNPRT sebesar 1,10 persen; Komponen PMTB sebesar 0,83 persen; dan Komponen PKRT sebesar 0,79 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 21,01 persen.



Adapun **upaya-upaya yang telah dilakukan** adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Industri, Perdagangan, Pertanian, Kehutanan, Perikanan Dan Pariwisata
 - Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
 - Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - Penanganan Kerawanan Pangan
 - Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
 - Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - Perizinan Usaha Pertanian
 - Pengelolaan Perikanan Tangkap
 - Pengelolaan Perikanan Budidaya
 - Perencanaan Dan Pembangunan Industri
 - Pengendalian Izin Usaha Industri
 - Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
 - Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
 - Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pengembangan Ekspor
 - Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
 - Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 - Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
 - Pemasaran Pariwisata
 - Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
 - Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
 - Pengelolaan Hutan
 - Peningkatan kunjungan wisnus dan wisman
- Meningkatkan Investasi Yang Berdampak Ke Daerah
 - Pengembangan Iklim Penanaman Modal
 - Promosi Penanaman Modal
 - Pelayanan Penanaman Modal
 - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal





- Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- Peningkatan Bumd Daerah
- Kemudahan perizinan

Hambatan yang dihadapi adalah sebagian besar sektor perekonomian di Kalsel di dominasi oleh sektor tambang. Sektor tambang sangat dipengaruhi oleh pasar global, sehingga Ketika harga komoditas seperti batubara naik dan permintaan terhadapnya meningkatkan maka laju pertumbuhan perekonomian Kalsel biasanya ikut melesat. Tetapi ketika harga dan permintaan turun maka laju pertumbuhan perekonomian Kalsel juga akan menurun.

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya perbaikan dari hambatan yang terjadi pemerintah provinsi Kalsel terus mendorong dan berupaya agar sektor perekonomian Kalsel dapat bergeser dari yang terbesar Pertambangan dengan sektor – sektor lain yang lebih berkelanjutan dan memberikan multiplier yang lebih besar ke masyarakat seperti pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata.

b. Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran Perkapita Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mengalami peningkatan Rp 111.000 jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 sebesar Rp 12.032.000 menjadi Rp 12.143.000 ditahun 2021. Kondisi ini menunjukkan bahwa setelah lebih dari satu tahun pandemi COVID-19 melanda Kalimantan Selatan, pengeluaran riil per kapita mulai meningkat kembali setelah pada 2020 mengalami penurunan.

Upaya yang dilaksanakan adalah:

- Pendapatan dipengaruhi oleh pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan maka semakin meningkat juga pengeluaran seseorang.

Sisi Pendapatan:

- Pemerintah Provinsi Kalimantan terus berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan tingkat Pendidikan masyarakat kalsel. Hal ini di upayakan agar masyarakat memiliki pekerjaan yang lebih layak.



- Pemerintah juga mengupayakan tingkat kesehatan masyarakat terus membaik, dengan terus meningkatkan fasilitas kesehatan di kalsel serta himbuan gerakan hibup sehat melalui Germas guna meningkatkan tingkat produktifitas tenaga kerja di Kalsel
- Pemerintah juga mengupayakan, menumbuhkan iklim – iklim wirausaha baru baik UMKM, IKM, Industri Kreatif, Berbasis Digital, dll serta kegiatan – kegiatan usaha yang mengangkat budaya lokal untuk terus mempertahankan budaya kalsel dari generasi ke generasi.
- Pemerintah juga mendorong perusahaan – perusahaan yang berdiri di Kalsel untuk lebih banyak mengambil tenaga kerja dari masyarakat sekitar
- Pemerintah memberikan bantuan Pendidikan / sekolah gratis melalui SMA unggulan yaitu SMA Banua.
- Pemerintah mengembangkan sekolah – sekolah vokasi yang Link and match dengan dunia usaha di kalsel agar lulusan dari Kalsel langsung bisa diserap oleh dunia kerja.

Sisi Pengeluaran:

- Pemerintah melalui Tim pengendalian inflasinya melakukan gerakan – gerakan agar harga – harga kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami inflasi yang tinggi
- Pemerintah juga melakukan gerakan pasar murah dan lainnya juga guna harga bahan pokok tidak melonjak naik dan terjadi kelangkaan
- Pemerintah juga mendorong sektor – sektor yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk terus meningkatkan produksinya seperti pertanian beras unus dan perikanan ikan gabus.

Hambatan dalam pencapaian adalah Tingkat Pendidikan masyarakat kalsel yang masih rendah dimana banyak masyarakat yang bekerja di Kalsel merupakan lulusan SMA dan bekerja di sektor pertanian. Sedangkan untuk tenaga ahli yang berpendidikan tinggi rata – rata di isi oleh masyarakat dari luar kalsel.

Adapun rencana tindaklanjut adalah Pemerintah terus mendorong Lembaga – Lembaga Pendidikan di Kalsel seperti ULM untuk mengembangkan sekolah – sekolah vokasi atau jurusan – jurusan yang link and match dengan



kebutuhan tenaga kerja dengan penghasilan tinggi di kalsel serta keperluan tenaga – tenaga kerja ahli yang diperlukan saat Ibu Kota Negara yang baru di Kaltim mulai berjalan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

Program Perekonomian dan Pembangunan.

5.2 Terwujudnya Mandiri Pangan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Terwujudnya Mandiri Pangan" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 45 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021
(Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	78,19	81,28	86,03	77,54	72,19	84,50	79,68	94,29%
Rata-rata Capaian									94,29%	

Tabel 46 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(Dinas Ketahanan Pangan Prov. Kalsel)

No	Indikator	Perbandingan							
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Realisasi Nasional	Target SDG's
1.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	79,68	83,55	74,37	-	-	-	85,49	-

Rumus Perhitungan

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) diperoleh dengan menjumlahkan skor PPH dari 9 Kelompok bahan pangan

Kelompok bahan pangan terdiri dari

- padi-padian
- kacang-kacangan,
- buah/biji berminyak,
- umbi-umbian,
- gula
- pangan hewani,
- Sayuran dan buah
- minyak dan lemak,
- kelompok bahan pangan lainnya.





1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 terealisasi sebesar 7968 dari target 84,50 sehingga persentase capaian indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 94,29%

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pada tahun 2021, skor pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan mencapai 79,68. Capaian ini **meningkat** sebesar 7,49 poin jika dibandingkan dengan skor PPH tingkat ketersediaan tahun 2020 yang sebesar 72,19.

Selama periode 2016 – 2021, skor pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan mengalami fluktuasi. Jika dibandingkan dengan skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan nasional, maka skor PPH ketersediaan Kalimantan Selatan berada di bawah skor PPH ketersediaan nasional, di mana secara nasional skor PPH tingkat ketersediaan tercapai sebesar 85,49.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energinya, baik secara absolut maupun relatif terhadap total energi baik dalam hal ketersediaan maupun konsumsi pangan, yang mampu mencukupi kebutuhan dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Semakin tinggi skor mutu pangan atau skor PPH, menunjukkan situasi pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya.

Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis peningkatan kemandirian pangan. Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

Capaian skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 sebesar 79,68. Capaian ini **meningkat** sebesar



7,49 poin jika dibandingkan dengan skor PPH tingkat ketersediaan tahun 2020 yang sebesar 72,19.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 47 berikut ini:

No.	Kelompok pangan	Energi (Kalori)	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	1.598	66,6	0,5	33,30	33,30	25,0
2.	Umbi-umbian	47	2,0	0,5	0,98	0,98	2,5
3.	Pangan Hewani	273	11,4	2,0	22,74	22,74	24,0
4.	Minyak dan Lemak	14	0,6	0,5	0,28	0,28	5,0
5.	Buah/biji berminyak	-	-	0,5	-	-	1,0
6.	Kacang-kacangan	6	0,2	2,0	0,49	0,49	10,0
7.	Gula	9	0,4	0,5	0,19	0,19	2,5
8.	Sayuran dan buah	300	12,5	5,0	62,55	62,55	30,0
9.	Lain-lain		-	-	-	-	-
	Jumlah	2.47	93,6		120,53	79,68	100,0

Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan koordinasi antar stakeholder dalam rangka pengumpulan data yang valid dan akurat.
- Membentuk tim penyusun yang terdiri dari dinas/instansi terkait.
- Melakukan rapat-rapat dan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Adapun kendala/**Penghambat** pencapaian disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Produksi kelompok pangan umbi-umbian masih kurang dan masih didominasi dengan produksi kelompok pangan padi-padian seperti padi dan jagung yang terus digalakkan.
- Masih rendahnya produk pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan dan gula sehingga masih mendatangkan dari luar daerah.
- Belum adanya pabrik pengolahan kelapa sawit dalam skala besar yang mampu menampung seluruh hasil produksi kelapa sawit Kalimantan Selatan sehingga hasil produksi kelapa sawit Kalimantan Selatan dikirim keluar.
- Tidak semua data untuk menyusun tabel neraca bahan makanan (NBM) dapat diperoleh tepat waktu.



Rencana Tindak Lanjut untuk meningkatkan skor pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan, dilakukan beberapa kegiatan penunjang kinerja sebagai solusi yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

- Penyusunan analisis ketersediaan pangan yang melibatkan instansi lintas sektor termasuk penyusunan tabel neraca bahan makanan dan pola pangan harapan.
- Apresiasi terhadap petugas penyusun analisis ketersediaan pangan dengan mengikutsertakan pada kegiatan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas petugas atau aparatur.
- Melakukan pertemuan dalam bentuk rapat koordinasi, rapat evaluasi, rapat tim teknis, dan sejenisnya dalam rangka menampilkan data ketersediaan pangan yang akurat dan tepat waktu.
- Koordinasi dengan instansi terkait untuk mendapat data ketersediaan pangan yang *up date*.
- Dukungan dana baik APBD dan APBN untuk menjangkau semua kegiatan diatas sangat diperlukan.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan.
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

5.3

Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran "Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:



Tabel 48 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (BKPM RI)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	Triliun Rp	9,51	6,25	11,70	15,65	7,75	14,4	12,71	88,26%
Rata-rata Capaian									88,26%	

Tabel 49 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional (BKPM RI)

No	Indikator	Perbandingan						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Nasional	Target Nasional
1.	Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	12,71	8,73	17,54	41,18	5,74	901,02	-

Rumus Perhitungan:

Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 tahun

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 sampai laporan ini disusun masih menggunakan data pada triwulan ke III yang terealisasi sebesar 9,43 Triliun dari target 14,4 Triliun sehingga persentase capaian Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN pada tahun 2021 sebesar 65,48%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Pencapaian indikator Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.678.991.720.000 rupiah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Pada tahun 2020 pencapaian indikator Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN 7.756.307.320.000 rupiah menjadi 9.435.299.040.000 rupiah ditahun 2021.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pencapaian indikator Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah) tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 1.678.991.720.000 rupiah jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020. Pada tahun 2020



pencapaian indikator Realisasi Peningkatan Nilai Investasi PMA dan PMDN 7.756.307.320.000 rupiah menjadi 9.435.299.040.000 rupiah ditahun 2021.

Adapun permasalahan atau hambatan adalah:

- Kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan ekonomi.
- Kondisi yang relative belum normal akibat Pandemi COVID-19, sehingga masih pada aktifitas *recovery* perekonomian.
- Belum optimalnya promosi investasi.
- Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM.

Adapun Upaya yang telah dilakukan adalah

- Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN.
- Himbuan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM.
- Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPSTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
- Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting*, dan lainnya.
- *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
- Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi.
- Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
- Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
- Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
- Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur).
- Peningkatan standar peyanan dengan implemtasi SMM ISO 9001:2015.





Rencana Tindak Lanjut.

- Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN.
- Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM.
- Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI / Kementerian Investasi) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPSTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
- Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, *one-one meeting*, dan lainnya.
- *Matchmaking* dalam rangka kemitraan dunia usaha.
- Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi.
- Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
- Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur) dan Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
- Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- b. Program Promosi Penanaman Modal.
- c. Program Pelayanan Modal.
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.





5.4

Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran " Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan" diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 50 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,07	69,38	68,78	68,38	68,43	64,00	71,03*	110,98%
Rata-rata Capaian									110,98%	

Catatan: *perhitungan mandiri Dinas LH

Tabel 51 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
(Data diolah dari IKLH Tahun 2020, Pusdatin KLHK)

No	Indikator	Perbandingan IKLH 2018 (Data Rilis Terakhir)						
		Kalsel	Kalteng	Kalbar	Kaltim	Kaltara	Target Nasional	Target SDG's
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	*68,43	*75,04	*72,59	*75,06	*80,85	-	-

Keterangan: * Data Tahun 2020

Rumus Perhitungan

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$= (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$$

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

Pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 terealisasi sebesar 71,03 dari target 64,00, sehingga persentase capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 sebesar 110,98%. Angka tersebut masih perhitungan sementara dikarenakan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dikeluarkan.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ditahun 2021 mencapai indeks 71,03. Angka tersebut masih perhitungan sementara dikarenakan data dari

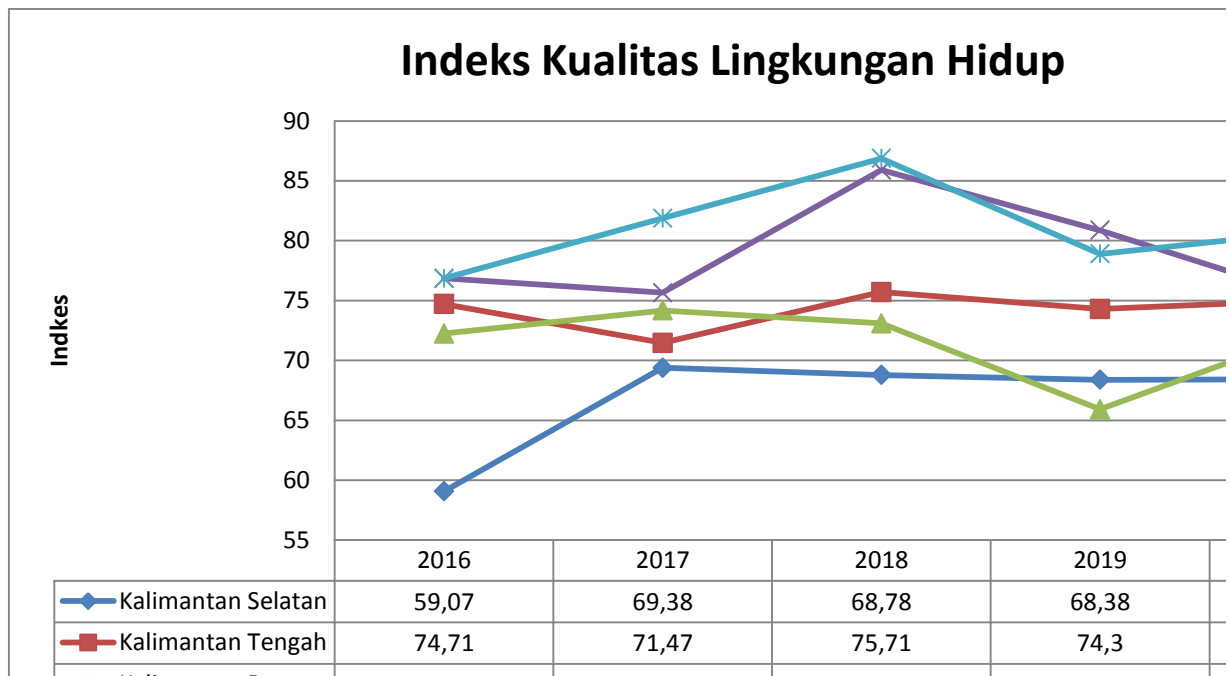


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dikeluarkan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 2,60 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang terealisasi sebesar 68,43.

Perbandingan data IKLH Provinsi Kalsel dengan Provinsi lainnya untuk Tahun 2021 masih belum dapat dikomparasi karena data resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dirilis. Sementara yang dapat dikomparasi hanya IKLH pada Tahun 2020

Perkembangan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dari grafik berikut ini:

Grafik 15 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Regional Kalimantan



Dari grafik terlihat bahwa IKLH pada Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 masih menjadi Provinsi dengan nilai IKLH terendah di antara Provinsi di pulau Kalimantan. Dengan nilai 68,43, Kalimantan Selatan berada di urutan terbawah, dan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan nilai IKLH paling tinggi, disusul dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.





3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Berdasarkan perhitungan sementara indeks Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yang berada pada angka 71,35 dengan kategori baik. Angka ini didapat dari perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IKLH} &= (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\ &= (0,340 \times 54,75) + (0,428 \times 89,15) + (0,133 \times 50,26) + (0,099 \times 76,45) \\ &= \mathbf{71,03} \end{aligned}$$

Berdasarkan nilai indeks sementara diatas nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 2,60 poin dibanding tahun 2020 yaitu 68,43 menjadi 71,03 ditahun 2021. Nilai IKLH ini masih nilai sementara karena masih dalam proses pengumpulan data-data dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif dan refresentatif.

Angka ini didapat dari 4 komponen perhitungan IKLH yaitu *pertama*, Indeks Kualitas Air sebesar 54,75, *kedua* Indeks Kualitas Udara sebesar 89,15, *ketiga* Indeks Kualitas Lahan sebesar 50,26 dan yang *ke empat* Indeks Kualitas Air laut sebesar 76,45.

Adapun Upaya - upaya yang telah dilakukan yaitu dengan

- Melakukan pemantauan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan hidup.
- Pembinaan dan inovasi untuk mengajak peran serta masyarakat dalam mengurangi dan menangani sampah . Perlu juga dibangun sebuah sistem penanganan sampah yang difasilitasi oleh pemerintah sehingga kebijakan pengelolaan sampah dapat terakomodir dan diimplementasikan sampai ke tingkat tapak.
- Meningkatkan kinerja pelayanan TPAS Regional untuk dapat memfasilitasi kendala yang dihadapi oleh kabupaten/ kota.
- Memfasilitasi edukasi terkait perubahan iklim dan dampak perubahan iklim serta aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sampai di tingkat tapak.
- Melakukan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup di kawasan lindung dan pesisir sampai ke tingkat tapak.
- Melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi SDA.
- Mengembangkan kawasan konservasi.





- Mengembangkan cakupan pengawasan ke wilayah kawasan pesisir dan lahan gambut.
- Mengembangkan aturan tegas dalam penegakan hukum pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- Pembinaan, monitoring dan evaluasi terus menerus kepada institusi LH Kab/ Kota dan pelaku usaha terkait penerapan aturan lingkungan hidup.
- Meningkatkan sumberdaya pengelolaan dan penanganan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.

Adapun Hambatan dalam pencapaian indikator tersebut adalah

- Masih rendahnya kualitas air sungai merupakan sebuah hal yang harus disikapi dengan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik lagi dengan instansi lain yang terkait urusan lingkungan hidup. Penyamaan persepsi terhadap permasalahan kualitas lingkungan hidup khususnya kualitas air harus dapat secara sinergi dan komprehensif dituangkan juga dalam program kegiatan dari berbagai instansi lain yang menunjang terwujudnya pengelolaan air.
- Masih rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam disiplin mengelola sampah. Budaya membuang sampah tidak pada tempat yang benar terbukti dengan masih banyaknya sampah yang ditemui di jalan dan sungai. Selain itu disiplin pemenuhan waktu membuang sampah juga masih rendah, sehingga sering ditemui tumpukan sampah setelah pengangkutan sampah oleh petugas.
- Perubahan iklim mengakibatkan terjadinya bencana hidrometrologi yang telah dirasakan dampaknya baik sosial, ekonomi maupun lingkungan.
- Belum optimalnya kolaborasi dan sinergitas antar pemerintah, antara pemerintah dengan berbagai elemen. Persamaan visi dalam pengelolaan lingkungan hidup harus terus dilakukan.
- Kondisi khusus yang tidak terduga seperti adanya pandemic covid-19 menjadi antangan tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan.

Rencana tindaklanjut untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut adalah





- Pengintegrasian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Hal ini dilakukan dengan menyusun naskah perencanaan lingkungan hidup; mengembangkan sistem pendataan dan informasi; meningkatkan pengelolaan data dan informasi berbasis sistem informasi geografis; meningkatkan penataan lingkungan hidup sesuai dengan tata ruang.
- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
Hal ini dilakukan dengan mengendalikan pencemaran melalui pemantauan kualitas air dan udara; mengendalikan pencemaran akibat limbah B3; dan melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar.
- Peningkatan pengelolaan persampahan.
Strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan mengoperasikan TPA Regional; melaksanakan penetapan perjanjian kerja sama mengenai Tipping Fee TPA Regional; membuat peraturan ataupun rencana aksi dan gerakan terkait penanganan/pengurangan sampah.
- Pengendalian dampak perubahan iklim.
Hal ini dilakukan dengan pemantauan terhadap emisi gas rumah kaca; melakukan upaya pembinaan dalam hal adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- Peningkatan sinergi dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan instansi/ stakeholder terkait.
Strategi ini dapat dijalankan antara lain dengan koordinasi dalam penilaian dan evaluasi dokumen lingkungan; melakukan pembinaan dan penilaian kinerja terhadap perusahaan melakukan pembinaan terhadap institusi pendidikan agar berwawasan lingkungan, serta melakukan pembinaan dan koordinasi dengan kab/kota dalam menciptakan kota bersih dan sehat.
- Peningkatan upaya pemeliharaan lingkungan hidup.
Pemeliharaan lingkungan hidup dapat berupa upaya konservasi flora fauna melalui taman kehati dan konservasi terhadap ekosistem pantai dan laut.
- Peningkatan upaya pemulihan lingkungan hidup.
Hal ini dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait perbaikan kualitas lingkungan serta upaya pengelolaan lahan, baik lahan gambut maupun lahan akses terbuka.



- Penerapan penegakan hukum lingkungan.
Memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap SDA dan Lingkungan Hidup, membuat pos pengaduan dan menindaklanjuti kasus LH.
- Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagai partner pemerintah dalam pengelolaan SDA dan LH.
- Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kemitraan Dinas LH dengan forum komunitas LH/ organisasi di bidang LH, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan SDA dan LH bagi pembangunan selanjutnya.
- Penguatan kapasitas laboratorium lingkungan.
Hal ini dapat dilakukan dengan memperoleh/mempertahankan Akreditasi Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel, Meningkatkan jumlah parameter yang dapat diuji dan terakreditasi, serta penguatan kapasitas bagi laboratorium lingkungan di kab/kota.
- Pengembangan kapasitas SDM Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan.
Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi aparatur Dinas LH dan menambah jumlah pegawai berdasarkan analisis jabatan dan kompetensi yang diperlukan.
- Pengadaan sarana dan prasarana operasional.
Perlu untuk meningkatkan sarana dan prasaran lingkungan hidup, baik itu untuk menunjang pekerjaan rutin maupun operasional untuk laboratorium lingkungan dan TPA Regional.
- Pelaporan capaian kinerja dan keuangan secara akuntabel.
Pelaporan serta evaluasi kinerja secara berkala, baik bulanan maupun triwulan dan semester.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama Tahun 2021 yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.





- c. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3).
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
- e. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- i. Program Pengelolaan Persampahan.

5.5

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ” Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 52 : Capaian Kinerja Pada Akhir Periode 2021 (Dinas Pariwisata Prov. Kalsel)

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Kinerja Pada Akhir Periode 2021		
			2016	2017	2018	2019	2020	Target	Realisasi	% Capaian
1	Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	Orang	718.380	4.300.487	4.795.991	5.275.590	7.639.443	2.473.434	2.790.898	112,83%
2	Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan	Hari	-	3	3	3	3	5	3	60%
Rata-rata Capaian										142,83%

1. Perbandingan Realisasi dengan Target

a. Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)

Pencapaian indikator Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) tahun 2021 terealisasi sebesar 2.790.898 Orang dari target sebesar 2.473.434 Orang sehingga persentase capaian indikator Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) pada tahun 2021 sebesar 112,83%.



b. Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan

Pencapaian indikator Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan tahun 2021 terealisasi sebesar 3 hari dari target sebesar 5 Hari sehingga persentase capaian indikator Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan pada tahun 2021 sebesar 60%.

2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait

a. Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)

Indikator Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) ditahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 4.848.545 orang jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 yang terealisasi sebanyak 7.639.443 orang menjadi 2.790.898 Orang ditahun 2021.

b. Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan (hari)

Pada tahun 2021 lama tinggal wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan mampu dipertahankan dengan pencapaian ditahun 2020 yaitu lama tinggal wisatawan di Provinsi Kalimantan Selatan selama 3 hari.

3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

a. Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)

Indikator Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) ditahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 4.848.545 orang jika dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2020 yang terealisasi sebanyak 7.639.443 orang menjadi 2.790.898 Orang ditahun 2021.

Adapun Hambatan dalam pencapaian indikator tersebut adalah

- Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi kunjungan wisatawan dan wadah pelaku ekonomi kreatif.
- Event-Event besar belum bisa terlaksana seperti Haul Guru Sekumpul yang menjadi salah satu sumber peningkatan kunjungan wisatawan yang terbesar seperti di tahun 2020 dengan hasil sebesar 2 Juta lebih kunjungan wisatawan yang datang ke Kalimantan Selatan.
- Masih lemahnya sinkronisasi data-data kepariwisataan sebagai bahan pengambil kebijakan.



- Keterlambatan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data-data kunjungan wisatawan.
- Konten-konten terkait pelaksanaan kegiatan atau program belum maksimal dalam pemasaran ke masyarakat atau publik.
- Belum ada penerbangan secara langsung dari daerah wisata seperti Bali, Lombok, dll ke Banjarmasin.
- Masih banyak sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum bersertifikasi CHSE.
- Masih kurang rendahnya partisipasi pemilik usaha pariwisata.
- Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif.
- Kurangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif.
- Kurangnya apresiasi terhadap sebuah karya.

Upaya - upaya yang telah dilakukan yaitu dengan

- Melaksanakan Event-event skala nasional dalam rangka menarik kunjungan wisatawan seperti : Festival Budaya Banjar Pasar Terapung.
- Melakukan Kerjasama dengan mitra kerja Dinas Pariwisata seperti HPI, PHRI, ASITA, untuk mendukung kemajuan pariwisata Kalimantan Selatan.
- Melakukan Pembinaan SDM Pariwisata dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan.
- Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata.
- Membuat Website dalam rangka perhitungan jumlah kunjungan wisatawan di Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendukung event-event yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan.

Rencana tindaklanjut untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut adalah





- Membantu Mempercepat Vaksinasi untuk membangkitkan pariwisata di Kalimantan Selatan.
 - Sinkronisasi data-data kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
 - Membuat SOP tentang mekanisme menghimpun data-data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan.
 - Membuat TIM KREATIF Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.
 - Sosialisasi dan Pembinaan SDM Pariwisata secara berkelanjutan.
 - Penetapan Destinasi Unggulan Provinsi.
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung di Obyek Wisata dengan Standar Sapta Pesona.
- b. Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan (hari)

Indikator jumlah hari lama tinggal wisatawan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021 mampu dipertahankan dengan pencapaian ditahun 2020 yaitu selama selama 3 hari.

Adapun upaya - upaya yang telah dilakukan yaitu dengan

- Melaksanakan Event-event skala nasional dalam rangka menarik kunjungan wisatawan seperti : Festival Budaya Banjar Pasar Terapung.
- Melakukan Kerjasama dengan mitra kerja Dinas Pariwisata seperti HPI, PHRI, ASITA, untuk mendukung kemajuan pariwisata Kalimantan Selatan.
- Melakukan Pembinaan SDM Pariwisata dalam rangka peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata untuk menarik kunjungan wisatawan.
- Melaksanakan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Destinasi Wisata.
- Membuat Website dalam rangka perhitungan jumlah kunjungan wisatawan di Kalimantan Selatan.
- Melaksanakan koordinasi ke Instansi Pusat untuk mendukung event-event yang dilaksanakan di Kalimantan Selatan.





Adapun Hambatan dalam pencapaian indikator tersebut adalah

- Kondisi pandemi Covid-19 yang membatasi kunjungan wisatawan dan wadah pelaku ekonomi kreatif.
- Event-Event besar belum bisa terlaksana seperti Haul Guru Sekumpul yang menjadi salah satu sumber peningkatan kunjungan wisatawan yang terbesar seperti di tahun 2020 dengan hasil sebesar 2 Juta lebih kunjungan wisatawan yang datang ke Kalimantan Selatan.
- Masih lemahnya sinkronisasi data-data kepariwisataan sebagai bahan pengambil kebijakan.
- Keterlambatan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota dalam menyampaikan data-data kunjungan wisatawan.
- Konten-konten terkait pelaksanaan kegiatan atau program belum maksimal dalam pemasaran ke masyarakat atau publik.
- Belum ada penerbangan secara langsung dari daerah wisata seperti Bali, Lombok, dll ke Banjarmasin.
- Masih banyak sarana prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum bersertifikasi CHSE.
- Masih kurang rendahnya partisipasi pemilik usaha pariwisata.
- Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam memajukan sektor pariwisata.
- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM kreatif.
- Kurangnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
- Infrastruktur teknologi informasi yang belum kompetitif.
- Kurangnya apresiasi terhadap sebuah karya.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut adalah

- Membantu Mempercepat Vaksinasi untuk membangkitkan pariwisata di Kalimantan Selatan.
- Sinkronisasi data-data kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif.
- Membuat SOP tentang mekanisme menghimpun data-data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan.
- Membuat TIM KREATIF Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan.





- Sosialisasi dan Pembinaan SDM Pariwisata secara berkelanjutan.
- Penetapan Destinasi Unggulan Provinsi.
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung di Obyek Wisata dengan Standar Sapta Pesona.

4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun 2021 yaitu:

- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
- Program Pemasaran Pariwisata.
- Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1

Pendapatan Daerah tahun 2021

Perhitungan APBD tahun 2021 sebelum Audit BPK menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah mencapai Rp 6.964.338.025.282 sedangkan belanja daerah terealisasi sebesar Rp 6.320.478.006.689,95 dengan persentase capaian sebesar 90,75% dan terdapat SILPA senilai Rp 643.860.018.592,05.

2

Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program

Misi 1: Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Program Pengelolaan Pendidikan	1.175.476.861.153	990.708.953.495	84,28%



No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
		Program Pengembangan Kurikulum	1.392.074.000	1.170.695.900	84,10%
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	500.000.000	448.729.750,	89,75%
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	68.216.858.520	56.648.260.780	83,04%
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	26.810.567.500	26.219.523.825	97,80%
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.875.934.100	1.359.990.846	72,50%
3.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.858.700.000	2.236.673.519	78,24%
		Program Penempatan Tenaga Kerja	1.436.624.800	1.057.558.376	73,61%
4	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	Program Peningkatan Kesejahteraan rakyat	42.731.839.000	39.588.474.815	92,64%
5	Meningkatnya Kesenjangan Gender	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	962.392.000	879.999.584	91,44%
		Program Perlindungan Perempuan	573.422.300	350.462.622	61,12%
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	812.916.700	685.218.384	84,29%
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	249.590.000	199.169.600	79,80%
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	1.370.880.500	947.610.600	69,12%
		Program Perlindungan Khusus Anak	785.507.600	568.777.250	72,41%





Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya kualitas Layanan Publik	Program Penataan Organisasi	2.946.414.100	2.551.739.457	86,60%
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.397.503.246.130	1.334.544.263.721	95,49%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.881.313.600	1.843.878.582	63,99%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.775.968.610	11.751.920.966	79,53%
3.	Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Yang Akuntabel	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.397.503.246.130	1.334.544.263.721	95,49%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.881.313.600	1.843.878.582	63,99%
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	14.775.968.610	11.751.920.966	79,53%
		Program Penataan Organisasi	2.946.414.100	2.551.739.457	86,60%
		Program Kepegawaian Daerah	9.641.167.200	6.697.105.732	69,46%

Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal

No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Program Pemberdayaan Sosial	2.929.360.700	2.374.594.235	81,06%
		Program Rehabilitasi Sosial	26.808.673.295	25.309.971.519	94,41%
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	6.831.060.310	6.426.058.009	94,07%
		Program Penanganan Bencana	1.998.990.000	1.746.646.623	87,38%
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	1.455.301.400	1.279.530.664	87,92%



No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
2.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	7.959.032.800	6.667.039.966	83,76%
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	8.429.472.811	2.767.955.000	32,84%
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	2.898.368.400	2.860.571.667	98,70%
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.	502.791.400	501.795.576	99,80%
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	883.287.800	850.975.376	96,34%
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam pembangunan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	14.368.670.440	13.362.066.436	92,99%
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	71.535.945.533	66.781.608.353	93,35%
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	101.836.000	85.292.000	83,75%
4	Meningkatnya Prestasi Olahraga Provinsi Kalsel	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	14.368.670.440	13.362.066.436	92,99%
		Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	71.535.945.533	66.781.608.353	93,35%
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	101.836.000	85.292.000	83,75%
5.	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan	5.667.909.000	4.913.936.500	86,70%
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	221.311.000	210.555.400	95,14%
		Program Pembinaan Sejarah	1.401.370.000	1.257.003.380	89,70%





No.	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
		Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.071.880.000	919.975.198	85,83%
		Program Pengelolaan Permuseuman	5.498.306.400	4.829.951.835	87,84%

Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Untuk Pemerataan Pembangunan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	108.409.029.147	79.668.933.842	73,49%
		Program Penyelenggaraan Jalan	430.789.735.505	424.664.953.542	98,58%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.755.098.500	1.483.496.549	84,52%
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	1.056.843.600	816.085.830	77,22%
		Program Penataan Bangunan Gedung	53.617.636.736	48.544.581.195	90,54%
		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	9.795.835.000	6.349.682.677	64,82%
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	6.822.728.200	6.665.855.611	97,70%
		Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	2.061.916.000	593.740.000	28,80%
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	2.167.745.600	687.490.600	31,71%





No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	83.977.859.800	82.381.835.475	98,10%
		Program Penatagunaan Tanah	567.074.000	318.468.950	56,16%
		Program Pengembangan Jasa Konstruks	1.351.640.000	1.297.349.766	95,98%
		Program Pengembangan Perumahan	1.159.729.000	1.037.137.988	89,43%
		Program Kawasan Permukiman	12.376.436.000	12.250.646.500	98,98%
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	6.139.600.000	5.898.897.900	96,08%
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	769.860.000	595.487.700	77,35%
		Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	681.962.000	589.147.152	86,39%
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	12.127.671.300	8.807.369.363	72,62%
		Program Pengelolaan Pelayaran	3.811.573.200	3.698.800.956	97,04 %

Misi 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
1	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.444.844.300	1.250.531.976	86,55%
2	Terwujudnya Mandiri Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	353.550.000	153.415.200	43,39%



No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
		Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.109.028.000	2.114.652.416	68,02%
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	641.406.100	240.555.700	37,50%
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	446.555.400	355.691.736	79,65%
3	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	421.094.800	353.621.700	83,97%
		Program Promosi Penanaman Modal	977.129.600	866.168.350	88,64%
		Program Pelayanan Penanaman Modal	1.155.447.800	983.119.000	85,08%
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	688.155.900	466.092.400	67,73%
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	192.093.800	167.483.000	87,18%
4	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	537.707.600	520,081,050	96,72%
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.647.397.300	3.591.710.211	98,47%
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(Limbah B3)	1.009.888.600	894,981,400	88,62%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	224.074.100	223,578,300	99,78%
		Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	192.564.400	191,657,600	99,53%



No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
			Rp	Rp	%
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.547.489.900	1,514,941,300	97.9%
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	343.448.800	324,349,700	94.44%
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	208.188.900	197,623,000	94.92%
		Program Pengelolaan Persampahan	3.702.693.200	3.474.273.140	93,83%
5	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.254.551.200	5.100.358.480	97.06%
		Program Pemasaran Pariwisata	5.773.703.100	4.969.328.975	86.07%
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	1.223.616.250	1.022.849.500	83.59%

3

Anggaran dan Realisasi menurut Organisasi

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Sekretariat Daerah	219.286.075.414	191.054.600.394,53	87,12%
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.089.197.000	26.551.873.510	94,53%
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.981.732.290.229	1.755.039.499.843	88,56%
4	Dinas Kesehatan	168.537.614.239	145.027.860.435	86,05%
5	Dinas Perhubungan	33.064.016.146	28.490.320.161	86,17%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.991.330.777	17.582.005.482	92,58%
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	754.916.788.017	696.639.394.537	92,28%
8	Dinas Sosial	84.357.177.378	73.572.585.380	87,22%
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	47.189.748.610	40.925.454.069	86,73%
10	Dinas Perindustrian	16.111.415.688	11.705.213.085	72,65%
11	Dinas Perdagangan	16.157.358.216	13.509.085.532	83,61%
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.749.453.455	20.233.585.054	85,20%
13	Dinas Pemuda dan Olahraga	100.784.215.941	94.025.158.573	93,29%
14	Dinas Pariwisata	22.374.861.532	19.692.750.581	88,01%



NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	REALISASI	%
15	Dinas Kehutanan	112.508.076.506	104.675.898.471	93,04%
16	Dinas Perkebunan dan Peternakan	36.980.052.138	30.241.678.039	81,78%
17	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	96.533.509.924	84.055.993.434	87,07%
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.898.356.064	42.378.433.546	94,39%
19	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	23.582.765.571	21.779.563.745	92,35%
20	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana	9.515.263.100	7.965.057.192	83,71%
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	22.087.834.496	18.359.238.547	83,12%
22	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11.987.609.000	10.221.204.337	85,26%
23	Badan Keuangan Daerah	1.659.480.118.445	1.555.150.954.877	93,71%
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.075.875.350	24.472.281.205	87,16%
25	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.509.094.940	10.450.202.023	83,54%
26	Dinas Lingkungan Hidup	30.783.624.898	27.561.382.652	89,53%
27	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.362.865.342	13.239.395.696	86,18%
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40.701.986.400	32.472.564.538	79,78%
29	Dinas Ketahanan Pangan	14.846.576.450	12.244.579.202	82,47%
30	Inspektorat Daerah	24.424.212.946	20.344.673.692	83,30%
31	Badan Kepegawaian Daerah	24.190.615.524	20.261.104.048	83,76%
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	37.165.204.432	27.705.599.577	74,55%
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	29.453.528.121	20.688.293.945	70,24%
34	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	15.325.329.450	14.519.746.412	94,74%
35	Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel	8.560.005.645	8.083.837.610	94,44%
36	RSUD ULIN	584.711.088.733	601014435052,42	102,79 %
37	RS. ANSARI SALEH	252.904.269.337	215.119.569.291	85,06%
38	RSJ SAMBANG LIHUM	70.204.142.758	66.550.032.024	94,80%
39	RSGM Gusti Hasan Aman	16.628.774.327	14.624.944.625	87,95%
40	SATPOL PP dan DAMKAR	34.132.395.847	32.468.183.180	95,12%
41	Sekretariat DPRD	191.443.306.896	149.779.773.093	78,24%
	Jumlah	6.964.338.025.282	6.320.478.006.689,95	90,75%





4

Efisiensi Penggunaan Sumber Dana dan Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2018, 2019 dan 2020

Tahun	Total APBD	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Efisiensi
2017	5.532.559.991.000	146	1494	10.459.686.600
2018	6.089.952.371.644	150	1633	12.333.400.000
2019	7.031.945.852.547	136	1068	52.143.277.350
2020	7.580.905.164.000	136	1059	75.982.598.812

Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil evaluasi Rencana Jangka Menengah Daerah pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kalsel Tahun 2016-2021. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada dokumen RPJMD namun juga evaluasi atas kinerja SKPD, apakah telah mendukung target-target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun target capaian SPM yang ditetapkan dalam PP Nomor 2 tahun Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil evaluasi Rencana Jangka Menengah Daerah pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Hasil evaluasi RPJMD Kalimantan Selatan ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Kalsel Tahun 2016-2021.

Evaluasi dilakukan tidak hanya pada dokumen RPJMD namun juga evaluasi atas kinerja SKPD, apakah telah mendukung target-target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun target capaian SPM yang ditetapkan dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Evaluasi juga dilakukan untuk menyesuaikan perubahan



perangkat daerah sebagai dampak diterbitkannya PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pada tahun 2018 jumlah program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah mengalami peningkatan dari sisi jumlah. Program pada tahun 2018 bertambah 4 dari 146 menjadi 150 program. Begitupula jumlah kegiatan bertambah 139 kegiatan, dari 1494 menjadi 1633. Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdampak pada jumlah organisasi perangkat daerah, ada perangkat daerah yang bergabung ataupun berpisah. Perubahan ini menyebabkan bertambahnya usulan program dan kegiatan baru yang berakibat pada meningkatnya jumlah program/kegiatan pada tahun 2018. Pada tahun 2018, ada 150 program dan 1633 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6,09 Trilyun, meningkat Rp. 557,4 Milyar.

Pada Tahun 2019, hasil evaluasi RPJMD mampu memangkas jumlah program kegiatan sehingga pada perencanaan tahun 2019, jumlah program menjadi 136 (berkurang 14 program) dan jumlah kegiatan 1068 (berkurang 565 kegiatan). Pemangkasan program/kegiatan ini berhasil mengurangi anggaran sebesar lebih kurang Rp. 52,1 Milyar, yang dananya kemudian dialihkan ke kegiatan prioritas daerah.

Pada Tahun 2020, jumlah program yang dilaksanakan masih sama yaitu 136 program dengan 1059 kegiatan. Tahun. Untuk jumlah program masih tetap sama tidak ada penurunan maupun peningkatan dimana program sudah tertera pada RPJMD 2016 – 2021. Adanya Kenaikan pada Total APBD 2020 dari tahun lalu sebesar Rp. 548.959.311.453,- dikarenakan optimalisasi pendapatan daerah yang naik sebesar 3,8% dibandingkan tahun 2019. Pada tahun 2020 dilakukan pengurangan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah tidak prioritas dilaksanakan sebesar Rp 75.982.598.812,-, yang dananya selanjutnya diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.





BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2021 telah termuat tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini adalah tahun terakhir pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tanggal 1 Februari 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama Tahun 2019. Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 19 (Sembilan Belas) sasaran strategis dan 32 indikator kinerja utama.

Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan perbandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan masih akan terus ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan 2016-2021, Pembangunan Manusia menjadi isu strategis yang pertama disusul dengan Daya Saing Perekonomian Daerah, Kuantitas dan Kualitas Lingkungan Hidup, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Dasar, serta Kinerja pemerintah Daerah.

Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel Selama RPJMD-P 2016-2021 dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :

1. Pemprov. Kalsel terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan seluruh Jajaran Pimpinan Dalam Ber SAKIP
2. Pemprov. Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Budaya Kinerja secara mandiri Dengan Nilai Rata-Rata Baik;



3. Pemprov Kalsel telah mengintegrasikan Aplikasi E-planing Dan E-budgeting;
4. Gubernur Kalsel ikut memacu serta mendorong Bupati/Walikota fokus dan concern pada pencapaian Visi Dan Misi Pengembangan Daerah Melalui Penerapan Manajemen Kinerja yang baik;
5. Pemprov Kalsel telah menetapkan Cascading serta Croscutting Tingkat Pemda;
6. Pemprov. Kalsel telah menerapkan Cascading Kinerja diseluruh SKPD dengan melakukan penyelarasan ukuran kinerja yang dilaksanakan sejak tahun 2016 dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen Keselarasan dalam proses perencanaan dengan mengacu Pada Peta Proses Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun;
7. Pemprov Kalsel telah menerapkan Perjanjian Kinerja Hingga Levelan Staf;
8. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Rapotan Kinerja Tiap Semester;
9. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Program dan Kegiatan, dan telah melaporkannya pada Laporan Kinerja Pemprov Kalsel, dalam rangka meningkatkan Efisiensi Penggunaan Dana;
10. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terhadap OPD;
11. Untuk mencapai pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD Prov. Kalsel. Pemprov Kalsel Telah Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta Membagikan Buku Saku Penyusunan LAKIP Keseluruh SKPD sebagai Pedoman SKPD dalam Penyusunan LAKIP;
12. Pemprov Kalsel ikut membantu Kemenpan RB Ri dalam pembinaan SAKIP di Kab/Kota melalui Asistensi SAKIP secara berkesinambungan dan menargetkan ditahun 2018 seluruh Kab/Kota yang kualifikasi SAKIPnya masih Cc menjadi B dan melaksanakan Reviu RPJMD Pemerintah Kab/Kota;
13. Pemprov Kalsel telah menerapkan E-SAKIP yang memudahkan SPD dalam penginputan Data Kinerja yang Outputnya berupa Rencana Aksi SKPD, Laporan Efisiensi Penggunaan Dana, Laporan Pengukuran Triwulan, Yang Kedepanya Akan Mengarah Pada "Paperless";

Dari upaya perbaikan dan penerapan SAKIP tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah berhasil, antara lain :



1. Regrouping, Pemerintah Kalimantan Selatan lebih fokus pada pembangunan yang menysasar langsung kepada masyarakat, yang sebelumnya Pemprov Kalsel memiliki 13 Prioritas Kepala Daerah kini menjadi 5 Prioritas Kepala Daerah;
2. Shifting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya bergantung pada Sumber Daya Alam yaitu Sektor Pertambangan, Sejak tahun 2016 Pemprov Kalsel mulai menggerakkan Sektor-Sektor Lain sebagai andalan yaitu Sektor Pertanian, Industri dan Pariwisata;
3. Meningkatnya Kualifikasi SAKIP di Pemerintah Kab/Kota dari 13 Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan 2 Kab/Kota telah mendapatkan kualifikasi BB dan 11 Kab/Kota lainnya mendapatkan kualifikasi B

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan kinerja Pemda maupun SKPD;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel, dengan memanfaatkan dokumen kinerja dalam proses perencanaan kinerja selanjutnya terdata terhadap perbaikan dokumen Kinerja RPJMD 2016 – 2021.
3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait dalam sasaran strategis Pembangunan daerah maupun sasaran strategis organisasi dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan melakukan perjanjian kerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat eselon terendah.



BAB IV PENUTUP

4. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi serta meningkatkan pembinaan dalam penerapannya melalui pemberian *reward* bagi SKPD yang berkinerja tinggi dan memberikan *punishment* bagi SKPD yang belum maksimal berkinerja dengan baik.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 188.44/ O659 /KUM/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan keberhasilan visi, misi organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0488/KUM/2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100)
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Acara Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 072);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 60);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan serta sasaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sasaran sudah tercapai;
 - b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unit Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yang akan diwujudkan; dan
 - c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA** : dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0488/KUM/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 02 Agustus 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Tembusan:

1. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin/Banjarbaru/Jakarta.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ O659 / KUM/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • IPM • Tingkat Pengangguran 	<p><u>Makna Indikator:</u> IPM adalah Indeks yang dihasilkan dari beberapa komponen yaitu perencanaan aspek pendidikan, masyarakat, kesehatan dan daya beli</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Indikator ini untuk menggambarkan Tingkat Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam Meningkatkan Daya Saing SDM</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> BPS</p> <p><u>Makna Indikator:</u> Orang yang tidak bekerja sama sekali dan sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang mendapatkan pekerjaan yang layak</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Prov. Kalsel, sehingga masalah perekonomian, kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya dapat teratasi.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> BPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan • Dinas Kesehatan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • BPS • BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kepuasan Masyarakat 	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah merupakan suatu ukuran untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public selanjutnya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Dalam rangka mewujudkan tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan instansi pemerintah, juga dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodic terhadap perkembangan unit pelayanan public yang ada di Prov. Kalsel.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Bobot nilai rata-rata tertimbang=Jumlah bobot/jumlah unsur IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang terisi) x Nilai Penimbang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Keuangan Daerah • Bappeda • Inspektorat • Biro Organisasi • Seluruh SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Keuangan Daerah • Bappeda • Inspektorat • Biro Organisasi • Seluruh SKPD
		<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Reformasi Birokrasi 	<p><u>Makna Indikator:</u> Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang mengukur sejauh mana implementasi Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indikator ini diharapkan dapat mengukur sejauhmana perubahan positif birokrasi Pemerintah Prov. Kalsel dengan satu tujuan yaitu Pelayanan Publik yang prima</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Indikator ini menjadi salah satu ukuran untuk mengukur kondisi aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintah yang akuntabel, ditambah dengan kebijakan baru yang memasukan Indeks RB SKPD sebagai salah satu parameter dalam nilai Indeks Reformasi Birokrasi keseluruhan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Nilai Indeks didapat dari Laporan Hasil Evaluasi RB</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat, Biro Organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenpan RB

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Layanan Publik 	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Kualitas Layanan Publik adalah suatu kemampuan untuk menyesuaikan antara keinginan atau tuntutan penerima (masyarakat) dengan pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Memperbaiki citra pemerintah di mata masyarakat, karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat akan dapat diwujudkan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> Tahapan Penghitungan Indeks Pelayanan Publik :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan nilai untuk setiap indikator <ul style="list-style-type: none"> Nilai per indikator: $\left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3}\right) \times \text{bobot perindikator}$ Menentukan nilai setiap aspek <ul style="list-style-type: none"> Nilai per aspek: $\sum \text{nilai perindikator}$ Menentukan indeks <ul style="list-style-type: none"> Nilai Indeks: $\sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$ <p>Aspek Penilaian Indeks Pelayanan Publik : Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana prasarana, Sistem informasi pelayanan public, Konsultasi dan Pengaduan Inovasi</p>	Biro Organisasi	Kemenpan RB
3.	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kemiskinan 	<p><u>Makna Indikator:</u> Ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Indeks yang menggambarkan tingkat kesenjangan pendapatan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan;</u> BPS</p>	Dinas Sosial	Dinas Sosial

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasiskan kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kebahagiaan 	<p><u>Makna Indikator:</u> Ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan karena kebahagiaan merupakan refleksi dari tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh individu.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Indikator ini menunjukkan fenomena bahwa kebahagiaan penduduk akan berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dan perkembangan sosial di masyarakat.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> $I_{\text{kepuasan Hidup}} = \frac{w_1 * I_{\text{kepuasan Personal}} + w_2 * I_{\text{kepuasan Sosial}}}{w_1 + w_2}$ $I_{\text{kepuasan Hidup Personal}} = \frac{\sum w_i * x_i}{\sum w_i}$ $I_{\text{kepuasan Hidup Sosial}} = \frac{\sum w_i * x_i}{\sum w_i}$ $I_{\text{Perasaan (Affect)}} = \frac{\sum w_i * x_i}{\sum w_i}$ $I_{\text{Makna Hidup (Eudamonia)}} = \frac{\sum w_i * x_i}{\sum w_i}$ <p>Selanjutnya Indeks Kebahagiaan dihitung dengan formula:</p> $I_{\text{kebahagiaan}} = \frac{w_1 * I_{\text{kepuasan Hidup}} + w_2 * I_{\text{Perasaan}} + w_3 * I_{\text{Makna Hidup}}}{w_1 + w_2 + w_3}$ <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> x_i merupakan skor indikator ke-i, sedangkan w_i merupakan penimbang indikator ke-i Penentuan besarnya penimbang (w) didasarkan atas sebaran data menggunakan metode Exploratory Factor Analysis (EFA). 	<ul style="list-style-type: none"> Biro Kesejahteraan Rakyat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 	<ul style="list-style-type: none"> Biro Kesejahteraan Rakyat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		<ul style="list-style-type: none"> Konflik Sara 	<p><u>Makna Indikator:</u> Makna Indikator tersebut kita mengharapkan dengan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial di Kalimantan selatan baik itu dari segi pembinaan secara materil dan moril dapat mewujudkan Daerah yang memiliki Kualitas yang baik di bidang sosial sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi dan dapat berpengaruh baik dalam menciptakan Iklim yang Kondusif.</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Alasan Pemilihan:</u> Semakin sedikit Kasus/konflik yang terjadi, semakin tinggi tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban membandingkan dengan sebelumnya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Jumlah Kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terjadi dikali 100%</p>		
5	Meningkatkan Penyediaan dan pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke seluruh Wilayah sesuai dengan tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia • Pertumbuhan Ekonomi 	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pembangunan Manusia yaitu indicator mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/ wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standar hidup layak.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> $Indeks X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-min)})}{(X_{(i-maks)} - X_{(i-min)})}$ $IPM_j = \frac{1}{3} \sum_i Indeks X_{(i,j)}$ <p>Keterangan : x (i,j) = komponen IPM ke-I dari daerah ke-j x (i-min) = Nilai Minimum komponen IPM ke-i x (i-maks) = Nilai Maksimum komponen IPM ke-i indeksX (i,j)= indeks komponen ke-1 untuk wilayah ke-j</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
6.	Meningkatkan daya saing Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) • Inflasi 	<p><u>Makna Indikator:</u> Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana/nilai Investasi yang terdiri atas persetujuan perizinan ataupun izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang telah diterbitkan. <p><u>Alasan Pemilihan;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator LPE dapat menggambarkan seberapa besar Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan. • Peningkatan realisasi investasi merupakan cikal bakal suatu kemajuan perekonomian. Bahwasanya investasi akan menumbuhkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah. <p><u>Rumus Perhitungan;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • $LPE = BPS$ • Realisasi Investasi PMA dan PMDN = Peningkatan nilai realisasi investasi : Target peningkatan realisasi investasi X 100 	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BPS
7.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p><u>Makna Indikator:</u> Mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup disuatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data informasi adalah dengan menggunakan indeks.</p> <p><u>Alasan Pemilihan;</u> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mampu menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan secara keseluruhan</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Rumus Perhitungan:</u> IKLH Prov. = $\frac{IPA + ISPU + ITH}{3}$</p> <p>Keterangan : IKLH Prov. = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ISPU = Indeks Standar Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan</p>		

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 188.44/ O659 /KUM/2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2019

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) • Angka Rata-Rata Lama Sekolah 	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dihitung untuk penduduk usia 7 tahun ke atas, karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Indikator ini untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. • Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS) Sebagai salah satu variabel dari komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. ARLS menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kalsel. <p><u>Alasan Pemilihan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. 	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> AHLS <div style="text-align: center;"> <p>Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> </div> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia ($a, a + 1, \dots, n$)</p> <p>FK Faktor koreksi pesantren <ul style="list-style-type: none"> ARLS $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{Lama sekolah penduduk ke- } i)$ <p>dengan:</p> <p>P_{15+} = Jumlah Penduduk berusia 15 tahun ke atas</p> <p>Lama sekolah penduduk ke-i =</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak pernah sekolah = 0 Masih sekolah di SD sampai dengan S1 = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 </p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Harapan Hidup (AHH) 	<p><u>Makna Indikator:</u> Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dengan adanya indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur baik buruknya kualitas pelayanan tenaga kesehatan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Badan Pusat Statistik</p>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan BPS
3.	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p><u>Makna Indikator:</u> Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan adanya indikator tersebut dapat dijadikan alat deteksi Pemerintah dalam pengurangan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini kerja sama antara Pemerintah dalam pembentukan regulasi, swasta dalam pembukaan lapangan pekerjaan serta masyarakat, sangat di tuntut.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> $\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	SKPD Terkait dan BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
4.	Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kerukunan Umat Beragama 	<p><u>Makna Indikator:</u> Merupakan upaya sistematis untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Sebagai salah satu indikator dalam mengukur kerukunan beragama melalui persepsi, sikap, dan para pemerhati kerukunan dan sosial keagamaan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Survei indeks KUB itu dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Kementerian Agama RI</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kementerian Agama RI
5.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar manusia dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan mempertimbangkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan nilai IPG.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> IPG merupakan indikator komposisi untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender. Secara sederhana dapat dikatakan IPG merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Rumus Perhitungan: $1/3 [Xede (1)+ Xede (2)+Linc-Dist]$ Xede (1) = Xede untuk harapan Hidup Xede (2) = Xede untuk pendidikan Linc-dist = Indeks distribusi pendapatan</p>		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<p>Makna Indikator: IDG adalah indikator komposit untuk mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik.</p> <p>Alasan Pemilihan: Indikator ini mampu menggambarkan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari partisipasi dibidang ekonomi dan politik.</p> <p>Rumus Perhitungan: $1/3 (Ipar + IDM+ Lin-Dist)$ Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Linc = Indeks distribusi pendapatan</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p>Makna Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhanny</p>	Biro Organisasi	Biro Organisasi dan SKPD Pelaksana Pelayanan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala dan mengetahui kecenderungan kinerja pelayanan sebagai Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dari waktu ke waktu, atau untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Penghitungan melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif setidaknya meliputi : Prosedur pelayanan, Persyaratan pelayanan, Kejelasan pelayanan, Kedisiplinan petugas pelayanan, Tanggung jawab petugas pelayanan, Kemampuan petugas pelayanan, Kecepatan pelayanan, Keadilan mendapatkan pelayanan, Kesopanan dan keramahan pelayanan, Kewajaran biaya pelayanan, Kepastian biaya pelayanan, Kepastian jadwal pelayanan, Kenyamanan lingkungan, Keamanan pelayanan,</p>		
7.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase PAD terhadap Penerimaan Daerah	<p><u>Makna Indikator:</u> Kemandirian keuangan daerah (<i>otonomi fiscal</i>) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.</p>	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Alasan Pemilihan:</u> Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman}} \times 100\%$		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
8.	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	<p><u>Makna Indikator:</u> Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang mengukur sejauh mana implementasi Reformasi Birokrasi di 8 (delapan) area perubahan. Indikator ini diharapkan dapat mengukur sejauhmana perubahan positif birokrasi Pemerintah Prov. Kalsel dengan satu tujuan yaitu Pelayanan Publik yang prima</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Indikator ini menjadi salah satu ukuran untuk mengukur kondisi aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintah yang akuntabel, ditambah dengan kebijakan baru yang memasukan Indeks RB SKPD sebagai salah satu parameter dalam nilai Indeks Reformasi Birokrasi keseluruhan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Nilai Indeks didapat dari Laporan Hasil Evaluasi RB</p>	Inspektorat, Biro Organisasi	Kemenpan RB
		Opini BPK	<p><u>Makna Indikator:</u> Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk mengetahui kualitas pengelolaan keuangan negara yang menjamin bahwa informasi keuangan telah wajar disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Badan Pemeriksa Keuangan</p>	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Nilai SAKIP	<p><u>Makna Indikator:</u> Nilai SAKIP menilai 5 aspek pelaksanaan SAKIP di Pemerintah Provinsi Kalsel Yaitu : Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Evaluasi Capaian Kinerja</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan Nilai SAKIP diharapkan Pemerintah Provinsi Kalsel mampu mengukur tingkat akuntabilitas kinerja baik itu level Pemda, SKPD hingga ke Individu Pegawai.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> LHE SAKIP Kemenpan RB RI</p>	Bappeda, Inspektorat Biro Organisasi	Nilai SAKIP
		Indeks Profesionalisme Pegawai	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks profesionalitas ASN adalah salah satu cara untuk mendekati kualitas ASN dengan menggunakan indeks komposit dari beberapa indikator output yang bersifat independen</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Pengukuran indek profesionalitas diperlukan guna mengetahui tingkat kesesuaian antara kompetensi pegawai ASN dengan kualifikasi persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas jabatan</p>	BKD	

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><u>Rumus Perhitungan:</u> $\text{IdxPro} = \text{koef}(1-\text{gaps}) + \text{Koef}(\text{Kj}) + \text{Koef}(1-\delta\text{S1}(\text{inex})) + \text{Koef}(1-\text{inDiscpl})$ Keterangan: 1) Gaps: Persentase ASN yang tidak kompeten 2) Kj: AngkaSKP 3) δS1: Selisih rata-rata gaji dan tunjangan kinerja ASN untuk jabatan yang sama(%) 4) inDiscpl: Jumlah pelanggaran disiplin</p>		
9.	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan Dasar	<p><u>Makna Indikator:</u> Mengindikasikan besaran jumlah PMKS yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Semakin besar prosentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan menurunkan jumlah PMKS se-Kalimantan Selatan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> $\frac{\text{Target Populasi PMKS yang dibiayai APBD}}{\text{Target PMKS Kab/Kota}} \times 100$</p>	Dinas Sosial	Dinas Sosial dan Kabupaten/Kota
10.	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Angka Konflik 	<p><u>Makna Indikator:</u> Makna Indikator tersebut kita mengharapkan dengan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial di Kalimantan selatan baik itu dari segi pembinaan secara materil dan moril dapat mewujudkan Daerah yang memiliki Kualitas yang baik di bidang sosial sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi dan dapat berpengaruh baik dalam menciptakan Iklim yang Kondusif.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Semakin sedikit Kasus/konflik yang terjadi, semakin tinggi</p>	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban membandingkan dengan sebelumnya.</p> <p><i>Rumus Perhitungan:</i> Jumlah Kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terjadi dikali 100%</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kriminalitas 	<p><i>Makna Indikator:</i> Semakin sedikit kasus kriminalitas yang terjadi semakin tinggi tingkat keamanan.</p> <p><i>Alasan Pemilihan:</i> Dengan rendahnya kriminalitas yang terjadi maka ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam masyarakat akan tetap kondusif dalam mendukung proses pembangunan diKalsel</p> <p><i>Rumus Perhitungan:</i></p> $\frac{\text{Jumlah Kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah Kasus yang terjadi}} \times 100 \%$	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
11.	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Pemuda • Presentase Pemuda Mandiri 	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pembangunan Pemuda adalah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia yang mencakup lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Dengan adanya Indeks Pembangunan Pemuda menjadi suatu tolak ukur untuk berbagai kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangunan pemuda .</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Metodolog penghitungan dengan memperhatikan domain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan (Rata-rata lama sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah, APK Perguruan Tinggi), 2. Kesehatan dan Kesejahteraan (Angka Kesakitan Pemuda, Pemuda Korban Kejahatan, Pemuda Merokok, Remaja Perempuan sedang Hamil). 3. Ketenagakerjaan dan Kesempatan (Pemuda Wirausaha Keras Putih, Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda) 4. Partisipasi dan Kepemimpinan (Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Sosial Masyarakat, Partisipasi Pemuda dalam Organisasi, Pemuda Berpendapat dalam Rapat Masyarakat) 5. Gender dan Diskriminasi (Perkawinan Usia Anak, Pemuda Perempuan sedang Bersekolah Menengah (SMA/ sederajat atau lebih tinggi) dan Perguruan Tinggi, Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal) 	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
12.	Meningkatnya prestasi olahraga Provinsi Kalsel	Jumlah Medali pada event olahraga tingkat nasional	<p><u>Makna Indikator:</u> Jumlah Medali pada event olahraga tingkat nasional</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk mengetahui pentingnya kebijakan dan strategi pembinaan olahraga prestasi daerah Kalimantan Selatan pada cabang-cabang olahraga</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Pengumpulan data bersumber dari media masa dan nara sumber yang berkompeten serta pengurus di cabang olahraga di tingkat daerah dan nasional.</p>	Dinas Pemuda dan Olahraga	KONI
13.	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	<p><u>Makna Indikator:</u> Indeks Pembangunan Kebudayaan merupakan instrument yang dikembangkan oleh Kemendikbud yang merangkum tujuh dimensi pengukuran, yakni Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Untuk mengukur kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan dapat didukung oleh kondisi sosial dalam masyarakat yang cukup baik</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Kemendikbud, Kementerian PPN/Bappenas dan Badan Pusat Statistik (BPS)</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kemendikbud, BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
14.	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Infrastruktur ke-PU an yang Berkualitas • Persentase Kesesuaian Tata Ruang • Persentase Luasan Kawasan Permukiman dan Perumahan dalam Kondisi Baik • Rasio Elektrifikasi • Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi 	<p><u>Makna Indikator:</u> Indikator ini sebagai indikator pembangunan</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Diharapkan dengan adanya Indikator ini dapat menunjang pertumbuhan pembangunan yang ada di daerah.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> $\text{Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar} = \frac{CA+CS+RE+K}{4}$ <p>Keterangan: CA = Cakupan Air Bersih CS = Cakupan Sanitasi RE = Rasio Elektrifikasi K = Telepon (Komunikasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Perhubungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman • Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral • Dinas Perhubungan
15.	Meningkatnya Perekonomian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Laju Pertumbuhan Ekonomi • Pengeluaran Perkapita 	<p><u>Makna Indikator:</u> Pertumbuhan Ekonomi yaitu Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto yang menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.</p> <p>Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional; sebagai dasar pembuatan proyeksi atau perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional; sebagai</p>	Seluruh SKPD Provinsi Kalsel	BPS

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>dasar pembuatan prakiraan bisnis, khususnya persamaan penjualan.</p> <p>Untuk indikator pengeluaran perkapita dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.</p> <p><i>Rumus Perhitungan:</i></p> $\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB } t - \text{PDRB } t-1}{\text{PDRB } t-1} \times 100 \%$ <p>Keterangan: PDRBt = PDRB tahun tertentu PDB/PDRB t-1 = PDRB tahun sebelumnya</p> <p>Pengeluaran Per Kapita</p> $Y^{**} = \frac{Y^*}{\text{PPP}}$ $Y^* = \frac{Y}{\text{IHK}} \times 100\%$ <p>Keterangan: Y** = Pengeluaran per kapita yang disesuaikan Y* = Pengeluaran per kapita harga konstan Y = Pengeluaran per kapita setahun IHK = Indeks Harga Konsumen tahun dasar 2012</p>		
16.	Terwujudnya Mandiri Pangan	Skor pola pangan harapan (PPH)	<p><i>Makna Indikator:</i> PPH merupakan susunan beragam pangan yang</p>	Dinas Tanaman Pangan dan	Dinas Tanaman Pangan dan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u> Skor Pola Harapan Pangan berguna untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan. Selain itu juga dapat digunakan untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u> Data yang digunakan dalam penghitungan skor PPH adalah data jumlah konsumsi energi per kelompok pangan. Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan Kementerian Pertanian tahun 2001 yaitu : (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3)Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5)Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8)Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%.</p>	Hortikultura	Hortikultura dan BPS
17.	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triwulan Rupiah)	<p><u>Makna Indikator:</u> Rencana/nilai Investasi yang terdiri atas persetujuan perizinan ataupun izin prinsip PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) yang telah diterbitkan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan:</u></p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Peningkatan realisasi investasi merupakan cikal bakal suatu kemajuan perekonomian. Bahwasanya Investasi akan menumbuhkan perekonomian, penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.</p> <p>Rumus Perhitungan: Peningkatan Nilai realisasi Investasi dibagi target peningkatan realisasi investasi X 100%</p>		
18.	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 	<p>Makna Indikator: Indeks tutupan hutan merupakan angka yang menunjukkan gambaran atau indikasi awal untuk memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi tutupan hutan pada lingkup dan periode tertentu. Semakin jauh dengan angka 100, mengidentifikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup yang dilakukan.</p> <p>Alasan Pemilihan: Perhitungan Indeks Tutupan Hutan merupakan data dasar dalam perlindungan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH). Tutupan hutan merupakan bagian dari isu hijau yakni pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang menangani aspek-aspek konservasi atau pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Isu hijau seharusnya memiliki kontribusi yang sama terhadap IKLH, namun karena hanya diwakili 1 indikator yakni tutupan hutan, maka bobotnya lebih besar dibanding indicator lainnya dalam perhitungan IKLH. Hutan merupakan salah satu komponen penting ekosistem yang berfungsi sebagai penjaga tata air, pencegah erosi, pengatur iklim, dan tempat tumbuh berbagai plasma nutfah. Pada hakikatnya, hutan memberikan manfaat yang sama terhadap manusia, sehingga manusia memiliki hak</p>	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>yang sama.terhadap layanan hutan atau luasan hutan yang sama. Setiap luas lahan harus memiliki proporsi luas hutan yang sama untuk menjaga kelestarian lingkungan hidupnya. Sehingga perlu adanya angka yang menggambarkan kondisi tersebut melalui indeks tutupan hutan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> $TH = \frac{LTH}{LWP}$ <p>Selanjutnya dilakukan konversi persentase tutupan hutan hingga didapatkan indeks tutupan hutan</p>		
19.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) • Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan 	<p><u>Makna Indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) Provinsi Kalimantan Selatan sedang berbenah dan mengalihkan perekonomian dari Pertambangan ke sektor Pariwisata; • Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan <p><u>Alasan Pemilihan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) Dengan adanya indikator ini diharapkan dapat mengukur Jumlah Wisatawan baik itu mancanegara dan Nusantara yang berkunjung ke Kalimantan Selatan sehingga program dan kegiatan yang dicanangkan nantinya akan mendongkrak Jumlah Wisatawan yang 		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>datang;</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Hari Lama Tinggal Wisatawan <p>Menghitung lama tinggal rata rata wisatawan di Kalimantan Selatan</p> <p><u>Rumus Perhitungan:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara) yang datang ke Kalsel ditahun N;• Jumlah hari lama tinggal rata rata wisatawan		

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SAHBIRIN NOOR
Jabatan : GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

Pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab saya.

Banjarbaru, 5 Februari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah	13.7
		Angka Rata-Rata Lama Sekolah	9
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	69.64
3.	Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.6 - 4
4.	Meningkatnya kerukunan umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	100
5.	Meningkatnya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67.78
6.	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83,63
7.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Daerah	7
8.	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	85.01
		Opini BPK	WTP
		Nilai SAKIP	81.01
		Indeks Profesionalisme Pegawai	95
9.	Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	45
10.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat	Angka Konflik	0
		Angka Kriminalitas	4344
11.	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	53
		Persentase Pemuda Mandiri	1.50
12.	Meningkatnya prestasi olahraga provinsi kalsel	Indeks Pembangunan Pemuda	50
13.	Meningkatnya Ketahanan Budaya dan Kualitas Seni Masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan	45

14.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur untuk pemerataan Pembangunan	Persentase Infrastruktur ke-PU an yang berkualitas	70.89
		Persentase Kesesuaian Tata Ruang	82
		Persentase luasan kawasan permukiman dan perumahan dalam kondisi baik	77.17
		Rasio Elektrifikasi	95.5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Transportasi	81.25
15.	Meningkatnya perekonomian daerah	Pertumbuhan Ekonomi Prov. Kalsel	4,50-5,03
16.	Terwujudnya mandiri pangan	Skor pola pangan harapan (PPH) tingkat ketersediaan	84.5
17.	Meningkatnya nilai investasi dalam aktivitas Perekonomian	Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	14.4
18.	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64
19.	Meningkatnya kontribusi sector pariwisata	Jumlah Wisatawan (Mancanegara dan Nusantara)	2.473.434
		Jumlah Hari lama tinggal wisatawan	5

APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan : Rp. 5.526.165.272.537

Banjarbaru, 5 Februari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 067 TAHUN 2014**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 093 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 042 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 93);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 29) ;
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 081 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 81) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Biro Organisasi yang selanjutnya disebut Karo Organisasi adalah Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

8. Kepala Bagian Ketatalaksanaan yang selanjutnya disebut Kabag Ketatalaksanaan adalah Kepala Bagian Ketatalaksanaan pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
9. Kepala Sub Bagian Prosedur dan Tata Kerja yang selanjutnya disebut Kasubbag Prostaker adalah Kepala Sub Bagian Prostaker pada Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Tim Penyusun adalah Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
11. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).
12. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Menteri PANRB adalah Menteri pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.
13. Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Mendagri adalah Menteri pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
14. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Meneg PPN/Kepala BAPPENAS adalah Menteri Negara/Kepala pada Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

BAB II

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Kasubbag Prostaker menyusun jadwal kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah.

Pasal 3

- (1) Kasubbag Prostaker menyiapkan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD.
- (2) Kasubbag Prostaker meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP kepada Kabag Ketatalaksanaan.

Pasal 4

- (1) Kabag Ketatalaksanaan menelaah konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Kabag Ketatalaksanaan meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Karo Organisasi.

Pasal 5

- (1) Karo Organisasi mengoreksi konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Karo Organisasi meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Asisten Pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Asisten Pemerintahan mengoreksi konsep surat dan memberikan paraf pada konsep tersebut.
- (2) Asisten Pemerintahan meneruskan konsep surat Permintaan LAKIP SKPD kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretaris Daerah menandatangani konsep surat Permintaan LAKIP SKPD dan mengembalikan surat tersebut kepada Kasubbag Prostaker.

Pasal 8

Kasubbag Prostaker mengirimkan Surat Permintaan LAKIP SKPD Tahun 2013 kepada seluruh SKPD Provinsi Kalsel.

Pasal 9

Kasubbag Prostaker membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalsel.

Pasal 10

Tim Penyusun menerima LAKIP SKPD Provinsi Kalsel, kemudian menelaah, mengoreksi dan meminta data apabila terdapat kekurangan pada LAKIP SKPD tersebut.

Pasal 11

Tim Penyusun merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerja SKPD menjadi draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.

Pasal 12

Tim Penyusun melaksanakan review awal draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi bersama dengan Tenaga Ahli.

Pasal 13

- (1) Tim Penyusun melaksanakan ekspos draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dengan seluruh SKPD terkait.
- (2) Ekspos dilaksanakan dalam rangka menyinkronisasikan data capaian yang dikompilasikan oleh Tim Penyusun dengan data termutakhir dari SKPD.

Pasal 14

- (1) Tim Penyusun menyempurnakan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi berdasarkan hasil review dan ekspos.
- (2) Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi yang telah disempurnakan diserahkan kepada Kasubbag Prostaker selaku Sekretaris Tim untuk dicetak.

Pasal 15

- (1) Kasubbag Prostaker mencetak draft Laporan Akuntabilitas Kinerja yang telah disempurnakan, serta membuat draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja.
- (2) Kasubbag Prostaker meneruskan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja dan draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja kepada Kabag Ketatalaksanaan.

Pasal 16

Kabag Ketatalaksanaan mengoreksi draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi dan meneruskan kepada Kepala Biro Organisasi.

Pasal 17

Asisten Pemerintahan memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Sekretaris Daerah memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meneruskan kepada Gubernur.

Pasal 19

- (1) Gubernur memeriksa draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan menandatangani.
- (2) Gubernur memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan menandatangani Lembar Kata Pengantar draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Gubernur mengembalikan Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kepada Kasubbag Prostaker.

Pasal 20

- (1) Kasubbag Prostaker mencetak dan menggandakan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
- (2) Kasubbag Prostaker membubuhkan stempel basah pada Lembar Kata Pengantar naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Kepala Biro menyampaikan Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah kepada Menteri PANRB di Jakarta dan tembusan kepada Mendagri serta Meneg PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta.

BAB VI

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 22

- (1) Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas terdiri atas :
 - a. Gubernur selaku Pengarah ;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Penanggung Jawab ;
 - c. Asisten Pemerintahan selaku Koordinator ;
 - d. Karo Organisasi selaku Ketua Tim ;
 - e. Kabag Ketatalaksanaan selaku Wakil Ketua Tim ;
 - f. Kasubbag Prostaker selaku Sekretaris Tim ; dan
 - g. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipilih selaku Anggota Tim.

BAB V

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 23

- (1) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dioperasikan secara khusus dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah secara efisien, efektif, dan tepat waktu sesuai dengan standar waktu maksimal untuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 September 2014

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 24 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

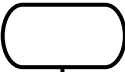
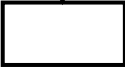



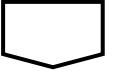

MUHAMMAD ARSYADI

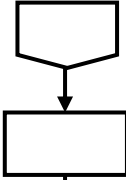
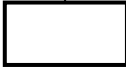
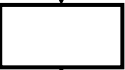
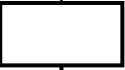

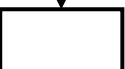


BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2014 NOMOR 67

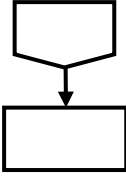
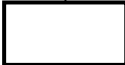


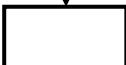
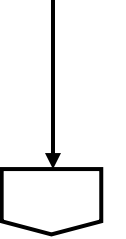
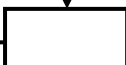
LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR NOMOR 067 TAHUN 2014
 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN
 LAPORAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
 SELATAN

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Gubernur Kalimantan Selatan
	Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel

<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;</p> <p>b. Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <p>a. memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;</p> <p>b. memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan ;</p> <p>c. memahami dengan akuntabilitas kinerja dan indikator-indikator kinerja; dan</p> <p>d. mempunyai komitmen tinggi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;</p>
<p>Keterkaitan :</p> <p>a.</p> <p>b.</p>	<p>Peralatan /Perlengkapan :</p> <p>a. perangkat komputer</p> <p>b. lemari arsip (<i>filing cabinet</i>)</p>
<p>Peringatan :</p> <p>SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam proses Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan kelambatan dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Pemerintah Provinsi Kalsel.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan :</p> <p>a. dokumentasi data akuntabilitas SKPD maupun Sekretariat Daerah.</p> <p>b. dokumentasi pertanggungjawaban penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja.</p>

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA							MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Kasubbag Prostaker	Kabag Ketatalaksanaan	Karo Organisasi	Asisten Pemerintahan	Sekretaris Daerah	Tim Penyusun	Gubernur	Persyaratan & Kelengkapan	Waktu	Output		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	Menyusun Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi.									Surat Menteri PANRB dan DPA	10 menit	Jadwal Kegiatan Penyusunan Lap. Akunt. tersusun	
2.	Menyiapkan konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Kabag Ketatalaksanaan									Jadwal Kegiatan Penyusunan LAKIP	10 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	
3.	Menelaah konsep surat, memberikan paraf pada konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Karo Organisasi.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	10 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD diparaf Kabag	
4.	Mengoreksi konsep surat, memberikan paraf pada konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Asisten Pemerintahan.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	10 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD diparaf Karo	
5.	Mengoreksi konsep surat, memberikan paraf pada konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	20 menit	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD diparaf Asisten	
6.	Menandatangani konsep Surat Permintaan LAKIP SKPD dan mengembalikan kepada Kasubbag Prostaker.									Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD	1 jam	Draft Surat Permintaan LAKIP SKPD ditandatangani	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	Mengirimkan Surat Permintaan LAKIP SKPD kepada seluruh SKPD Provinsi Kalsel.								Surat Permintaan LAKIP SKPD	1 hari	Surat Permintaan LAKIP SKPD terkirim	
8.	Membentuk Tim dan menyiapkan rapat persiapan penyusunan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi.								Surat Permintaan LAKIP SKPD	1 hari	Tim Penyusun Lap. Akunt. terbentuk	
9.	Menerima LAKIP SKPD, menelaah, mengoreksi dan meminta data apabila terdapat kekurangan pada LAKIP SKPD tersebut.								SK Tim Penyusun Lap. Akunt.	10 hari	LAKIP SKPD diterima	
10.	Merumuskan hasil kompilasi data capaian kinerja SKPD menjadi draft Lap. Akuntabilitas Kinerja Provinsi.								LAKIP SKPD diterima	10 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi	
11.	Melaksanakan review awal draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi bersama dengan Tenaga Ahli.								Draft Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi di review	
12.	Melaksanakan ekspos draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi dengan seluruh SKPD terkait.								Draft Lap. Akunt. Provinsi	2 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi di diekspos	
13.	Menyempurnakan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi berdasarkan hasil review dan ekspos kemudian menyampaikan kepada Kasubbag Prostaker.								Hasil review dan ekspos Draft Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Draft Lap. Akunt. Provinsi disempurnakan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Mencetak draft Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disempurnakan, membuat draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Kabag.								Hasil penyempurnaan Draft Lap. Akunt. Provinsi	1 hari	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi dicetak	
15.	Mengoreksi draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Karo.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi		Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dikoreksi	
16.	Memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Asisten Pemerintahan.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	2 jam	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Provinsi diparaf Karo	
17.	Memaraf draft Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Sekretaris Daerah.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	2 jam	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Provinsi diparaf Asisten	
18.	Memaraf draft Surat Laporan Kinerja dan meneruskan kepada Gubernur.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	2 jam	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Provinsi diparaf Sekda	
19.	Memeriksa dan menandatangani draft Surat Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja, kemudian mengembalikan kepada Kasubbag Prostaker.								Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Draft Surat Penyampaian Lap. Akunt. Dan Lap. Akunt. Provinsi ditandatangani Gubernur	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Mencetak dan menggandakan Laporan Akuntabilitas Kinerja serta membubuhkan stempel basah pada Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi.								Naskah Lap. Akunt. Provinsi	5 hari	Naskah Lap. Akunt. Provinsi terdokumen-tasi dan tercetak	
21.	Menyampaikan Surat Penyampaian Laporan Kinerja dan naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Provinsi kepada Menteri PANRB di Jakarta dengan tembusan kepada Mendagri dan Meneg PPN/Kepala BAPPENAS di Jakarta.								Naskah Lap. Akunt. Provinsi	3 hari	Tanda terima Lap. Akunt.	

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN